



RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	II-1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-10
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-12
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-13
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-16
2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.	II-19
2.1.1.7. Demografi	II-19
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-22
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	II-22
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua.....	II-30
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-31
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-36
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. II-36	II-36

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	II-36
2.1.3. Aspek Daya Saing.....	II-40
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-40
2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-41
2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik Global.....	II-45
2.1.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-47
2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro	II-49
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-50
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	II-50
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-55
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	II-56
2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-57
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-67
2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir.....	II-69
2.2.2. Kinerja Pendapatan Daerah	II-70
2.2.3. Kinerja Belanja Daerah	II-75
2.2.4. Kinerja Pembiayaan Daerah	II-82
2.2.5. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan ...	II-87
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-86
2.3.1. Permasalahan.....	II-86
2.3.1.1. Permasalahan Pada Aspek Geografi.....	II-86
2.3.1.2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-88
2.3.1.3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing	II-91
2.3.1.4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum ...	II-93

2.3.2. Isu Strategis	II-94
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	
DAERAH	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	III-1
3.1.1. Visi	III-1
3.1.2. Misi.....	III-4
3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	III-15
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan ..	III-54
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Rembang ..	III-54
3.2.2. Pentahapan Pembangunan Daerah	III-65
3.2.3. Program Pembangunan.....	III-68
3.2.3.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-68
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.1.1. Urusan Wajib Pemerintah Daerah	IV-1
4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV-4
4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV-9
4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah.....	IV-11
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	IV-76
4.2.1. Indikator Kinerja Utama	IV-76
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah	IV-77
BAB V PENUTUP	
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.2. Pedoman Transisi.....	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2 Luas Tanah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Rembang	II-3
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK <i>Outcome</i>) Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-73
Tabel 2.5 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.6 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-77
Tabel 2.7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	II-81
Tabel 2.10 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-85
Tabel 2.11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang 2020-2024	II-86
Tabel 2.12 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-87

Tabel 2.13 Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.14 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024-2030	II-89
Tabel 2.15 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029 .	II-95
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang.....	III-4
Tabel 3.2 Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	III-13
Tabel 3.3 Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang.....	III-13
Tabel 3.4 Keterkaitan Misi Jangka Menengah Kabupaten Rembang dengan Misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah	III-14
Tabel 3.5 Cascading Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas	III-18
Tabel 3.6 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Rembang Beserta Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2030	III-18
Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-54
Tabel 3.8 Perumusan Tema dan Pembangunan Tahun 2026-2030 Dalam RPJMD Tahun 2025-2029	III-65
Tabel 3.9 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2025-2029	III-68
Tabel 3.10 Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-71
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah	IV-14
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rembang.....	IV-76

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah..... IV-77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-13
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rembang.....	II-1
Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang	II-4
Gambar 2.3 Peta Struktur Geologi Kabupaten Rembang.....	II-4
Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rembang	II-6
Gambar 2.5 Peta Hidrogeologi Kabupaten Rembang	II-6
Gambar 2.6 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Rembang	II-7
Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang	II-10
Gambar 2.8 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	II-15
Gambar 2.9 Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023	II-16
Gambar 2.10 Grafik Perkembangan IKLH Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023.....	II-17
Gambar 2.11 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Rembang	II-17
Gambar 2.12 Peta Daerah Rawan Longsor Kabupaten Rembang	II-18
Gambar 2.13 Peta Rawan Abrasi Kabupaten Rembang.....	II-18
Gambar 2.14 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	II-19
Gambar 2.15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (jiwa/km ²).....	II-20
Gambar 2.16 Posisi Relatif Kepadatan Penduduk Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (jiwa/km ²)	II-20
Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	II-21
Gambar 2.18 Posisi Relatif Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)	II-22
Gambar 2.19 Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (ribu jiwa)	II-22

Gambar 2.20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	II-23
Gambar 2.21 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%).....	II-24
Gambar 2.22 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	II-24
Gambar 2.23 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Pada Tahun 2024 (%).....	II-25
Gambar 2.24 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 (ribu Rp)	II-26
Gambar 2.25 Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (ribu Rp).	II-26
Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	II-27
Gambar 2.27 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%).....	II-27
Gambar 2.28 Indeks Gini Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-28
Gambar 2.29 Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024	II-28
Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-29
Gambar 2.31 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024..	II-30
Gambar 2.32 Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (tahun)	II-30
Gambar 2.33 Posisi Relatif Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (tahun)	II-31

- Gambar 2.34 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (tahun) II-32
- Gambar 2.35 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (tahun)..... II-33
- Gambar 2.36 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (tahun) II-33
- Gambar 2.37 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (tahun) II-34
- Gambar 2.38 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)..... II-35
- Gambar 2.39 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 II-35
- Gambar 2.40 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-34
- Gambar 2.41 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%). II-38
- Gambar 2.42 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)..... II-39
- Gambar 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 (%). II-40
- Gambar 2.44 Angka Ketergantungan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023 (%) II-41
- Gambar 2.45 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023 (%) II-42
- Gambar 2.46 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023 (%)..... II-43
- Gambar 2.47 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (%) II-44
- Gambar 2.48 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (%)..... II-44

Gambar 2.49 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Rembang Tahun 2021-2023	II-46
Gambar 2.50 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (ribu Rp) .	II-47
Gambar 2.51 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023 (%)	II-49
Gambar 2.52 Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2020- 2023 (%)	II-50
Gambar 2.53 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2023.....	II-52
Gambar 2.54 Indeks SPBE Kabupaten Rembang Tahun 2022-2023	II-53
Gambar 2.55 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023.....	II-54
Gambar 2.56 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023.....	II-55
Gambar 2.57 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023	II-56
Gambar 2.58 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023.....	II-57
Gambar 2.59 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	II-71
Gambar 2.60 Perkembangan Proporsi Masing-Masing Urusan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023	II-72
Gambar 2.61 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	II-75
Gambar 2.62 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiahaan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-83
Gambar 2.63 Perkembangan SILPA Tahun Berjalan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	II-84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, serta menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan juga dokumen perencanaan sektoral di lingkungan perangkat daerah.

Penyusunan RPJMD merupakan amanat konstitusional yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyusun RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa dokumen RPJMD akan menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat perundang-undangan, pasca dilantiknya pasangan **Harno dan Mochamad Hanies Cholil Barro'** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Februari 2025, maka dokumen RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah harus disusun dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan tersebut. Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan selama periode pemerintahan bupati dan wakil bupati yaitu 2025-2030.

RPJMD memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi kontrak politik kepala daerah dengan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui RPJMD, pemerintah daerah dapat memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan visi pembangunan jangka panjang serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam tahapan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, menjelaskan bahwa RPJMD disusun dengan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain menggunakan pendekatan tersebut dalam penyusunan RPJMD juga berorientasi pada prinsip tematik-holistik, integratif, dan

spasial (THIS). Orientasi holistik-tematik yang dimaksud adalah bahwa perencanaan Pembangunan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Orientasi integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke-dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Orientasi spasial bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan dimensi tata ruang.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 secara rinci mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tahapan-tahapan secara rinci penyusunan RPJMD menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tersebut meliputi:

1. Persiapan penyusunan RPJMD;
2. Pembahasan Visi dan Misi secara teknokratik;
3. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD;
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD;
5. Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD;
6. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD;
7. Konsultasi Ranwal RPJMD kepada Gubernur;
8. Penyusunan Rancangan RPJMD;
9. Musrenbang RPJMD;
10. Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD;
11. Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD;
12. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD kepada DPRD;
13. Pembahasan Ranperda RPJMD;
14. Evaluasi Ranperda RPJMD oleh Gubernur;
15. Penetapan Ranperda RPJMD.

Dari proses-proses tersebut di atas, setiap tahapan penyusunan RPJMD meliputi berbagai proses secara terstruktur dan partisipatif, mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan konsultasi publik, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, hingga penetapan dalam bentuk peraturan daerah. RPJMD disusun berdasarkan analisis kondisi daerah, evaluasi terhadap capaian RPJMD sebelumnya, serta pemetaan isu strategis pembangunan yang dihadapi Kabupaten Rembang.

RPJMD juga memiliki peran kunci sebagai pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra perangkat daerah wajib mengacu pada arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD agar terdapat keselarasan antara kebijakan makro dan rencana sektoral. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah dapat diarahkan secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

RKPD yang disusun setiap tahun juga merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD. Dengan demikian, RPJMD menjamin kesinambungan dan koherensi antara perencanaan tahunan dan perencanaan lima tahunan. Dalam kerangka tersebut, RPJMD berfungsi sebagai instrumen koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar-perangkat daerah dalam menjalankan agenda pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2023-2043). Kedua dokumen tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi bagian dari upaya konsolidasi pembangunan menuju visi akhir RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045 sinkron dengan tata ruang wilayah Kabupaten Rembang 2023-2043.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD juga harus selaras dengan arah pembangunan nasional yang termuat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang dalam RPJMN

2025-2029 dan juga Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Sinkronisasi ini penting untuk mengintegrasikan program dan pembiayaan pembangunan antar-tingkat pemerintahan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 diharapkan akan menjadi dokumen yang tidak hanya memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, RPJMD diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya Kabupaten Rembang sejahtera.

Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang terencana, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dokumen ini akan menjadi peta jalan bagi pembangunan lima tahun ke depan yang menjamin kesinambungan, konsistensi, dan keadilan bagi seluruh warga Kabupaten Rembang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Rembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170); dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan yang akan dianalisis adalah dokumen perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD daerah sekitar, RPJPD Kabupaten Rembang, RTRW Kabupaten Rembang, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program serta dokumen lainnya seperti Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional, dan target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025 – 2029 dengan masing-masing dokumen perencanaan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Rembang disusun antar lain memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan perlu disinergikan dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.

2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Rembang disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kabupaten Rembang 5 tahun yang akan datang sinergi dengan pembangunan provinsi Jawa Tengah.

3. RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 tahun 2024, yaitu pada tahapan pembangunan 5 tahunan, yaitu pada periode RPJMD yang pertama. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang ada di dalam RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045.

4. RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043

RPJMD Kabupaten Rembang memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043,

untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.

5. RTRW Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan RTRW Daerah sekitar, dalam hal ini adalah Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

6. RPJMD Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar dalam hal ini adalah Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Rembang.

7. RKPD

RPJMD Kabupaten Rembang setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2026 sampai tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

8. Renstra-PD Tahun 2025-2029

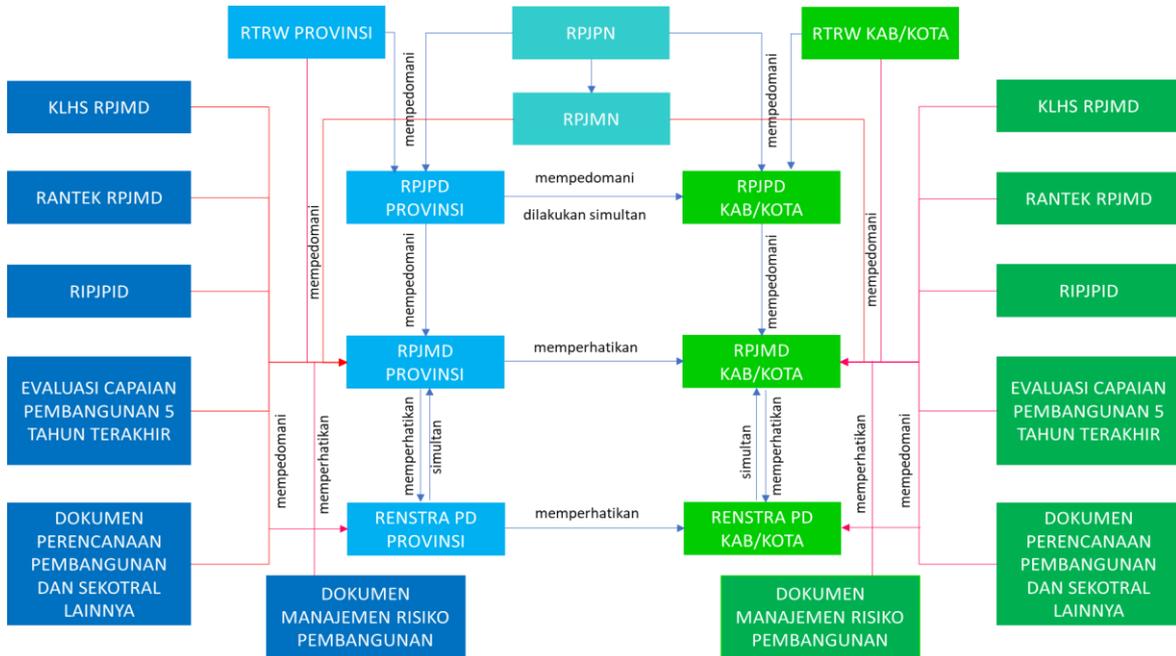
RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Renstra-PD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

9. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang memperhatikan dokumen perencanaan sektoral lain yang telah tersusun, diantaranya adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD),

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya..

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikemukakan pada skema sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke-depan.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis Perangkat Daerah dan instansi/lembaga dalam penyusunan rencana program *kegiatan* agar sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Rembang 2025-2029.

2. Menjadi acuan bagi *stakeholder* dalam rangka berpartisipasi mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah agar terjadi sinkronisasi.
3. Menjadi pedoman/acuan dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan selama 5 tahun ke-depan.
4. Menjadi acuan bagi desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang , landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, standar pelayanan minimal, kerja sama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Rembang serta BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah. Pada bab ini juga menyajikan gambaran keuangan daerah yang memuat realisasi anggaran tahun 2020 – 2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025 – 2029. Selain itu Bab ini juga memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi penjelasan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 serta strategi dan arah

kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Bab ini juga memuat program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029. Selain itu Bab ini juga memuat target keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pedoman transisi penyusunan perencanaan tahun 2030.

Luas wilayah Kabupaten Rembang sebesar 1.036,70 Km² atau sekitar 3,1 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Secara administrasi Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (109,01 Km²) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (38,28 Km²). Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd total
1	Sumber	18	78,20	7,54%
2	Bulu	16	101,10	9,75%
3	Gunem	16	84,73	8,17%
4	Sale	15	109,01	10,52%
5	Sarang	23	92,86	8,96%
6	Sedan	21	87,37	8,43%
7	Pamotan	23	80,60	7,77%
8	Sulang	21	84,81	8,18%
9	Kaliori	23	61,72	5,95%
10	Rembang	34	61,71	5,95%
11	Pancur	23	43,00	4,15%
12	Kragan	27	67,08	6,47%
13	Sluke	14	38,28	3,69%
14	Lasem	20	46,23	4,46%
Jumlah		294	1.036,70	100,00%

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2025

Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 menetapkan Kabupaten Rembang masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Banglor (Rembang-Blora). Pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru berbasis

WP ini berfokus pada: Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan; Perencanaan Tata Ruang yang responsif dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi. *Quick-Wins* untuk WP Banglor adalah Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan *Ecotourism*.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah “Pengembangan wilayah Banglor berbasis perindustrian dan *agroforestry* yang didukung pariwisata terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan”. Posisi wilayah ini sangat strategis untuk mendukung pengembangan wilayah timur Jawa Tengah.

Topografi Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Sebagian besar (56,83%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif tinggi. Di Kabupaten Rembang terdapat tiga kecamatan dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl, yaitu kecamatan Sedan, Pancur dan Kragan. Sementara itu untuk kecamatan dengan wilayah terendah adalah Kecamatan Kaliori 0-25 mdpl.

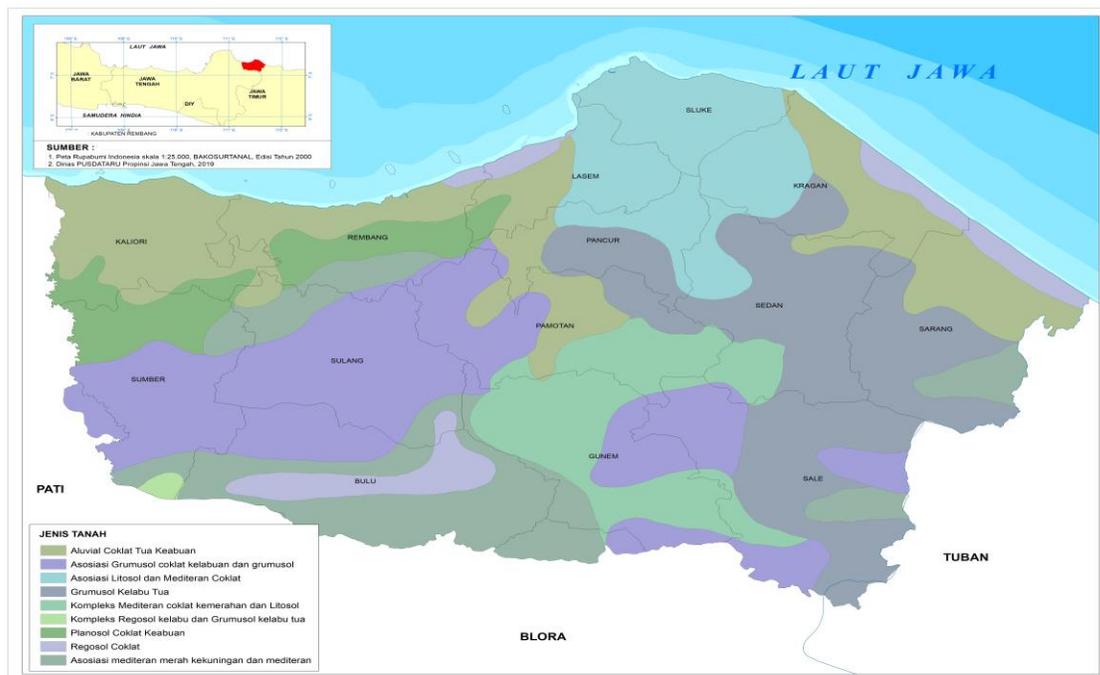
Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di
Kabupaten Rembang

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah	Jarak ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah
1	Sumber	0-200	18	78,20
2	Bulu	0-400	18	101,10
3	Gunem	0-700	20	84,73
4	Sale	0-700	42	109,01
5	Sarang	0-200	45	92,86
6	Sedan	0->700	32	87,37
7	Pamotan	0-200	22	80,60
8	Sulang	0-200	12	84,81
9	Kaliori	0-25	12	61,72

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah	Jarak ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah
10	Rembang	0-50	0	61,71
11	Pancur	0->700	16	43,00
12	Kragan	0->700	39	67,08
13	Sluke	0-700	22	38,28
14	Lasem	0-700	12	46,23
Jumlah				1.036,70

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2025

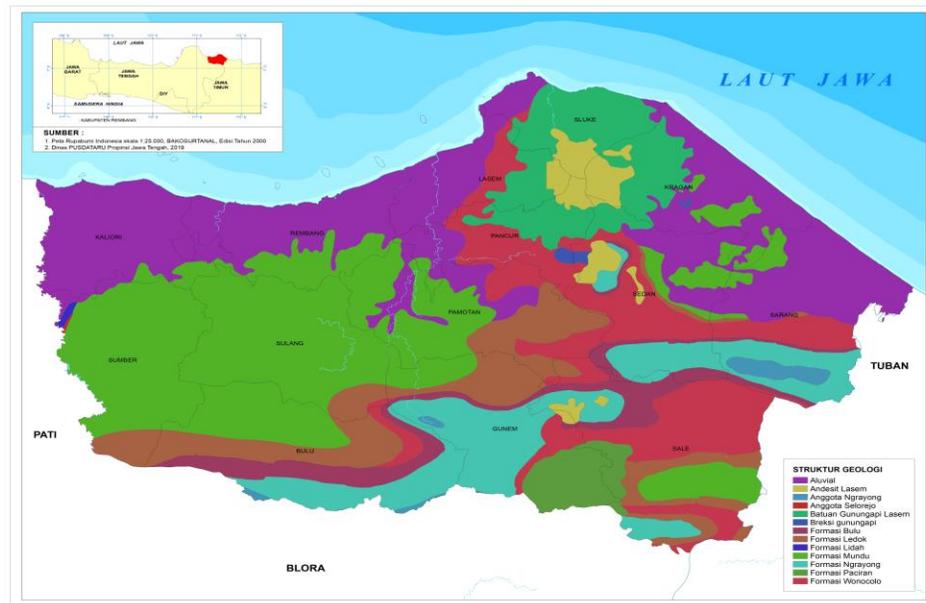
Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang antara lain: Alluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran Merah Kuning, dan Andosol.



Sumber: Bappeda, 2020

Gambar 2. 2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang

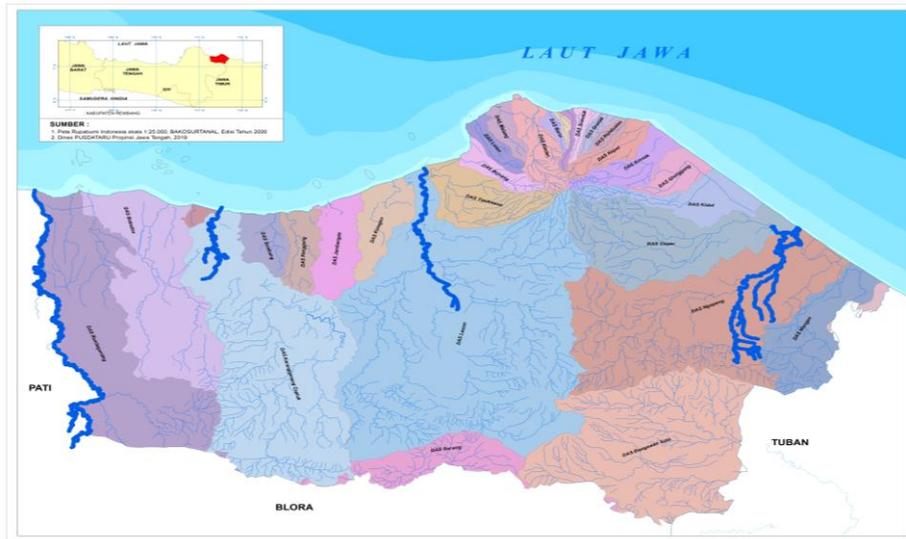
Berdasarkan komposisi struktur geologinya, Kabupaten Rembang memiliki endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Sebaran struktur geologi digambarkan peta berikut.



Sumber: Bappeda, 2020

Gambar 2. 3 Peta Struktur Geologi Kabupaten Rembang

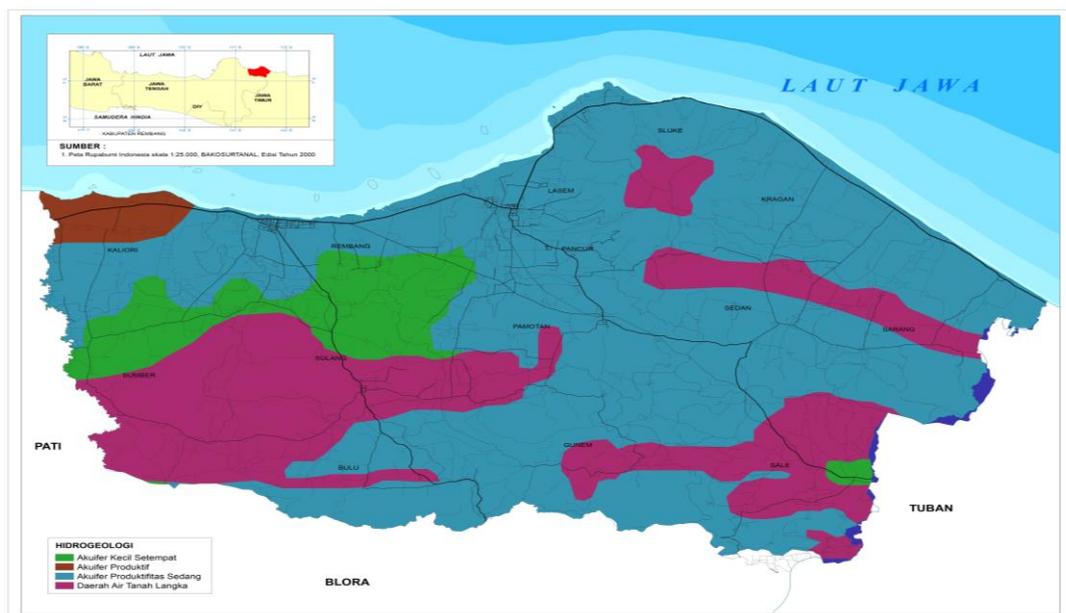
Keadaan Hidrologi Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari permukaan (*surface water*) dan air tanah. Air permukaan di Kabupaten Rembang sangat bergantung pada curah hujan yang ditampung dalam sungai dan embung-embung buatan. Dalam upaya meningkatkan volume air permukaan maka dengan mengurangi *run off* air dari hulu ke hilir. Kabupaten Rembang termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu Bengawan Solo dan Sungai Pemali Juana. Wilayah sungai Bengawan Solo hanya mencakup sebagian kecil wilayah di Kabupaten Rembang di sekitar Kecamatan Sale. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang termasuk dalam Wilayah Sungai Pemali Juana.



Sumber: Bappeda, 2020

Gambar 2. 4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rembang

Sementara itu akuifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan mampu mengalirkan air tanah) yang ada di Kabupaten Rembang meliputi akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka.

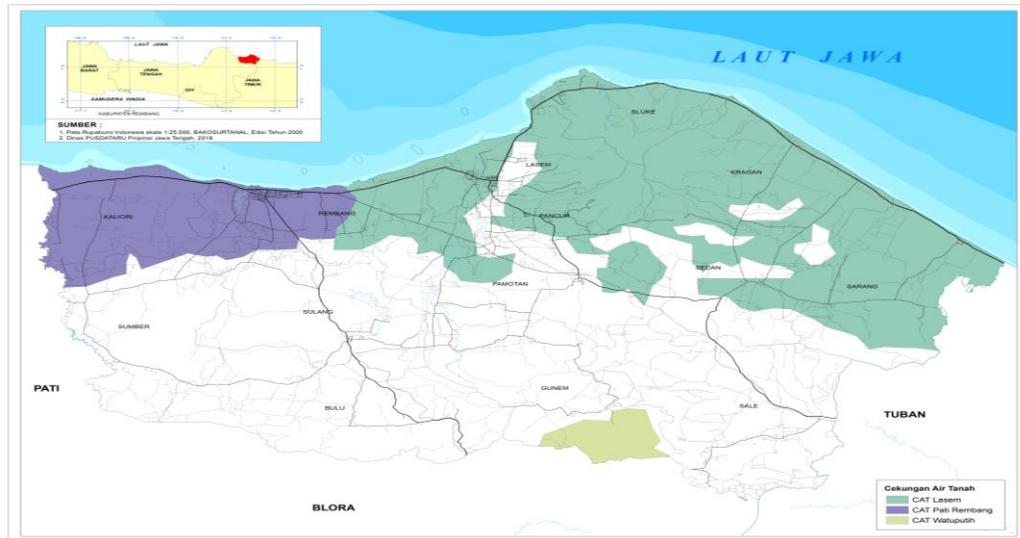


Sumber: Bappeda, 2020

Gambar 2. 5 Peta Hidrogeologi Kabupaten Rembang

Secara hidrogeologi, Kabupaten Rembang mempunyai tiga Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Lasem, CAT Pati-Rembang dan CAT Watuputih. Cekungan air tanah tersebut mendukung cadangan air baku di Kabupaten Rembang namun penggunaan air tanah harus

dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kelestarian akuifer air tanah. Apabila dilihat dari peta cekungan air tanah (CAT) Kabupaten Rembang di atas Cekungan Air Tanah paling luas yakni Cekungan Air Tanah Watu Putih di mana cekungan air tanah tersebut hampir mengelilingi seluruh wilayah di Kabupaten Rembang.



Sumber: Bappeda, 2020

Gambar 2. 6 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Rembang

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis. Bulan basah di Kabupaten Rembang terjadi selama 4 sampai 5 bulan setiap tahunnya, sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Curah hujan pada tahun 2023 paling tinggi terjadi pada bulan Desember 2023 dengan rata-rata mencapai 229 mm. Sedangkan wilayah dengan curah hujan paling tinggi selama tahun 2023 adalah Kecamatan Gunem, mencapai 1.240 mm. Tingginya curah hujan yang terjadi di Kecamatan Gunem ini dikarenakan selama tahun 2023 Kecamatan Gunem mengalami jumlah hari hujan cukup tinggi, sebanyak 85 hari. Selama tahun 2023 Kecamatan dengan jumlah hari hujan paling banyak terjadi di Kecamatan Gunem yang mencapai 85 hari, sedangkan yang paling sedikit terjadi di Kecamatan Kaliori (37 hari).

Kabupaten Rembang memiliki potensi tinggi untuk Mendukung Biodiversitas. Luasan lahan yang berpotensi tinggi mencapai 36,512.68 Ha atau 35.30% dari luas total Rembang dengan mayoritas

nilai tersebut berada di Kecamatan Sumber, sedangkan lahan potensi sangat tinggi mencapai 26.35% atau seluas 27,249.74 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Rembang dengan mayoritas berada di Kecamatan Sale. Potensi rendah hanya memiliki luas 8,105.87 Ha atau 7.84% dari luas total. Ekoregion yang berpotensi tinggi untuk biodiversitas antara lain kerucut lereng gunung, kaki gunung, perbukitan struktural lipatan. Ekoregion yang memiliki potensi tinggi masih berupa kawasan hutan, terutama pegunungan struktural lipatan.

Terkait Pemanfaatan Ruang dan Alih Fungsi Lahan, dari sisi pemanfaatan ruang, dari Luas Lahan Total di Kabupaten Rembang sebesar 10.713,18 ha, Luas Lahan Non pertanian sebesar 10.713,18 ha, Luas Lahan Sawah 27.576,54 ha, Luas Lahan Kering 28.682,01 ha, Luas Lahan Perkebunan 12.613,90 ha, Luas Lahan Hutan 23.685,12 ha, Luas Lahan Badan Air 299,64 ha.

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis dan mengikuti kebutuhan dari pasar. Setiap tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Beberapa faktor pemicu terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Rembang yaitu:

- a. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang yang dinamis, maka dalam pelaksanaan pembangunan, peranan atau fungsi lahan sebagai “ruang” tempat pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin penting. Bersamaan dengan volume dan jenis kegiatan ekonomi yang meningkat serta jumlah penduduk yang semakin bertambah. Hal tersebut membawa implikasi kebutuhan ruang yang lebih luas untuk kebutuhan perumahan, pendidikan, pertanian, fasilitas umum dan lain-lain.
- b. Perubahan dinamika sosial dan ekonomi penduduk mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari aktivitas yang kurang menguntungkan pada aktivitas yang lebih menguntungkan. Aktivitas pemanfaatan lahan yang selalu terancam terutama adalah aktivitas pertanian yang dinilai kurang

menguntungkan dibanding aktivitas ekonomi lainnya. Seiring perkembangan sosial dan ekonomi masyarakatnya, banyak penduduk yang beralih profesi pada sektor non-pertanian. Saat ini sudah jarang ditemui generasi muda yang mau menjadi petani untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya, hal tersebut juga menjadi faktor utama tingginya alih fungsi lahan.

- c. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan adanya pemerataan dan perluasan aktivitas ekonomi sehingga banyak lahan yang terkonversi menjadi lahan terbangun.

Selain keberadaan faktor pemicu, kecenderungan terjadinya perubahan penggunaan lahan ada karena desakan dalam memenuhi kebutuhan seperti untuk permukiman, industri, dan kebutuhan umum lainnya. Tekanan terkait tata guna lahan di antaranya adalah: Peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, di mana pembangunan ini meliputi pembangunan jalan desa, perkantoran, rumah sakit, dan sebagainya. Kabupaten Rembang mengalami tren peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya, peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal (perumahan), sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap.

Aktivitas penambangan di Kabupaten Rembang berupa sumber daya mineral yaitu bahan mineral bukan logam dan bebatuan atau galian C. Kabupaten Rembang mempunyai potensi bahan tambang yang sangat besar dan sekarang sudah banyak dieksploitasi. Hampir seluruh potensi bahan tambang di wilayah Kabupaten Rembang dieksploitasi. Oleh sebab itu maka dalam pelaksanaan perlu diperhatikan kelayakan kegiatan penambangan, baik secara teknis, sosial dan tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Guna mengantisipasi kerusakan lingkungan dan eksploitasi yang berlebihan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 terdapat rencana pengembangan industri. Rencana pengembangan industri tersebut di sisi perekonomian dapat membuka lapangan

kerja dan mendukung nilai positif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang. Namun bertambahnya jumlah tenaga kerja berbanding lurus dengan kebutuhan lahan untuk mendukung aktivitas. Kebutuhan akan hunian untuk pengembangan perumahan baru pada umumnya terjadi di setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Rembang. Dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk maka kebutuhan perumahan akan terus bertambah khususnya pada daerah-daerah yang dekat dengan wilayah perkotaan.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 terbagi menjadi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Selengkapnya pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Rembang sebagai berikut.



Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Gambar 2. 7 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang

1. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.801 Ha dan hutan produksi tetap seluas

kurang lebih 19.656 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berlokasi di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. Sementara itu kawasan hutan produksi tetap berlokasi di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang. Pengelolaan kawasan hutan produksi ini terbagi dalam dua KPH yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo.

2. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.837 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.

3. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah seluas kurang lebih 29.702 Ha dan lahan kering seluas kurang lebih 39.814 Ha yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang.

4. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terbagi menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem, Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang.

5. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terbagi menjadi kawasan peruntukan pertambangan minerba dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.628 Ha dengan potensi tambang berupa pasir kuarsa, pospat, ball

clay, dolomite, gypsum, kalsit, batu gamping, tras, tanah liat, andesit, batubara dan lignit yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi juga tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Rembang.

6. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri terbagi menjadi peruntukan industri besar, peruntukan industri menengah dan peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke, Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dan Kecamatan Gunem. Peruntukan industri menengah meliputi industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir, kawasan peruntukan agroindustri dan kawasan peruntukan industri pertambangan. Sementara itu industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang.

7. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan. Sedangkan kawasan peruntukan permukiman perkotaan

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara menghitung kapasitas lingkungan dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang memanfaatkan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang di hamparkan ruang tersebut. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) pada dasarnya merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan

terbangun untuk menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Dalam kurun waktu 5 tahun kendati semakin menurun namun masih tergolong mempunyai daya dukung lahan terbangun yang baik. Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) di Kabupaten Rembang menurut kecamatan menunjukkan hasil sebanyak 13 kecamatan atau sebanyak 92,86% dari total kecamatan memiliki DDLB yang baik berarti pada kecamatan tersebut masih dimungkinkan adanya peningkatan lahan terbangun.

Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindungan untuk guna lahan dan luasan wilayah. Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Rembang sebesar 0,42. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya dukung fungsi lindung Kabupaten Rembang masih dalam kondisi baik namun ke depan perlu meningkatkan daya dukung fungsi lindung untuk menjamin keberlangsungan ekosistem.

Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat dilihat dari beberapa jasa lingkungan. Jasa penyedia pangan di Kabupaten Rembang didominasi oleh kelas sedang dengan persentase sebesar 46,95%. Kelas tinggi menempati peringkat kedua dengan 25,8% dan kelas sangat tinggi 19,8%. Kelas rendah dan sangat rendah hanya mempunyai persentase 5% dan 2%. Penggunaan lahan sawah yang masih luas menyebabkan kemampuan untuk menyediakan pangan masih tinggi. Sebagian wilayah berupa hutan maupun kebun juga memiliki peran tinggi untuk menyediakan pangan. Kawasan permukiman termasuk dalam kelas rendah dan sangat rendah untuk penyedia pangan karena kemampuan lahan sudah berubah.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kebertahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan merupakan aspek penting karena sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial dalam keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Aspek tersebut mencakup indeks ketahanan pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap

Konsumsi Air Minum, dan Indikator Lainnya sesuai dengan konteks daerah.

Daya dukung fungsi lindung terkait daya dukung air merupakan potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan dalam tanah dalam KLHS RPJP Kabupaten Rembang sebesar 343.356.556,928 mm²/tahun. Keberadaan air yang sangat sentral di kehidupan setiap kehidupan makhluk hidup memiliki peran yang sangat besar untuk menunjang kesuksesan kehidupan salah satunya adalah bidang pertanian. Air termasuk dalam kategori yang dapat diperbaharui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Pelestarian air dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan waktu untuk air mengalami siklus secara alami. Jika siklus air terganggu dapat mengakibatkan banyak permasalahan seperti kekeringan, tanah longsor, dan banjir ketika musim penghujan.

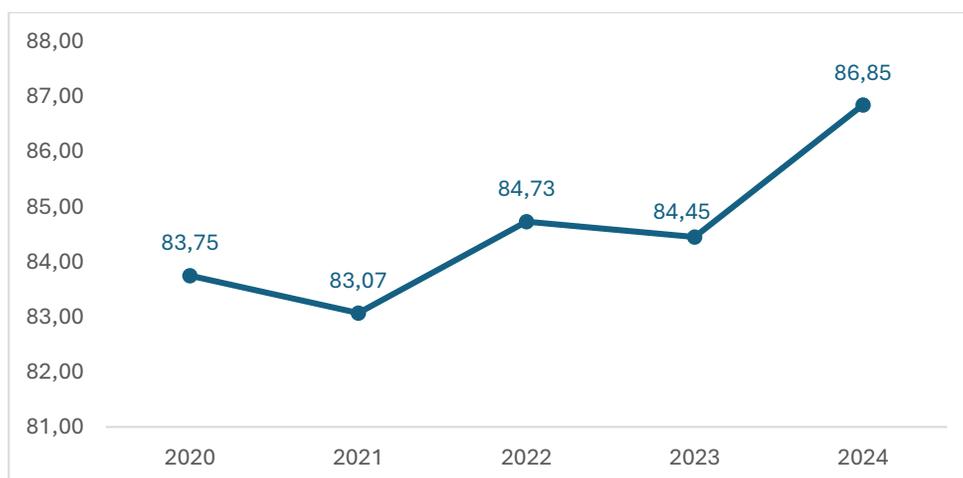
Kebutuhan air non domestik di Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebesar 1.181.749.383,93 m³/tahun. Kebutuhan air non domestik cukup besar karena luasan lahan sawah irigasi eksisting seluas 9.883,06 Ha dan sawah tadah hujan seluas 17.776,55 Ha dan tegalan eksisting seluas 28.949,82 Ha sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian juga cukup besar yaitu 36.344,56 liter/detik/Ha kemudian konversi menjadi 1.207.441.369,33 m³/tahun. Salah satu siklus air yang dapat terancam yaitu proses peresapan. Air hujan yang jatuh di atas permukaan wilayah akan mengalami proses infiltrasi dan sebagian akan menjadi air limpasan (*run-off*). Air yang mengalami proses infiltrasi akan mengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah, yang nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali permukaan. Sedangkan air limpasan akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau bergabung dengan air permukaan. Semakin sempit daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limpasan yang masuk ke badan air permukaan. Sementara itu, untuk saat ini, secara kualitas yang berbeda di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Ketika daerah resapan semakin

sempit dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air resapan.

Daya dukung pangan merupakan kemampuan daerah dalam menyediakan sumber daya pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Daya dukung pangan Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sebesar 1,65% atau surplus beras sebanyak 53.00 ton beras. Sedangkan kebutuhan lahan pangan di Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 105.626,6 ha.

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras. Asumsi konsumsi beras untuk perhitungan daya dukung lahan untuk pangan sesuai dengan standar 124/kg/orang/tahun.

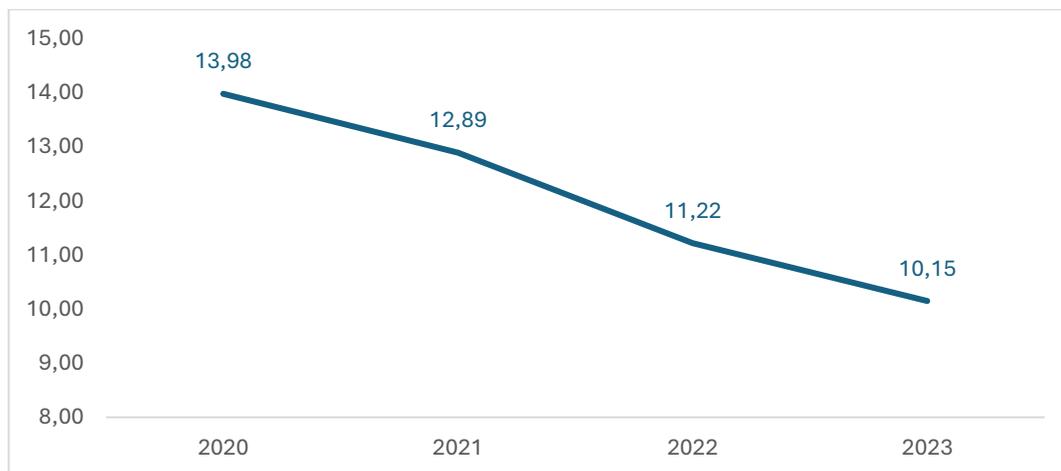
Indeks Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Rembang pada tahun 2020-2024 menunjukkan angka fluktuatif yang cenderung meningkat. Indeks ketahanan pangan pada tahun 2020 sebesar 83,75 % meningkat menjadi sebesar 86,85 % pada tahun 2024 termasuk dalam kategori baik.



Sumber: Dintanpan, 2024

Gambar 2. 8 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Perhitungan PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan. Capaian Kabupaten Rembang berdasarkan Data Badan Pangan Nasional selama tahun 2020-2023 menunjukkan penurunan besaran PoU.



Sumber: BPN, 2024

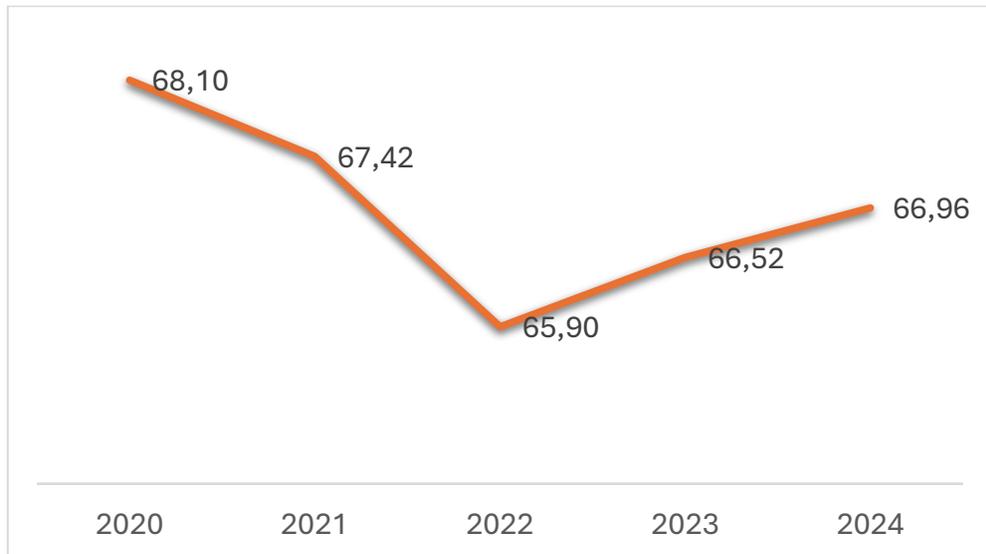
Gambar 2. 9 Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Rembang 2020-2023

Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 besaran PoU sebesar 13,98 % menjadi sebesar 10,15 % pada tahun 2023.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Rembang. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA); (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perkembangan IKLH Kabupaten Rembang dalam 4 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun, namun capaian tersebut berdasarkan kajian KLHS berada dalam kategori yang cukup. Yang menjadi tantangan pada masa yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik, mengingat penurunan kualitas lingkungan hidup perlahan mulai terjadi, baik karena pola hidup manusia, maupun perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh alam

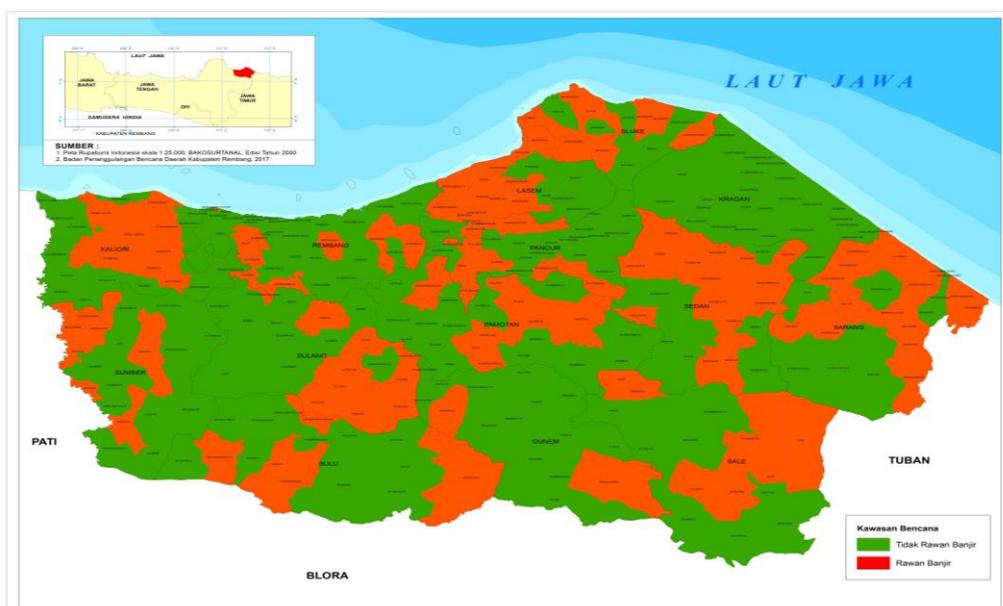
secara langsung, sehingga ke depan perlu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.



Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 10 Grafik Perkembangan IKLH Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

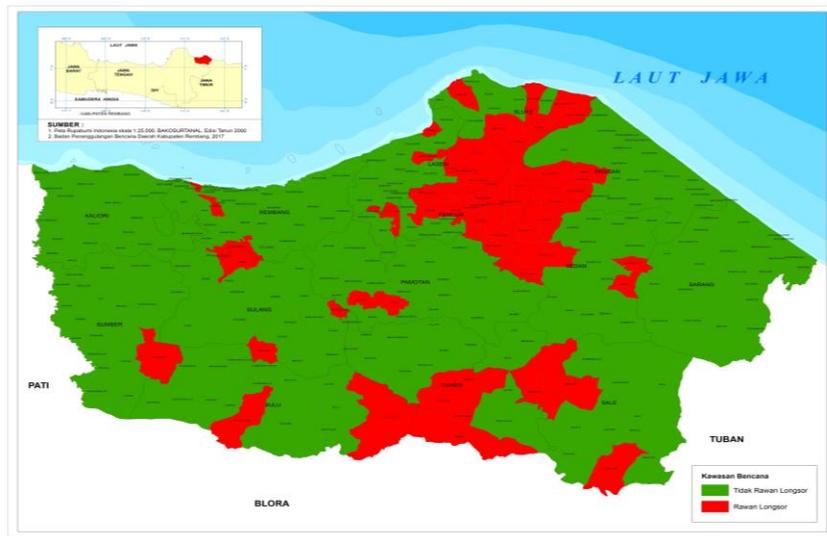
Kabupaten Rembang memiliki beberapa jenis bencana yang rawan terjadi, meliputi bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi. Kawasan Rawan Bencana Banjir berlokasi di Kabupaten Rembang tersebar di seluruh kecamatan yang terjadi secara periodik ketika musim penghujan.



Sumber: BPBD, 2020

Gambar 2. 11 Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Rembang

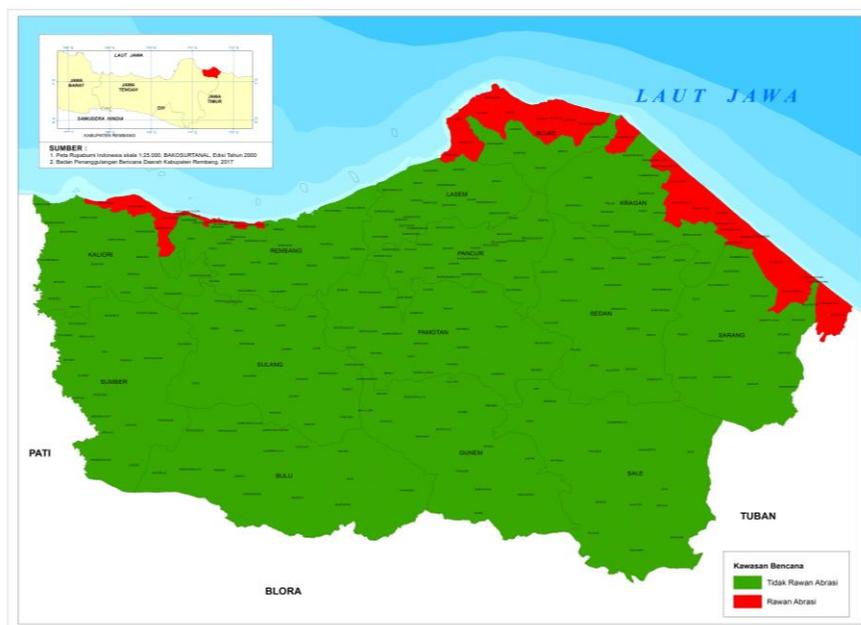
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor. Lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang tersebar di bagian selatan dan timur wilayah Kabupaten Rembang.



Sumber: BPBD, 2020

Gambar 2. 12 Peta Daerah Rawan Longsor Kabupaten Rembang

Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi. Abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Rembang di bagian timur meliputi Kecamatan Sluke, Kragan dan Sarang, yang mempunyai resiko abrasi dalam kategori sangat tinggi. Selain di wilayah pesisir timur, abrasi pantai juga terjadi di wilayah barat yaitu Kecamatan Kaliore, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh.

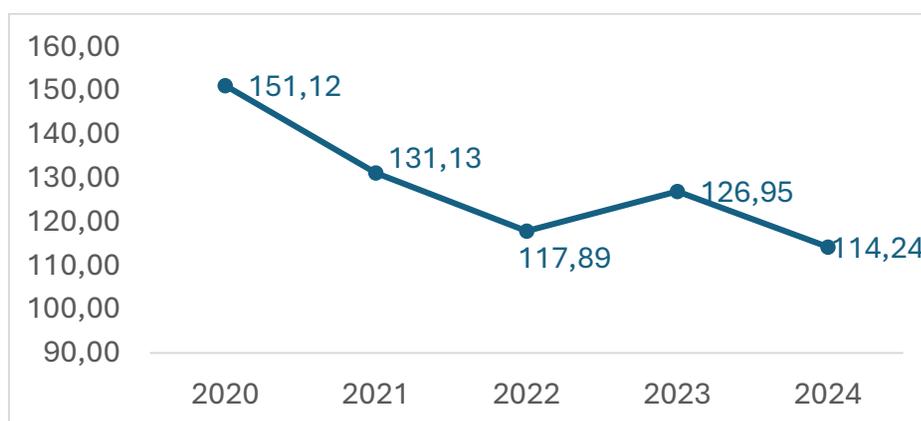


Sumber: BPBD, 2020

Gambar 2. 13 Peta Rawan Abrasi Kabupaten Rembang

2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tingkat risiko bencana di suatu daerah diukur dari Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rembang selama 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dari sebelumnya tinggi menjadi sedang selama 3 tahun berturut-turut, penurunan indeks risiko bencana adalah sebuah capaian yang baik, mengingat secara geografis Kabupaten Rembang juga berada di daerah yang rawan terjadi bencana, tantangannya indeks risiko bencana tersebut harus bisa ditekan pada level yang rendah.



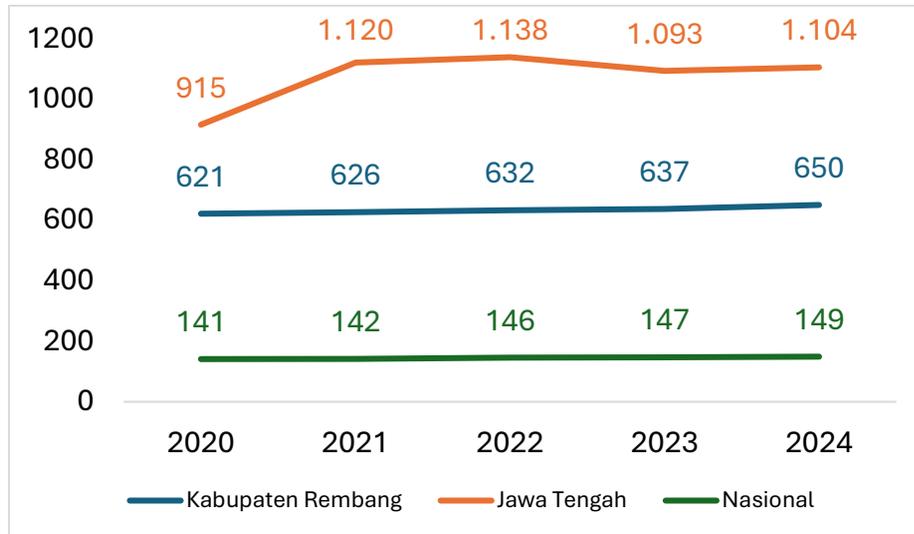
Sumber: BPBD, 2023

Gambar 2. 14 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rembang sebesar 151,12 menurun menjadi 114,24 pada tahun 2024.

2.1.1.7. Demografi

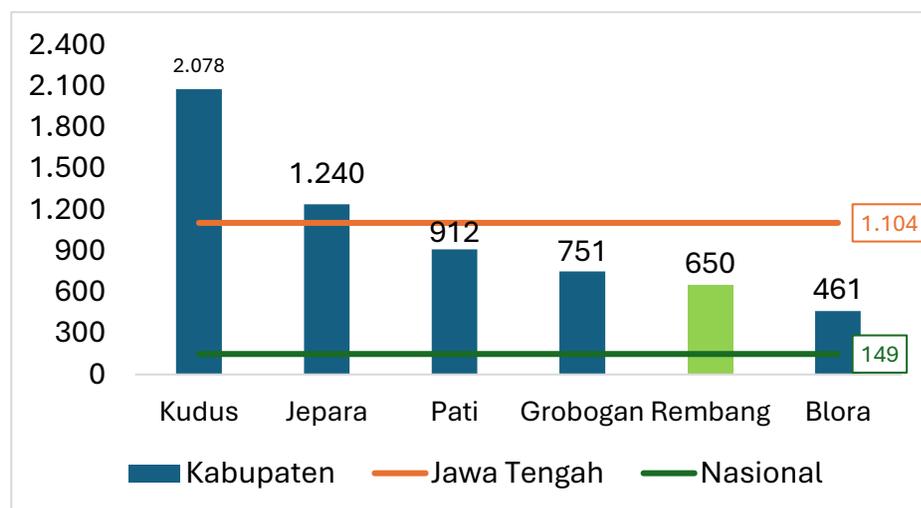
Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 15 **Kepadatan Penduduk Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (jiwa/km²)**

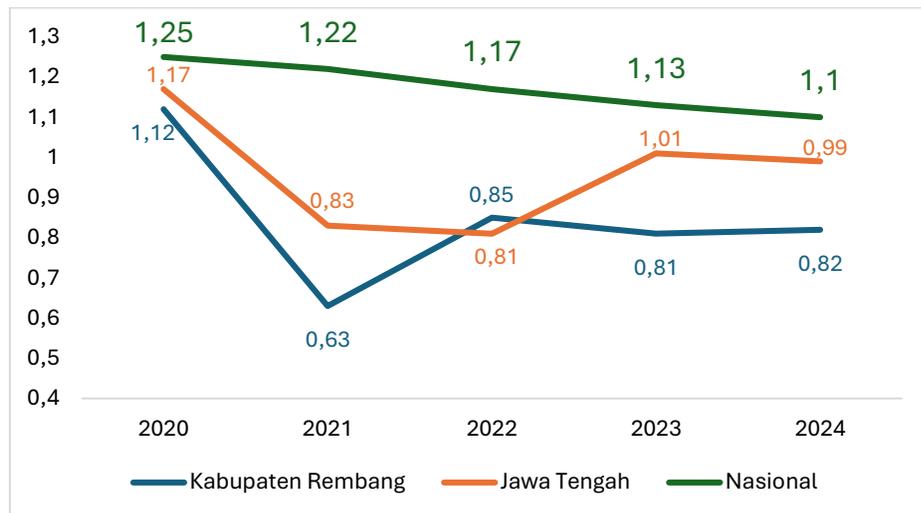
Kepadatan penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang mencapai 650 jiwa/km², sedangkan pada tahun 2020 sebesar 621 jiwa/km². Dengan demikian kepadatan penduduk Kabupaten Rembang mengalami peningkatan sebesar 29 jiwa/km² selama periode waktu lima tahun. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk dan arus migrasi masuk ke Kabupaten Rembang, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepadatan penduduk di wilayah tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistika, 2025

Gambar 2. 16 **Posisi Relatif Kepadatan Penduduk Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (jiwa/km²)**

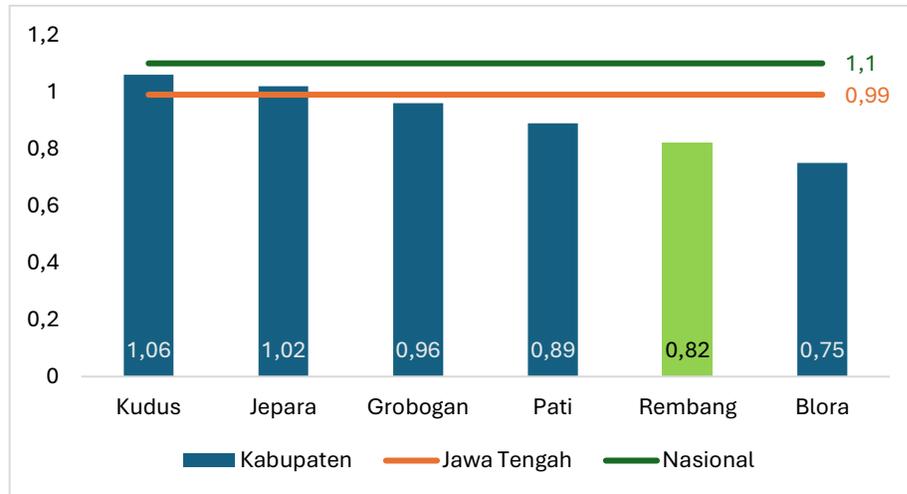
Kabupaten Rembang menempati peringkat keempat sebagai kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan kepadatan penduduk sebesar 650 jiwa/km². Kabupaten Rembang berada di antara rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Adapun kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Kudus dengan kepadatan penduduk mencapai 2.078 jiwa/km².



Sumber : Badan Pusat Statistika, 2025

Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dapat dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup tinggi sebesar 0,63% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang sebesar 0,82% lebih rendah dari rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

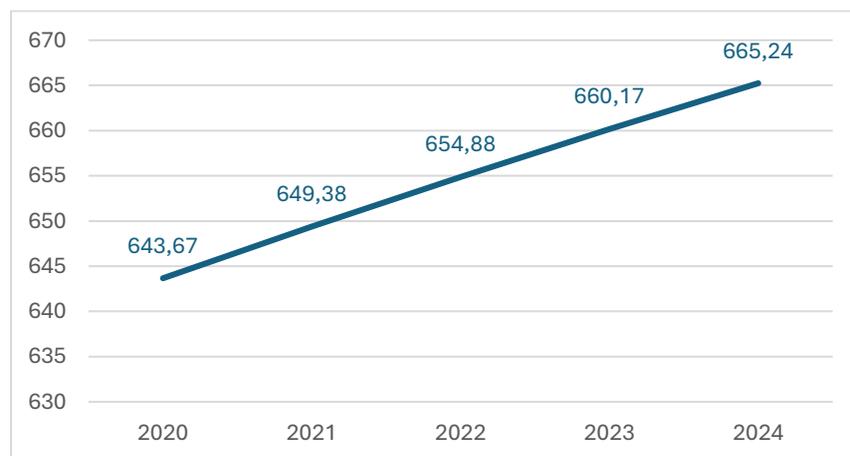


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 18 Posisi Relatif Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)

Kabupaten Rembang tahun 2024 menempati peringkat kelima dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,82 % di atas Kabupaten Blora dan sekitarnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebanyak 643,67 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2024 menjadi sebesar 665,24 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

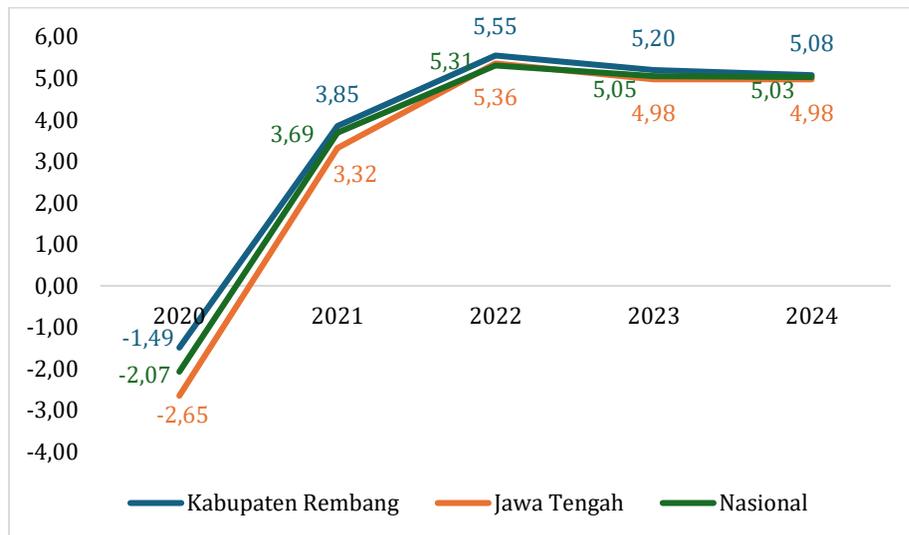
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (ribu jiwa)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

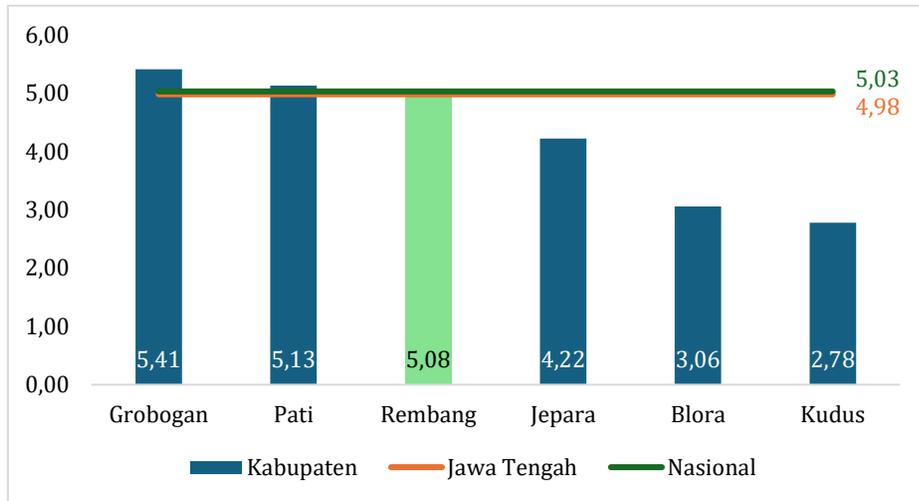
Rembang tercatat sebesar 5,08%. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan sebesar -1,49% dikarenakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang melambat seiring dengan lemahnya daya beli masyarakat yang menjadi komponen terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mulai meningkat sebesar 5,55% sebagai kenaikan tertinggi. Jika dilihat pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2024 sebesar 5,08 %. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kabupaten Rembang berada pada peringkat ketiga berada di atas Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Jepara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang masih sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,98 % dan Nasional sebesar 5,03 %.

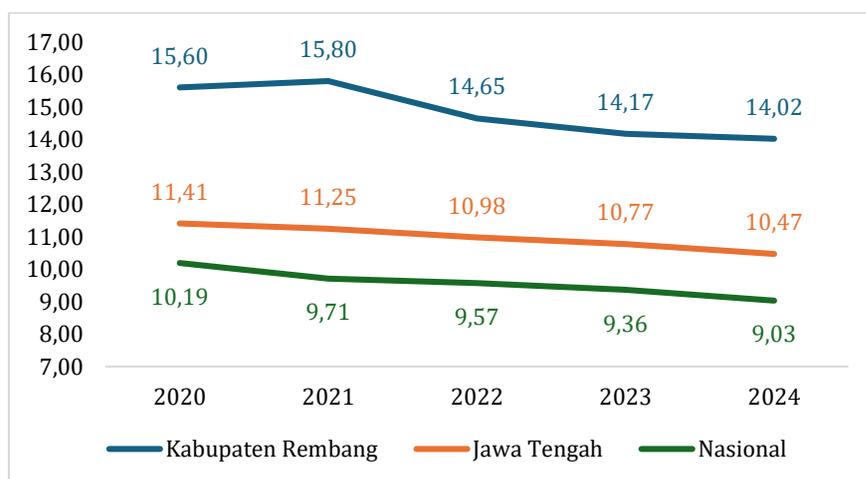


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 21 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) indikator ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

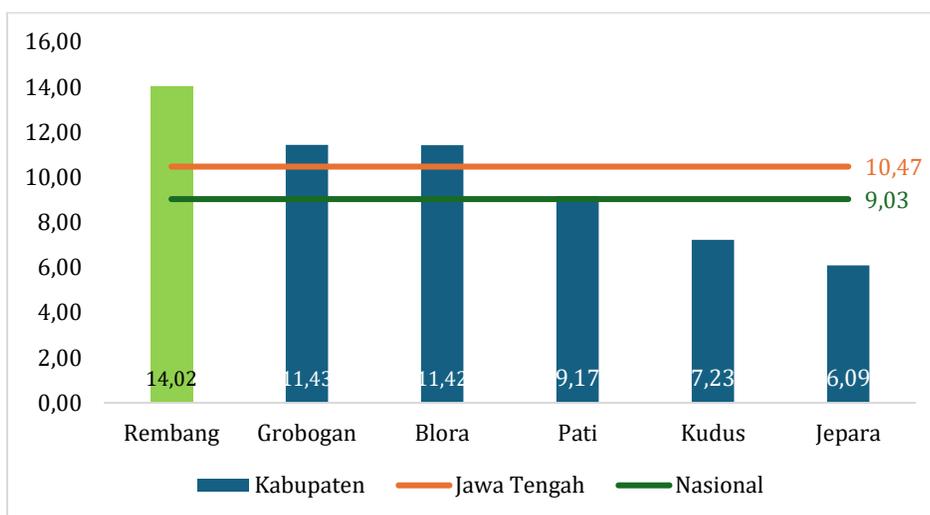
Tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang pada tahun 2024 sebesar 14,02%. Namun, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,20% poin dari tahun 2020. Hal ini disebabkan beberapa faktor akibat dampak resesi ekonomi pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,47% dan Nasional sebesar 9,03%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 22 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Posisi relatif tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2024 tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, serta di atas provinsi Jawa Tengah dan Nasional hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 23 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit wilayah atau hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah tersebut.

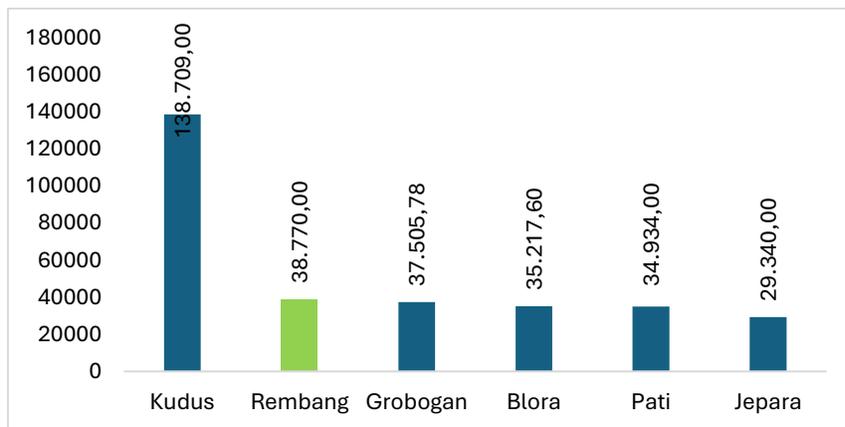
PDRB per kapita ADHB Kabupaten Rembang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Rembang sebesar 36.550,97 ribu rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Rembang pada tahun 2023 masih di bawah Provinsi dan Nasional dengan nilai masing-masing sebesar 45.199 dan 75.000 ribu rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 24 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 (ribu Rp)

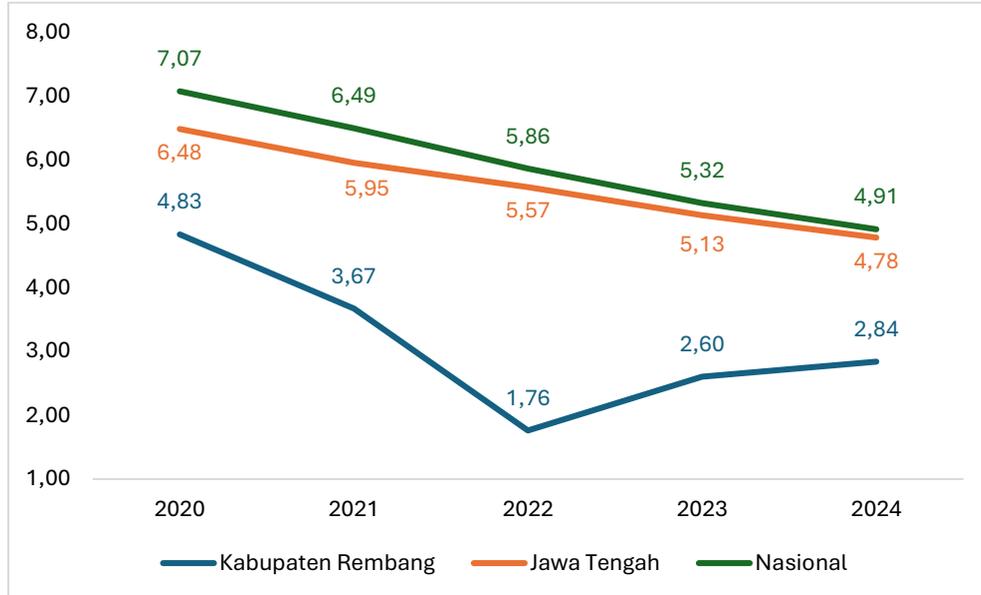
Posisi relatif PDRB per kapita ADHB Kabupaten Rembang pada tahun 2024 berada pada posisi ketiga tertinggi dari kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 25 Posisi Relatif PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (ribu Rp)

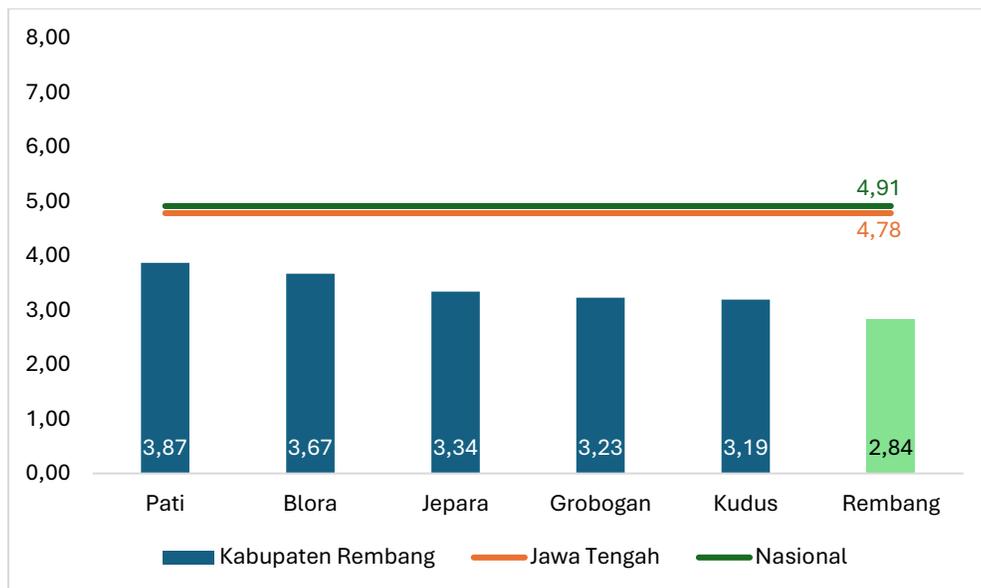
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator untuk memantau angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar. Berikut ini gambaran tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rembang tahun 2020-2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

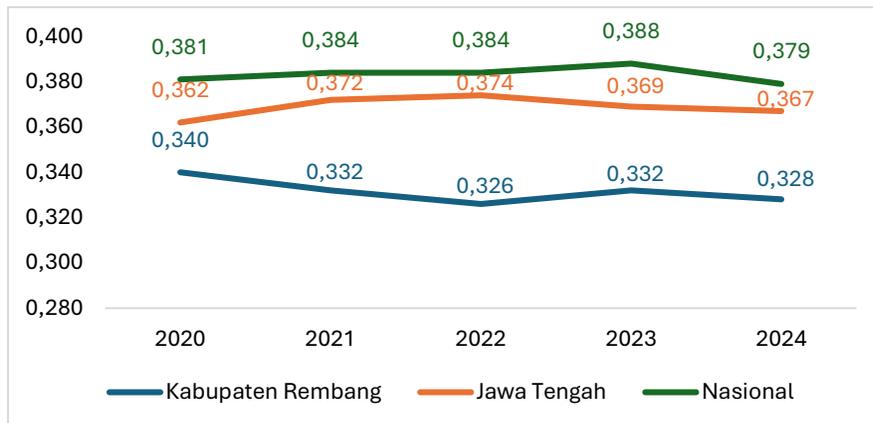
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,83 % dan tahun 2024 menjadi sebesar 2,84 %. Jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rembang lebih rendah.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.27 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)

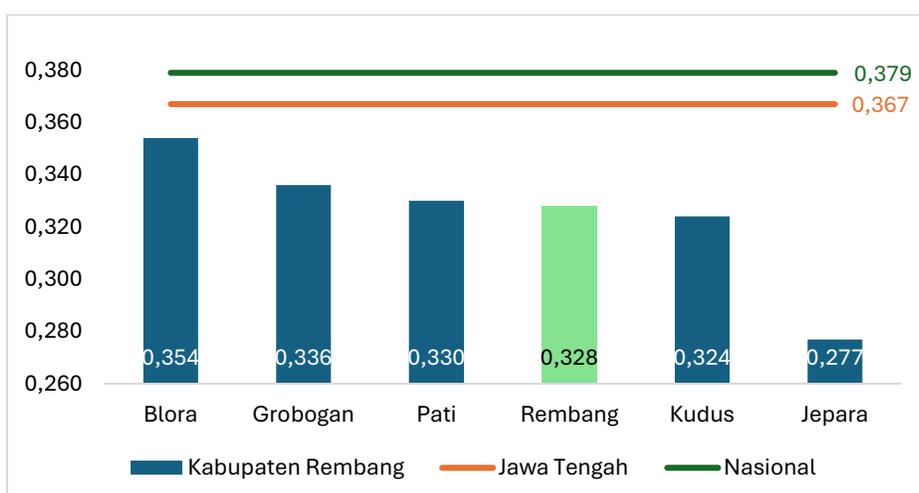
Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan di suatu daerah berdasarkan distribusi pendapatan. Nilai koefisien Gini berada di antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, apabila koefisien bernilai 1 maka daerah tersebut memiliki pendapatan yang tidak merata. Berikut gambaran indeks gini Kabupaten Rembang tahun 2020-2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 28 Indeks Gini Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks gini Kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 indeks Gini Kabupaten Rembang sebesar 0,340 dan tahun 2024 menjadi sebesar 0,328. Indeks Gini Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional lebih rendah yang masing-masing angkanya sebesar 0,367 dan 0,379.

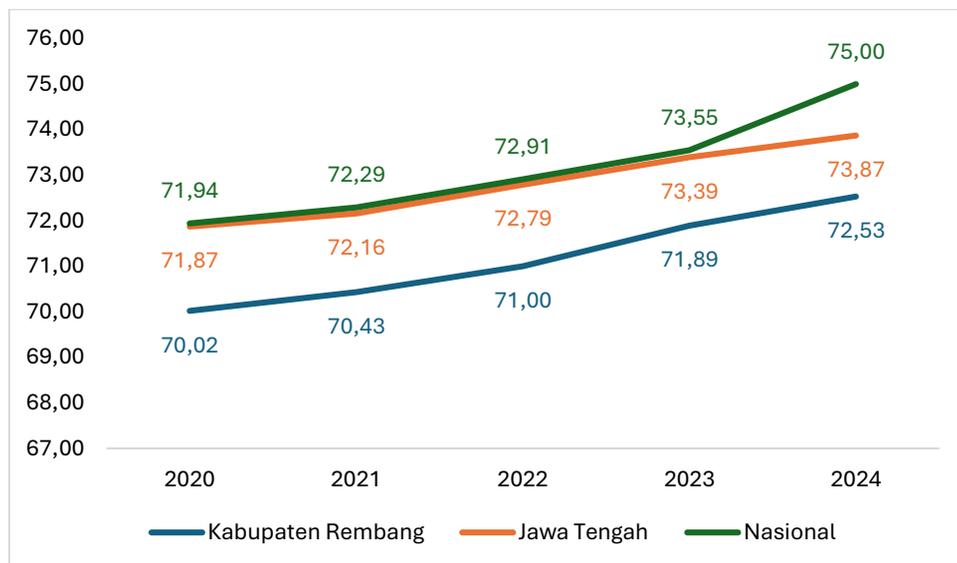


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 29 Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Posisi relatif Indeks Gini Kabupaten Rembang berada pada posisi ketiga terendah dari Kabupaten sekitarnya di atas Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

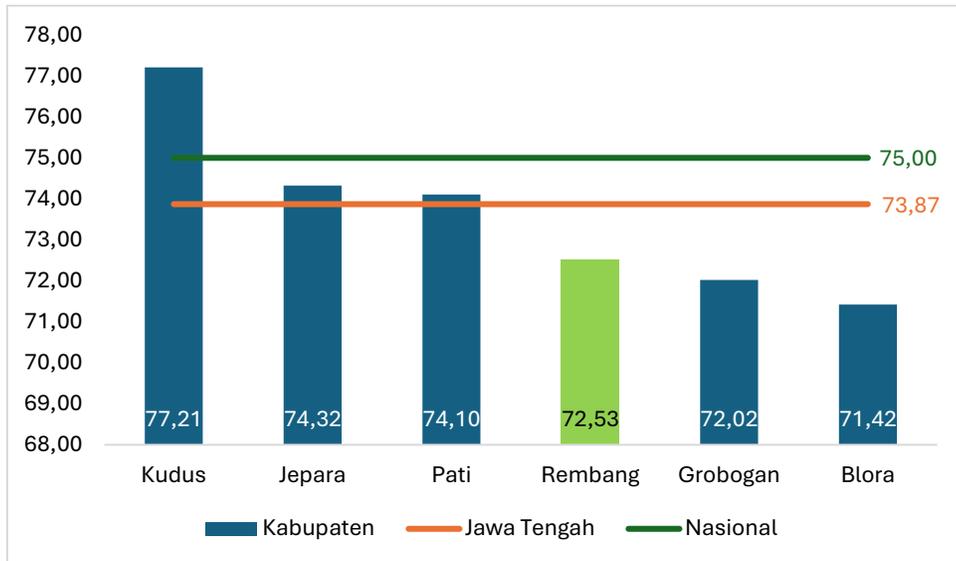
Indeks pembangunan manusia merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia yang terdiri dari empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. Berikut gambaran umum indeks pembangunan manusia Kabupaten Rembang pada tahun 2020-2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 indeks pembangunan manusia Kabupaten Rembang sebesar 70,02 % dan tahun 2024 menjadi sebesar 72,53 %. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional lebih rendah yang masing-masing angkanya sebesar 73,87 % dan 75,00 %.



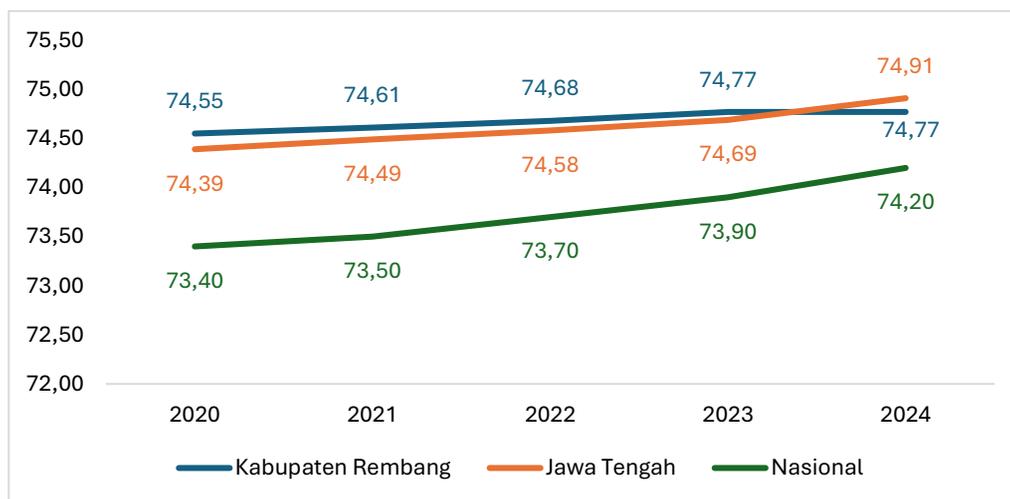
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 31 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Posisi relatif indeks pembangunan manusia Kabupaten Rembang pada tahun 2024 berada pada posisi ketiga di atas Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

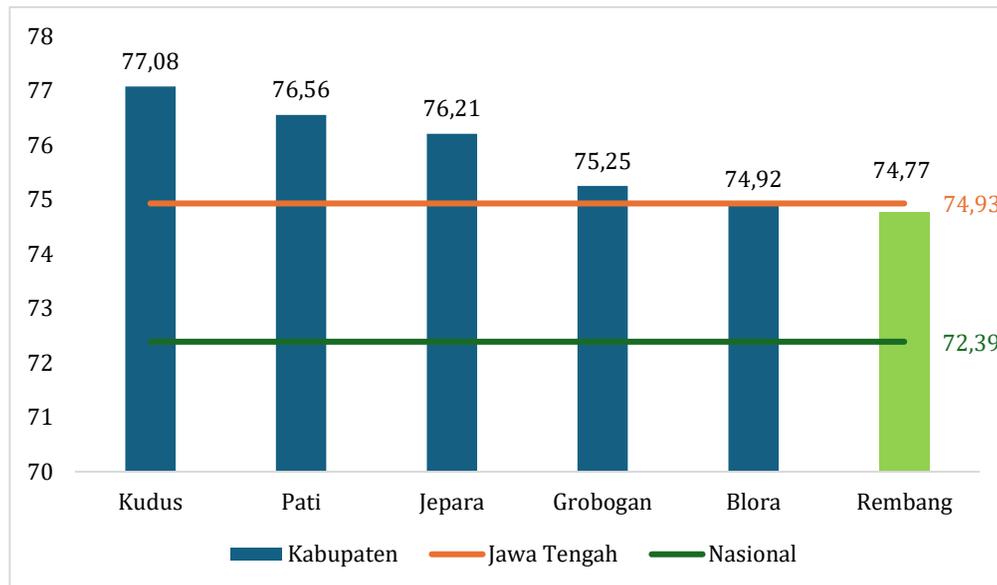
Usia harapan hidup merupakan indikator yang digunakan untuk kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 32 Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (tahun)

Usia harapan hidup Kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 usia harapan hidup Kabupaten Rembang sebesar 74,55 tahun dan tahun 2024 meningkat menjadi 74,77 tahun. Usia harapan hidup Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional pada tahun 2020 hingga tahun 2023 lebih tinggi, namun pada tahun 2024 berada di antara angka Provinsi dan Nasional yang masing-masing sebesar 74,91 tahun dan 74,20 tahun.



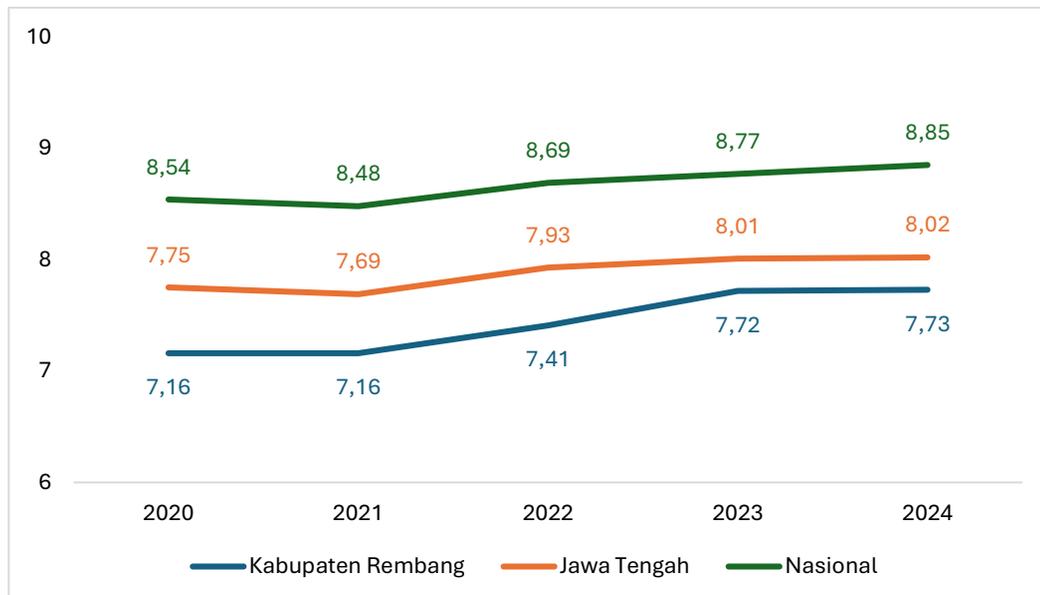
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 33 Posisi relatif Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (tahun)

Posisi relatif usia harapan hidup Kabupaten Rembang berada pada posisi terendah dari Kabupaten sekitarnya.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

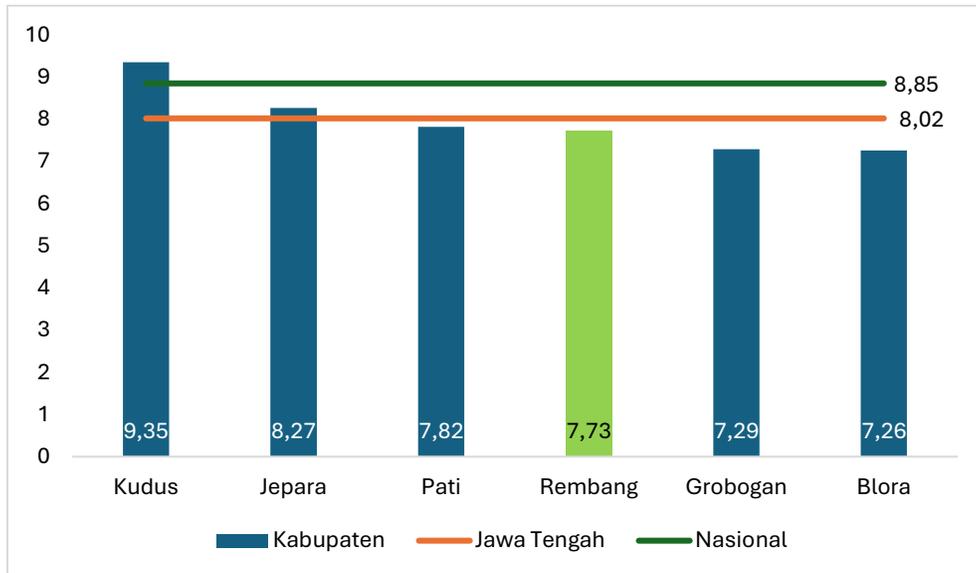
Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 34 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (tahun)

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah Kabupaten Rembang sebesar 7,16 tahun dan tahun 2024 menjadi sebesar 7,73 tahun. Jadi rata-rata penduduk Kabupaten Rembang menjalani proses pendidikan selama kurang lebih 7-8 tahun. Posisi relatif Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional lebih rendah dengan masing-masing angkanya sebesar 8,85 tahun dan 8,02 tahun. Posisi relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten sekitar berada pada nomor tiga terendah di atas kabupaten Blora dan Grobogan. Posisi relatif Rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 35 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2024 (tahun)

Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Perkembangan capaian indikator harapan lama sekolah selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 terlihat pada gambar berikut:



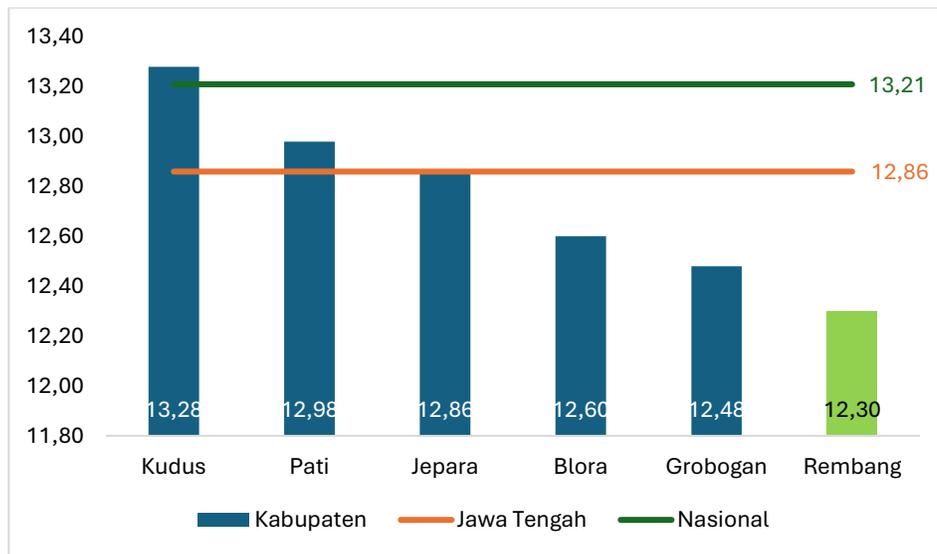
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 196 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (tahun)

Harapan lama sekolah kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah mencapai 12,11 tahun meningkat menjadi 12,30 tahun pada tahun 2024.

Sedangkan angka harapan lama sekolah provinsi sebesar 12,86 tahun dan 13,21 tahun lebih tinggi dari harapan lama sekolah Kabupaten Rembang.

Posisi relatif Rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

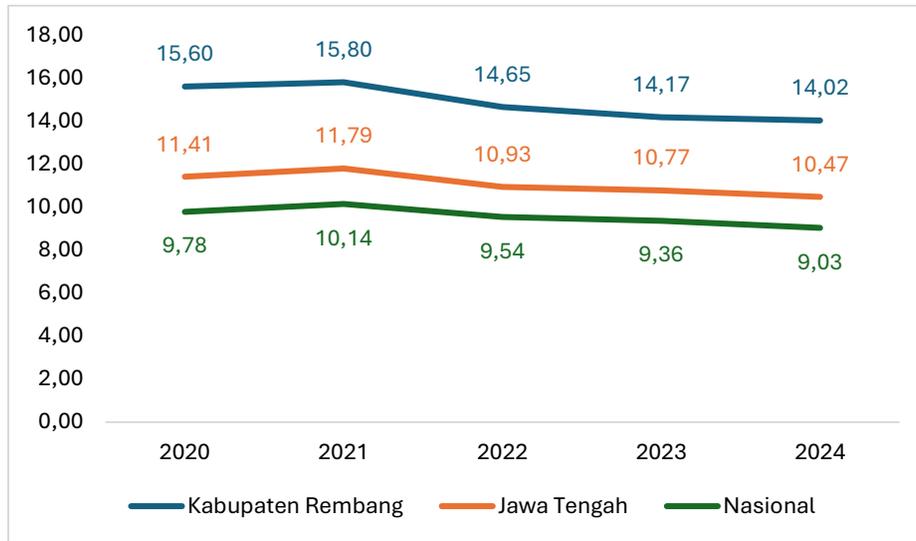


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 207 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (tahun)

Posisi relatif Harapan lama sekolah Kabupaten Rembang pada tahun 2024 berada pada posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah Kabupaten Rembang termasuk kategori rendah, permasalahan ini perlu digali dan diprioritaskan untuk diselesaikan di Kabupaten Rembang.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang pada tahun 2020 meningkat karena pandemi Covid-19 yang berdampak pada tatanan kehidupan sosial maupun sektor perekonomian. Namun seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian, tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang mulai menunjukkan tren menurun. Gambaran perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terlihat pada gambar berikut:

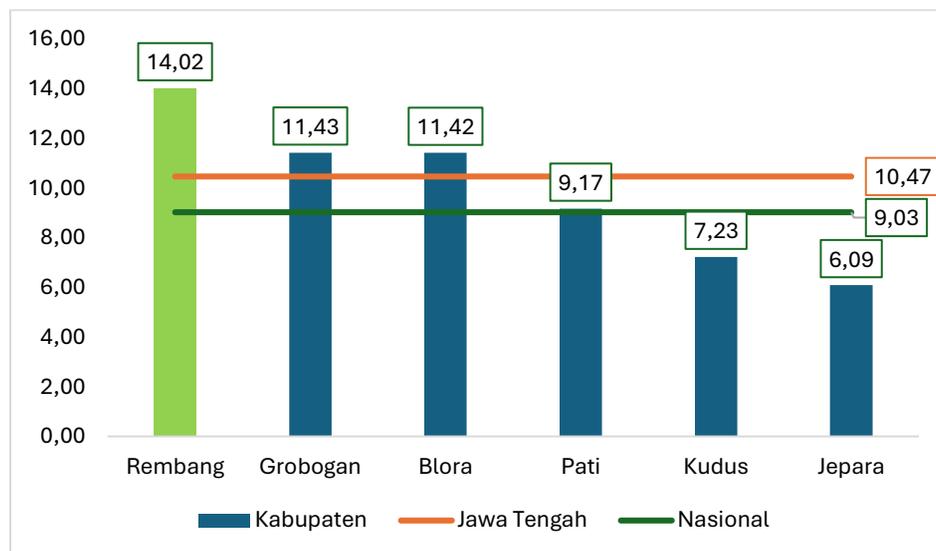


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 218 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan sebesar 15,60% menurun menjadi 14,02% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,47% dan Nasional sebesar 9,03% lebih rendah dari Kabupaten Rembang.

Gambaran posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 39 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Rembang pada tahun 2024 berada pada posisi tertinggi dari daerah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa

permasalahan kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi, sehingga perlu digali dan diprioritaskan.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penduduk yang memiliki keterbatasan utamanya kaum difabel. Selain itu perlindungan sosial juga diberikan kepada pekerja migran dan pekerja lokal. Indikator yang digunakan untuk mengukur perlindungan sosial adaptif adalah Cakupan Kesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Data indikator tersebut untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 belum tersedia.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

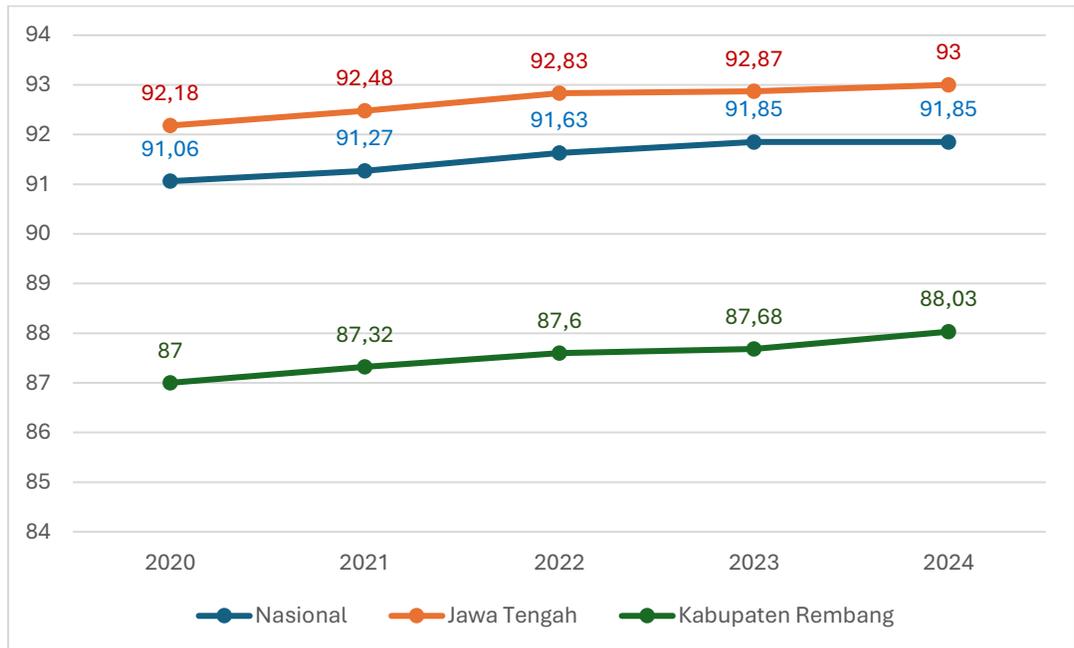
Kerukunan antar umat beragama dan karakter kebudayaan khas Kabupaten Rembang perlu terus dijaga oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Rembang. Selain itu kemaslahatan beragama juga perlu terus di kembangkan di kalangan masyarakat sehingga masyarakat semakin mendalami agama masing-masing dan kerukunan antar umat beragama semakin baik. Kemaslahatan beragama diukur melalui Indeks Kerukunan antar Umat Beragama. Capaian indikator Indeks Kerukunan antar Umat Beragama tahun 2020 – 2024 belum tersedia data.

Karakter budaya khas Kabupaten Rembang perlu terus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang, oleh karena itu karakter budaya yang maju mengikuti perkembangan jaman dan tidak meninggalkan karakter budaya khas Kabupaten Rembang. Indikator untuk mengukur pemajuan kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan. Capaian indikator Indeks pembangunan Kebudayaan tahun 2020 – 2024 belum tersedia data.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

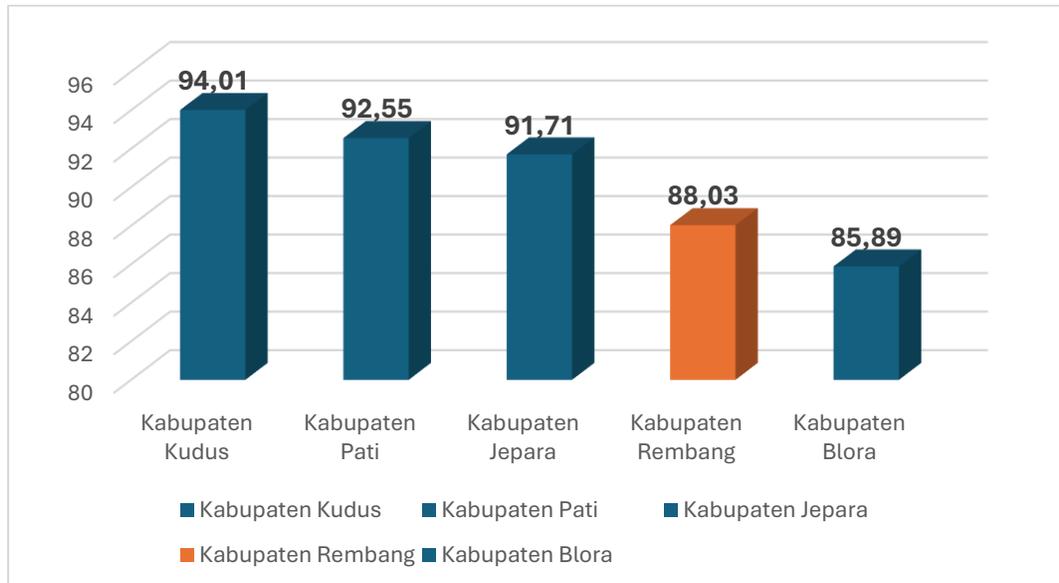
Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran pembangunan gender yang diukur melalui usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan, dan pengeluaran rata-rata laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan, yang dapat dimaknai bahwa pemerintah Kabupaten Rembang dalam pembangunan terus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Rembang sebesar 87 meningkat menjadi 88,03 pada tahun 2024. IPG Kabupaten Rembang masih di bawah IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perkembangan IPG Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 220 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

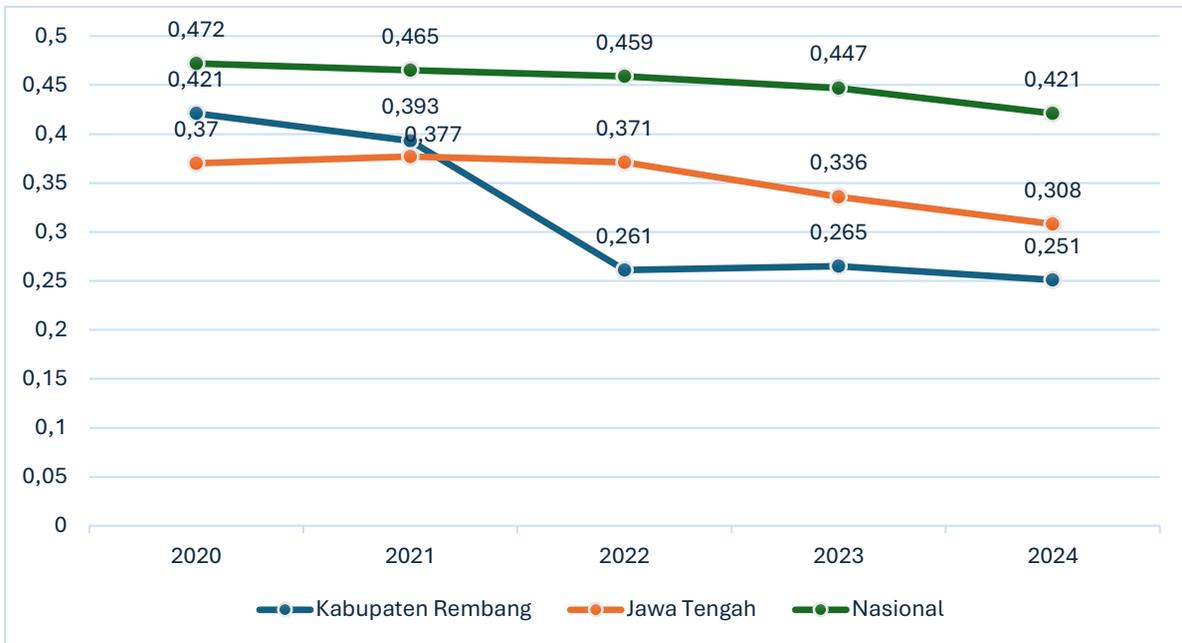
Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, posisi IPG kabupaten Rembang berada pada posisi kedua terakhir di atas Kabupaten Blora. Gambaran posisi relatif IPG Kabupaten Rembang dengan kabupaten sekitarnya terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 41 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitarnya tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rembang apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar berada pada posisi kedua terendah di atas Kabupaten Blora. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Rembang dengan melakukan upaya-upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.

Indeks ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ketimpangan gender Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan, yang dapat dimaknai bahwa isu gender dalam pembangunan terus diperhatikan. Gambaran perkembangan capaian indikator Indeks Ketimpangan Gender dapat dilihat pada gambar berikut:

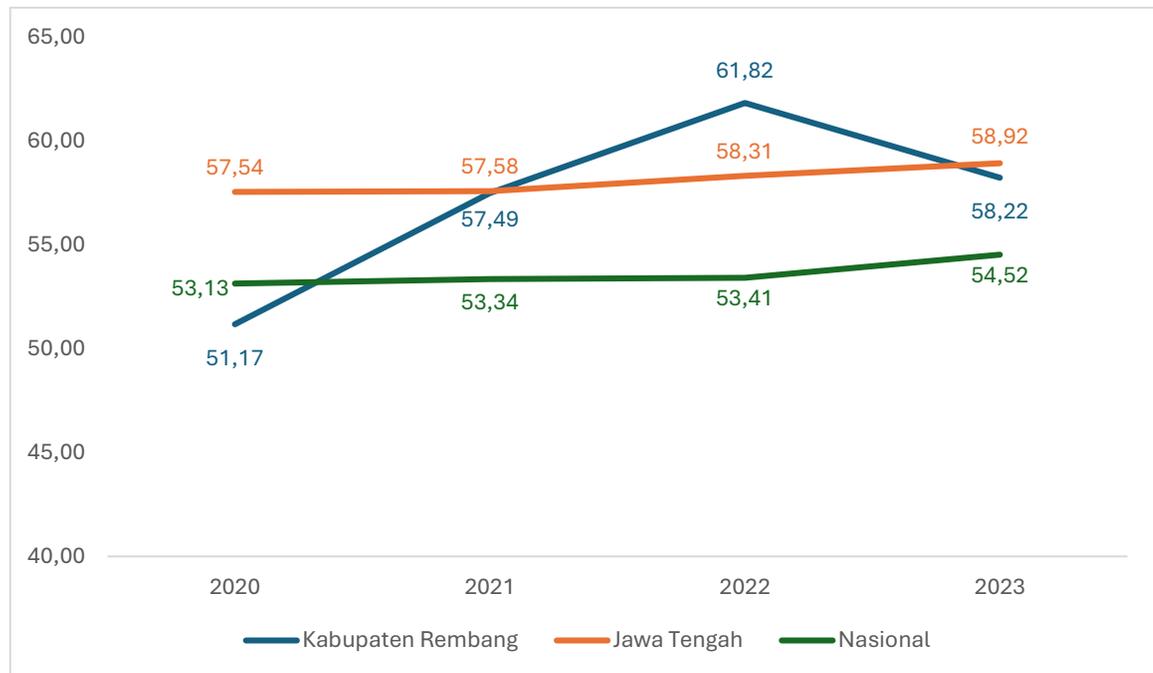


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 42 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks ketimpangan gender Kabupaten Rembang menunjukkan angka cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 indeks ketimpangan gender Kabupaten Rembang sebesar 0,421 menjadi 0,251 pada tahun 2024. Dibandingkan dengan IKG Jawa Tengah dan Nasional, IKG Kabupaten Rembang berada di bawah IKG Provinsi Jawa tengah dan Nasional.

Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk usia perempuan. Pada tahun 2020 hingga 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung meningkat meskipun pada tahun 2023 Kabupaten Rembang sempat mengalami penurunan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 sebesar 51,17% menjadi 58,22% pada tahun 2024. Perkembangan TPAK Perempuan dari tahun 2020 – 2023 dibandingkan dengan TPAK Perempuan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)

Data di atas menunjukkan bahwa TPAK Perempuan dari tahun 2023 berada di atas TPAK Perempuan Nasional dan di bawah TPAK Perempuan Provinsi Jawa Tengah.

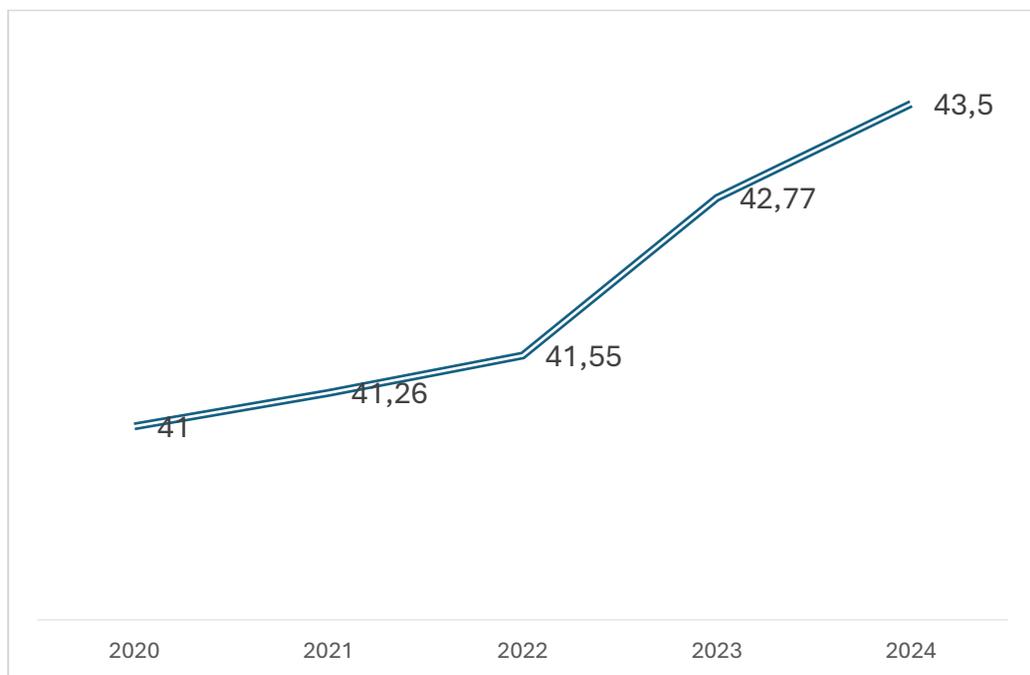
2.1.3. Aspek Daya Saing

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam menopang kehidupan kelompok tidak produktif. Dalam konteks daya saing sumber daya manusia (SDM), angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi tantangan karena dapat mengurangi alokasi sumber daya untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Sebaliknya, angka ketergantungan yang rendah membuka peluang bagi peningkatan produktivitas dan inovasi, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing SDM suatu daerah.

Daya saing SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Jika angka ketergantungan tinggi dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendorong investasi dalam pengembangan SDM, maka potensi ekonomi suatu daerah dapat terhambat. Daerah dengan angka ketergantungan yang tinggi harus memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki keterampilan yang cukup untuk menopang beban ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. Oleh karena itu, strategi seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan vokasi, serta kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja yang ada.

Tren angka ketergantungan di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2020-2024 justru cenderung meningkat. Angka ketergantungan paling besar ada di tahun 2024 sebesar 43,50%. Angka tersebut masih tergolong baik (masih dalam batas ideal) yaitu antara 30–50. Semakin rendah angka ketergantungan, berarti semakin baik, karena menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk tidak produktif. Gambaran perkembangan Angka Ketergantungan terlihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

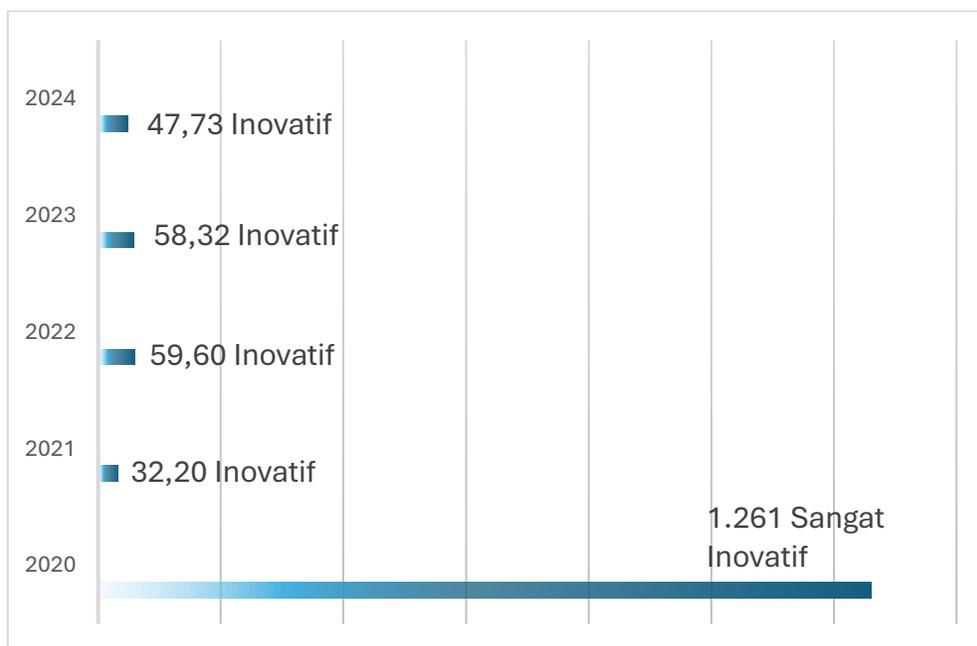
Gambar 2. 44 Angka Ketergantungan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (%)

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di daerah. Iptek memungkinkan efisiensi dalam berbagai sektor, seperti pertanian,

industri, dan jasa, dengan menghadirkan metode produksi yang lebih canggih dan hemat biaya. Di sektor industri, otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat mempercepat proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Melalui inovasi berbasis teknologi, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mempercepat pertumbuhan ekonominya.

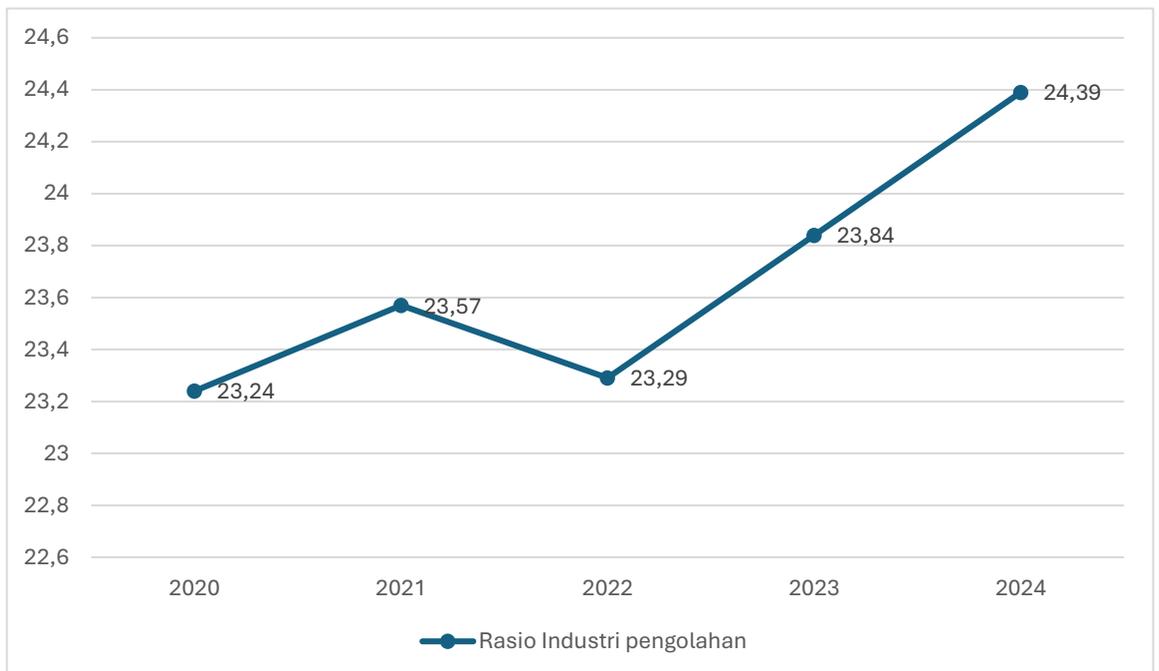
Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemingkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Penghitungan indeks inovasi daerah pada tahun 2020 dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 memiliki perbedaan dalam cara penghitungannya, namun kecenderungan capaiannya di Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari sangat inovatif menjadi inovatif. Hal ini sangat perlu untuk ditingkatkan pada tahun yang akan mendatang. Gambaran perkembangan capaian Indeks Inovasi Daerah terlihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 235 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2024

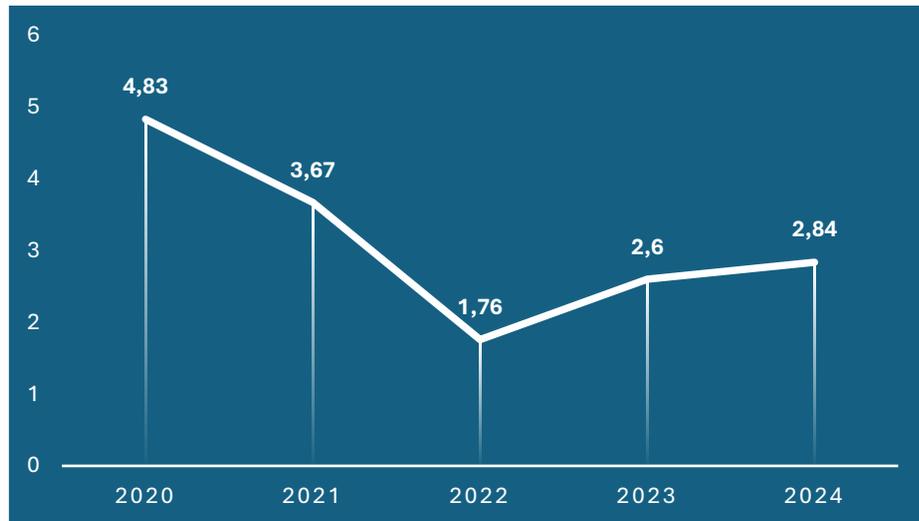
Adopsi Iptek tidak hanya mampu meningkatkan rasio PDRB sektor industri pengolahan, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri. Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Rembang tahun 2020-2024 mempunyai tren yang meningkat, angka capaian tertingginya sebesar 14,79% di tahun 2024. Rasio ini menggambarkan sejauh mana sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Rembang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran industri pengolahan dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Gambaran perkembangan Rasio Industri Pengolahan Kabupaten Rembang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 46 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. TPT Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2020-2024 fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. Angka TPT tertinggi

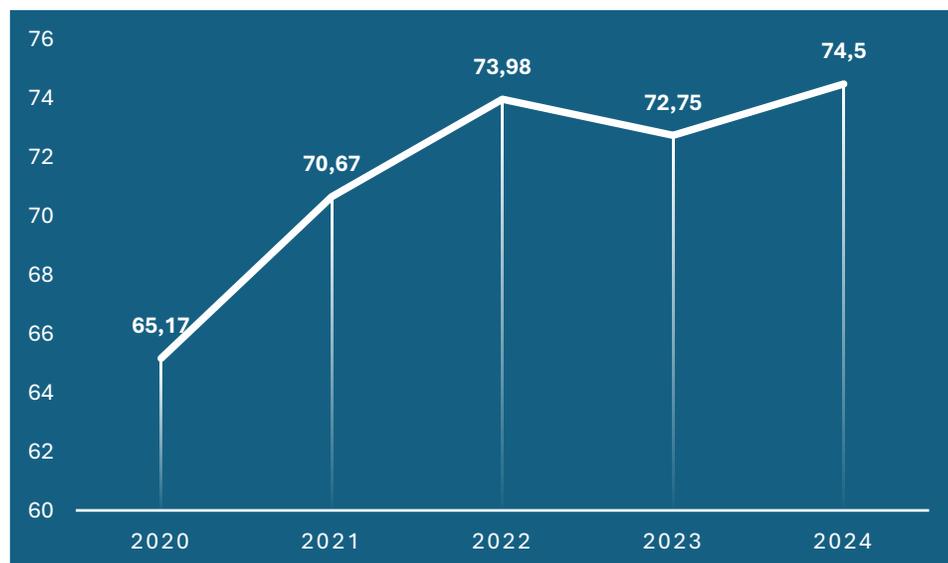
berada di tahun 2020 sebesar 4,83%, kemudian menurun hingga 2,84% di tahun 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 247 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (%)

Jika produktivitas ekonomi meningkat, biasanya diikuti dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan usaha, yang mendorong lebih banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK Kabupaten Rembang mengalami kenaikan selama tahun 2020-2024, di mana capaian tertingginya yaitu sebesar 74,50% (2024). Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 74 orang termasuk angkatan kerja, atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 740 orang di antaranya aktif secara ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

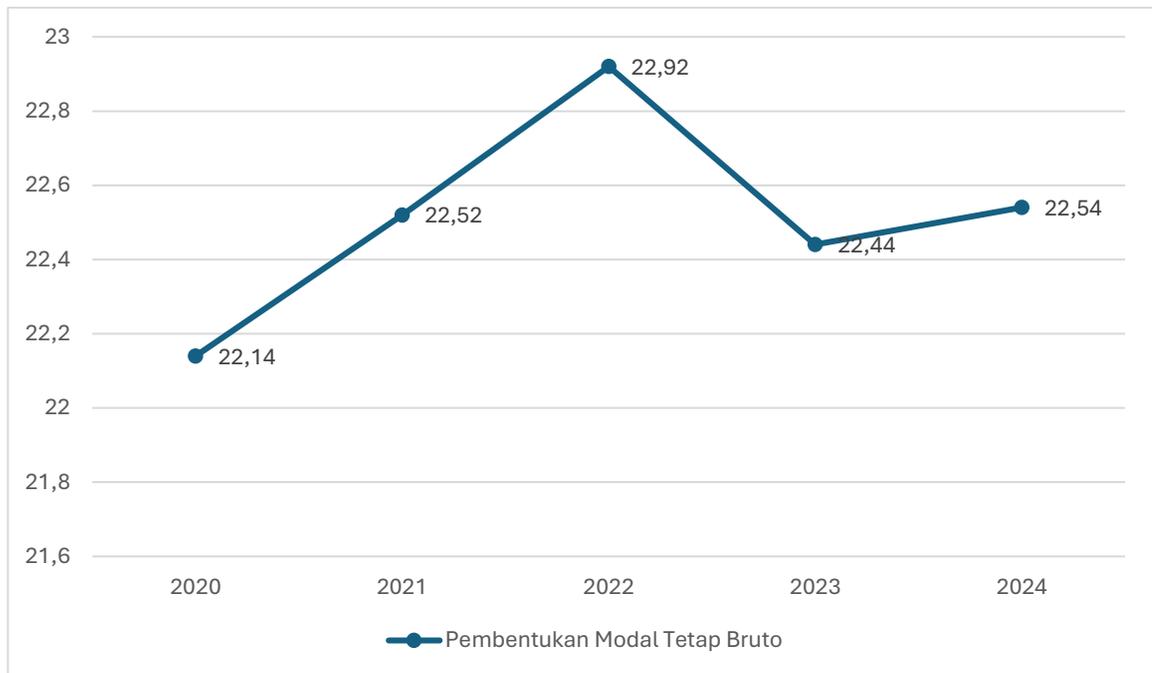
Gambar 2. 258 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (%)

Kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang ke depan harus seimbang antara meningkatkan produktivitas dan memastikan penciptaan lapangan kerja agar TPT turun dan TPAK naik secara bersamaan.

2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik Global

Integrasi ekonomi domestik dengan ekonomi global memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di daerah. Ketika suatu daerah semakin terhubung dengan pasar global, arus investasi asing langsung (FDI) cenderung meningkat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan infrastruktur, industri, dan sektor produktif lainnya. Keterbukaan ekonomi memungkinkan daerah untuk mengakses teknologi, modal, dan tenaga kerja terampil dari luar, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Selain itu, perdagangan internasional yang lebih aktif menciptakan peluang bagi sektor bisnis lokal untuk berkembang, mendorong investasi dalam aset tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan, yang menjadi bagian utama dalam PMTB.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator ekonomi yang mencerminkan investasi dalam aset tetap yang digunakan untuk produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Aset tetap ini mencakup bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, kendaraan, serta investasi dalam perbaikan dan peningkatan kapasitas produksi. PMTB merupakan komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan tingkat investasi suatu negara atau daerah dalam membangun dan meningkatkan kapasitas ekonominya. Peningkatan PMTB menandakan bahwa suatu daerah atau negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk pengembangan kapasitas produksi. Sebaliknya, rendahnya PMTB dapat mengindikasikan kurangnya investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. PMTB di Kabupaten Rembang selama tahun 2020-2024 fluktuatif cenderung mengalami meningkat. PMTB Kabupaten Rembang tahun 2024 sebesar 22,54%. Gambaran perkembangan PMTB Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:



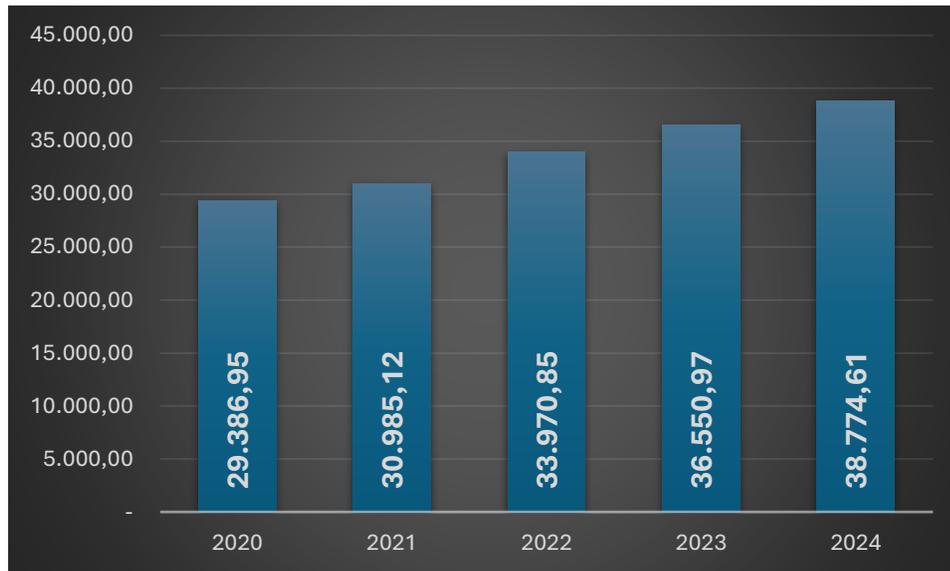
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. 269 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Peningkatan PMTB di suatu daerah menunjukkan adanya investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing ekonomi lokal. Hal ini secara langsung mendorong pertumbuhan PDRB daerah tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan PDB nasional. PDRB mencerminkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, sedangkan PDRB per kapita menggambarkan rata-rata nilai ekonomi yang dihasilkan per individu di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan PDRB per kapita, yang mencerminkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di suatu daerah. PDRB per kapita Kabupaten Rembang dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 38.774,61,00. PDRB per kapita dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat investasi (PMTB), produktivitas tenaga kerja, infrastruktur, serta sektor-sektor ekonomi yang dominan di daerah tersebut. Daerah dengan industri maju dan investasi tinggi cenderung memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan daerah yang bergantung pada sektor tradisional atau yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan PDRB per kapita menjadi salah satu tujuan

utama dalam kebijakan pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 50 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (ribu Rp)

2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

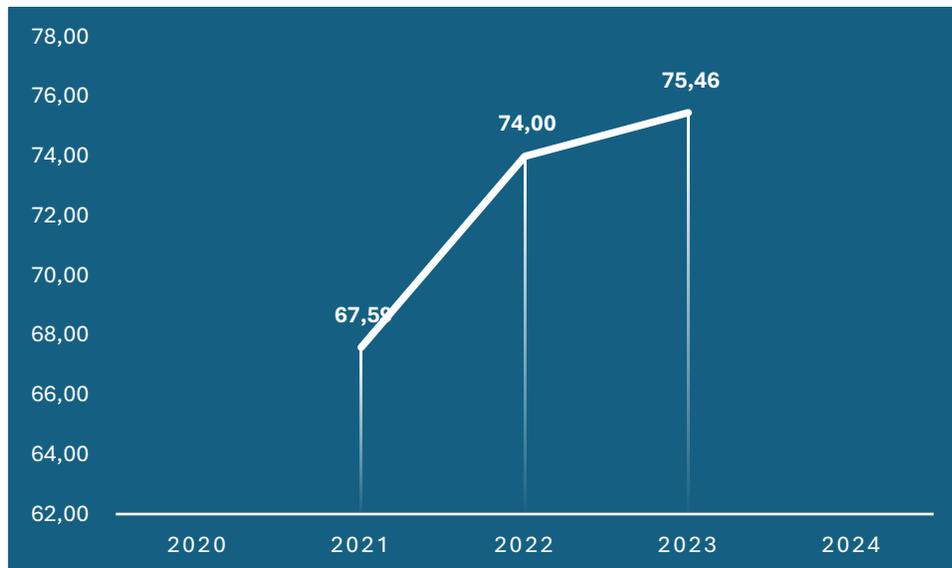
Perkotaan sering kali menjadi pusat ekonomi dengan infrastruktur yang lebih maju, menciptakan peluang kerja dan layanan publik yang lebih baik dibandingkan perdesaan. Namun, pesatnya urbanisasi sering menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan hunian layak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Permintaan yang tinggi terhadap perumahan di kota-kota besar mendorong kenaikan harga properti dan penyebaran kawasan permukiman informal, yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya. Sebaliknya, di perdesaan, meskipun tekanan terhadap harga lahan lebih rendah, akses terhadap infrastruktur perumahan dan layanan dasar sering kali masih terbatas, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi antara perkotaan dan perdesaan sangat penting untuk menciptakan pemerataan akses terhadap hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Peningkatan konektivitas antara kedua wilayah melalui infrastruktur transportasi dan digital dapat mempercepat distribusi sumber daya, membuka peluang ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan hunian antara perkotaan dan perdesaan. Hubungan yang seimbang antara perkotaan dan perdesaan tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi

tetapi juga memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki tempat tinggal yang layak dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Rumah tangga dengan akses hunian layak merujuk pada keluarga atau individu yang tinggal di rumah dengan kondisi yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan akses terhadap fasilitas dasar. Hunian layak mencakup aspek fisik seperti struktur bangunan yang kokoh, ventilasi yang baik, serta ukuran rumah yang memadai sesuai jumlah penghuni. Selain itu, hunian layak harus memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, listrik, serta fasilitas lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Keberadaan infrastruktur sosial seperti sekolah, pusat kesehatan, transportasi, dan ruang terbuka hijau juga menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan suatu hunian.

Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Rembang selama tahun 2021-2023 mengalami peningkatan, tahun 2023 sebesar 75,46%. Hal ini tentu perlu untuk terus ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah dapat mendorong pembangunan perumahan terjangkau melalui kebijakan subsidi, kredit perumahan berbunga rendah, serta regulasi tata ruang yang mendukung pemanfaatan lahan secara efisien. Sektor swasta juga dapat berperan dalam menyediakan hunian dengan harga terjangkau melalui kemitraan publik-swasta. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk edukasi tentang kepemilikan rumah, renovasi mandiri, serta program gotong royong dalam pembangunan hunian juga dapat meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. 51 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Rembang Tahun 2021-2023 (%)

2.1.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro

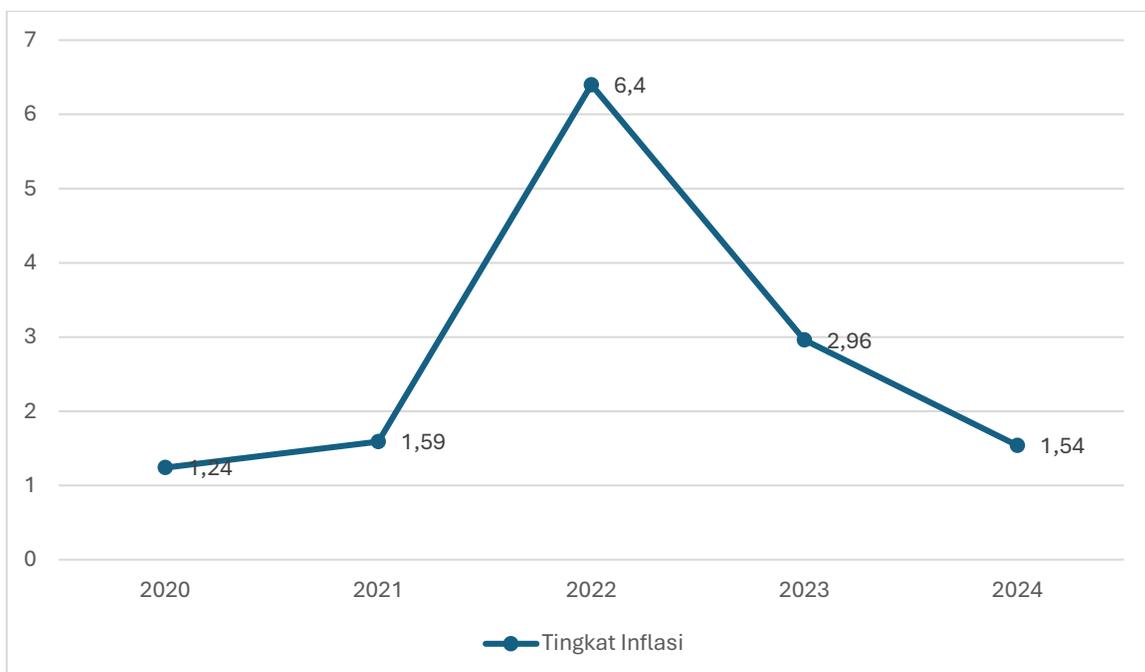
Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan fiskal, serta pengendalian inflasi yang baik. Salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah, yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Pajak daerah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat tetapi juga menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi makro secara keseluruhan.

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, semakin besar kontribusi pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 0,47%.

Tingkat inflasi juga berperan penting dalam hubungan antara stabilitas ekonomi makro dan rasio pajak daerah terhadap PDRB. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan memastikan

stabilitas harga barang serta jasa, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli dan meningkatkan biaya produksi bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mengurangi penerimaan pajak daerah akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang tahun 2024 sebesar 1,54%, membaik dari tahun sebelumnya (2022) dengan tingkat inflasi mencapai 6,4%.

Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan kebijakan moneter dan fiskal nasional untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga keseimbangan antara penetapan tarif pajak dan insentif ekonomi, serta memastikan distribusi barang dan jasa tetap lancar. Dengan pendekatan yang terintegrasi, stabilitas ekonomi makro dapat terjaga, rasio pajak daerah terhadap PDRB dapat dioptimalkan, dan inflasi dapat dikendalikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang tahun 2020 – 2024 terlihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. 52 Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (%)

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

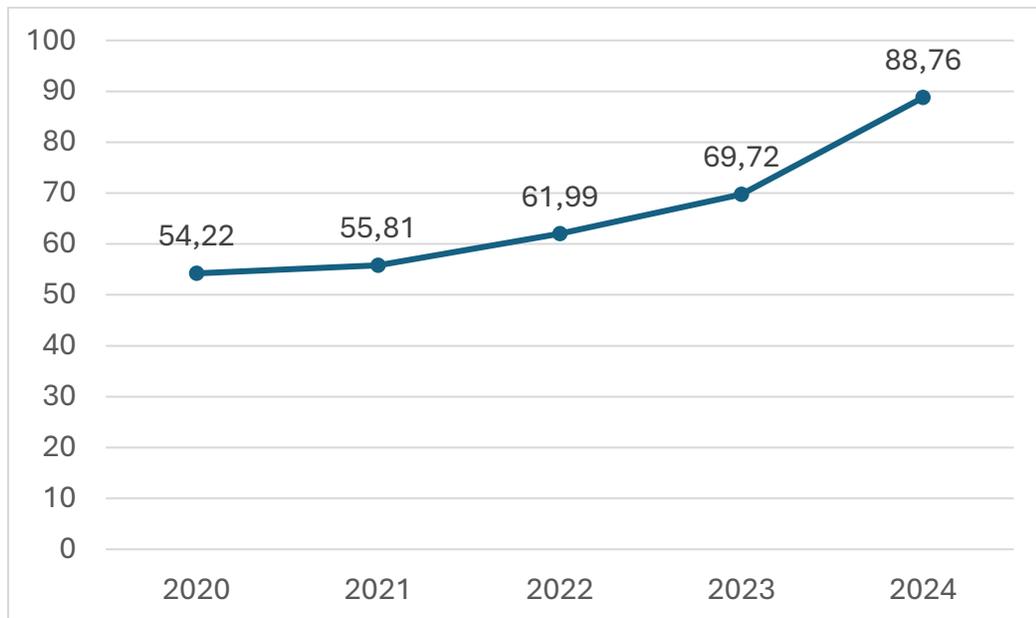
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif memiliki peran krusial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah guna memastikan transparansi,

akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Regulasi yang jelas dan tegas mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menghambat pembangunan daerah. Selain itu, regulasi yang baik juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang berintegritas, pemerintahan daerah dapat membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kepentingan bersama.

Selain integritas, pemerintahan daerah juga harus memiliki regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Regulasi yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons perubahan dengan cepat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Melalui regulasi yang adaptif, pemerintahan daerah tidak hanya dapat mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

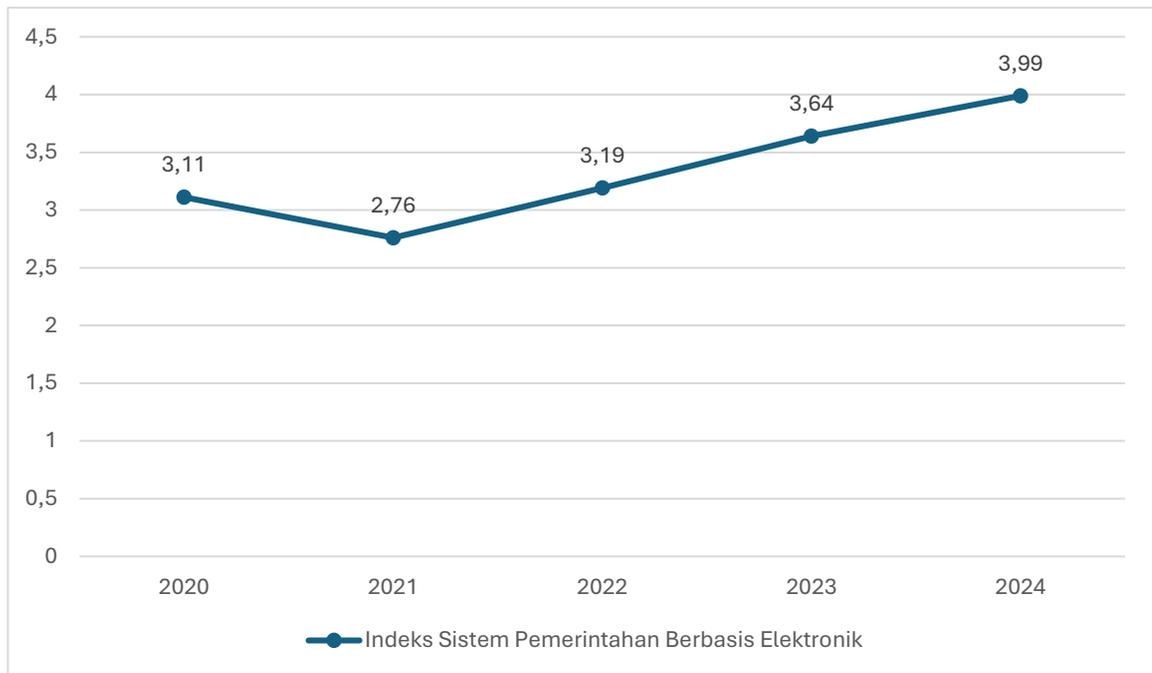
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti: Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Reformasi Hukum. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rembang tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 88,76 pada tahun 2024. Hal ini, terjadi karena meningkatnya kualitas pemenuhan Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi General sebagaimana termuat dalam Portal RB. Portal RB sendiri merupakan laman dari Kementerian PAN-RB untuk menyajikan data Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi General secara berkala (per tahun), untuk selanjutnya dievaluasi dan dinilai oleh Kementerian PAN-RB. Gambaran perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rembang tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 273 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

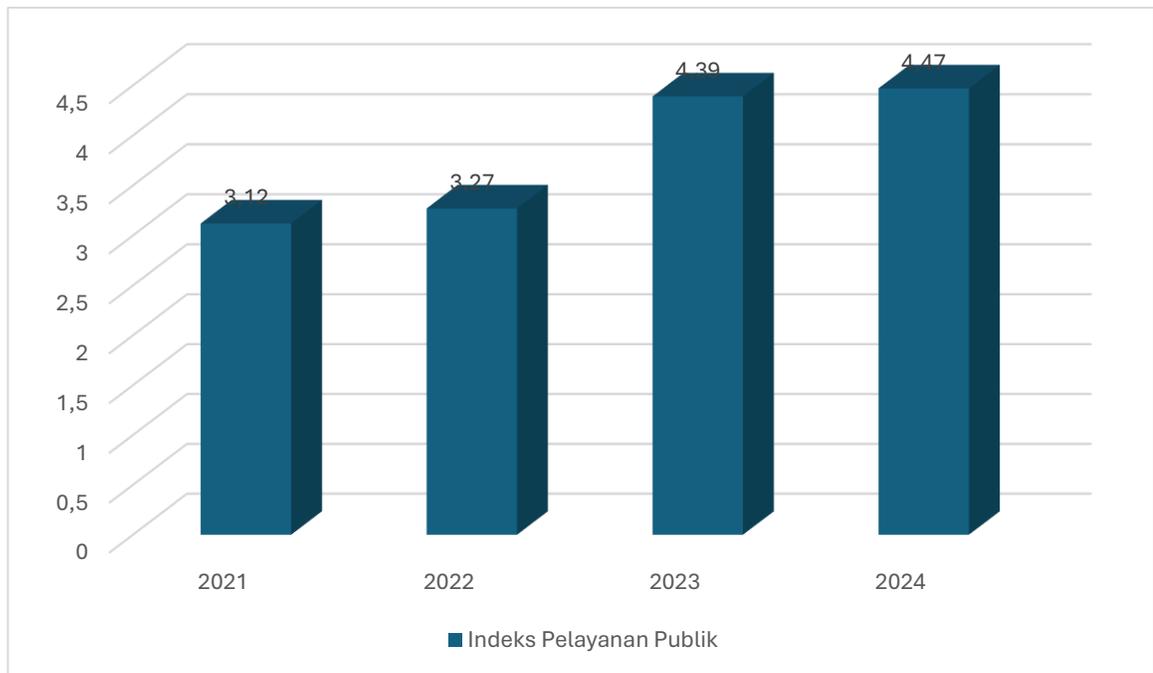
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi e-government di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan publik. Penilaian Indeks SPBE mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan tata kelola, infrastruktur digital, pelayanan berbasis elektronik, serta keterpaduan sistem dan data. Dengan adanya Indeks SPBE, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas penerapan digitalisasi birokrasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan guna mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Capaian Indeks SPBE di Kabupaten Rembang tahun 2024 sebesar 3,99, lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,64. Perkembangan capaian Indeks SPBE dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : LPPD tahun 2020 - 2024

Gambar 2. 54 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

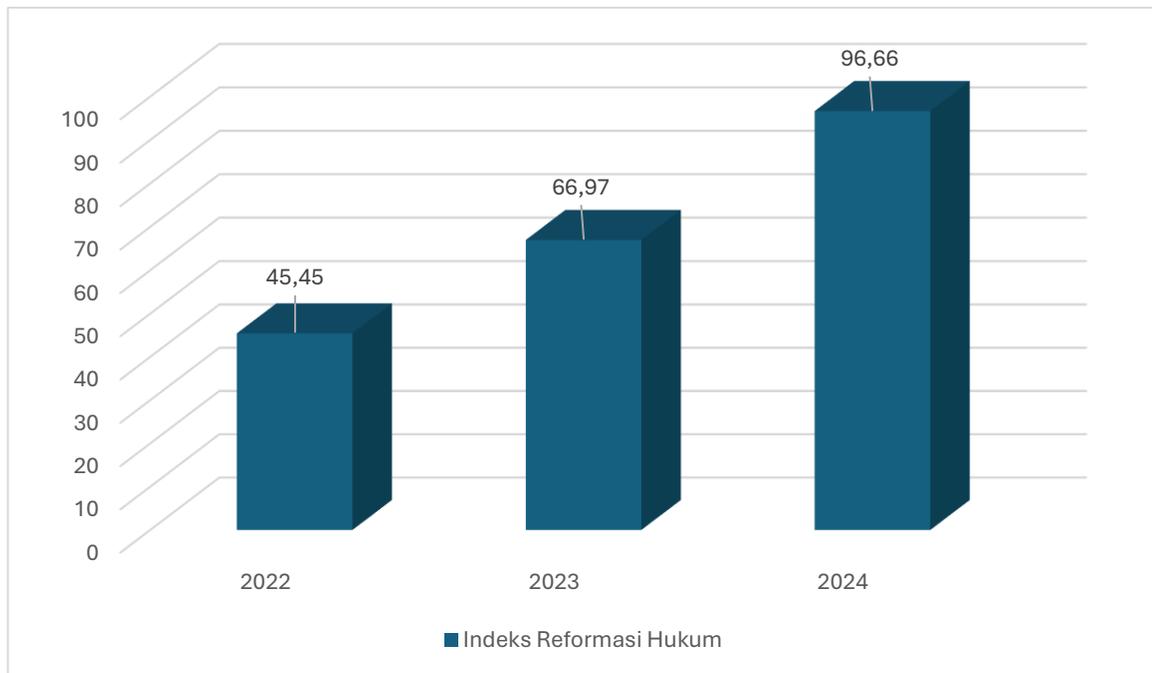
Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Nilai IPP Kabupaten Rembang setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2021 nilai IPP Kabupaten Rembang sebesar 3,12 dan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 4,47. Nilai ini perlu ditingkatkan pada tahun mendatang. Perkembangan capaian Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : LPPD tahun 2021 - 2024

Gambar 2. 55 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Indeks reformasi hukum bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola regulasi hukum yang baik. Kabupaten Rembang pada tahun 2022 memiliki nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 45,45 dan di tahun 2023 naik menjadi 66,97. Reformasi hukum yang berjalan efektif akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Perkembangan capaian Indeks Reformasi Hukum dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : LPPD tahun 2022 - 2024

Gambar 2. 56 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Rembang Tahun 2022-2024

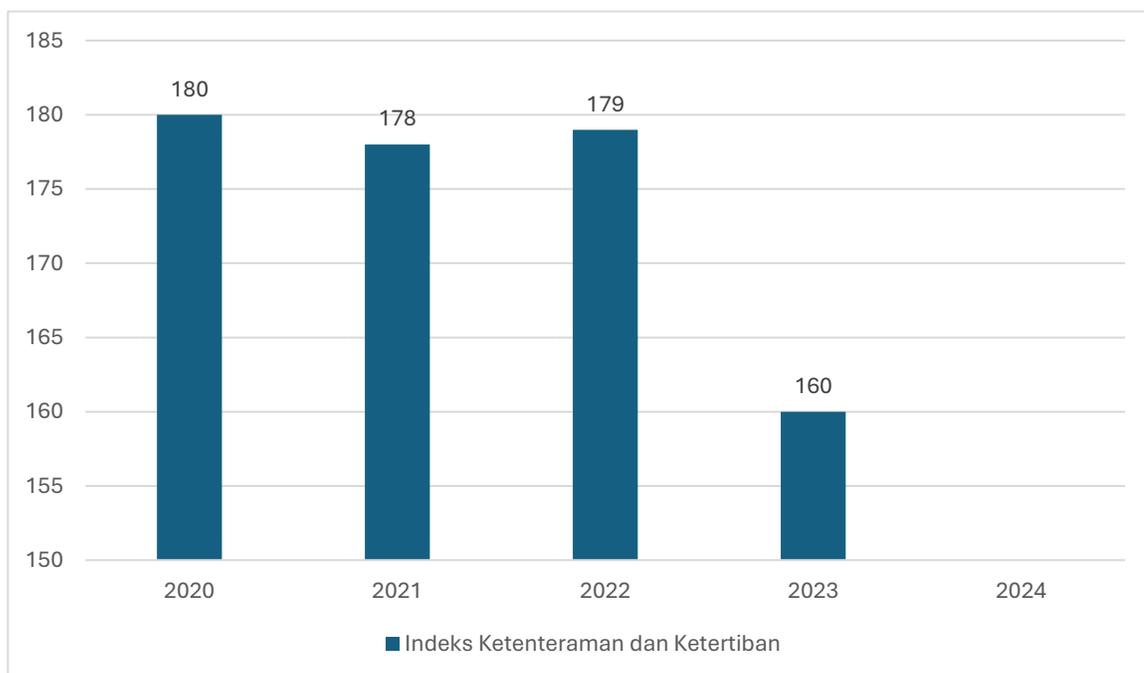
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan tiga pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hukum berkeadilan memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang diterapkan pemerintah berpihak pada kepentingan bersama, tanpa diskriminasi dan kepentingan kelompok tertentu. Dengan adanya hukum yang adil dan transparan, hak serta kewajiban warga negara dapat dilindungi secara setara, sehingga mencegah terjadinya konflik sosial dan ketimpangan dalam masyarakat. Sementara itu, keamanan nasional yang tangguh berperan dalam menjaga stabilitas negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Keamanan yang stabil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan dalam menjalankan program pembangunan, investasi, dan pelayanan publik tanpa gangguan yang menghambat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, demokrasi substansial memastikan bahwa pemerintahan tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Demokrasi yang substansial mendorong partisipasi

aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keterkaitan antara hukum berkeadilan, keamanan nasional, dan demokrasi yang kuat akan menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan legitimasi yang tinggi di mata rakyat. Ketiga aspek ini saling memperkuat, di mana hukum yang adil menjaga kebebasan dan hak warga negara dalam demokrasi, sementara keamanan nasional yang tangguh menjadi fondasi bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Dengan keseimbangan antara ketiga elemen ini, pemerintahan dapat berjalan secara efektif, harmonis, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global maupun domestik.

Capaian Indeks ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Rembang tahun 2020-2023 mengalami tren yang fluktuatif, capaian tertinggi sebesar 180 ada di tahun 2020, namun menurun menjadi sebesar 160 di tahun 2023. Perkembangan capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : LPPD 2020 - 2024

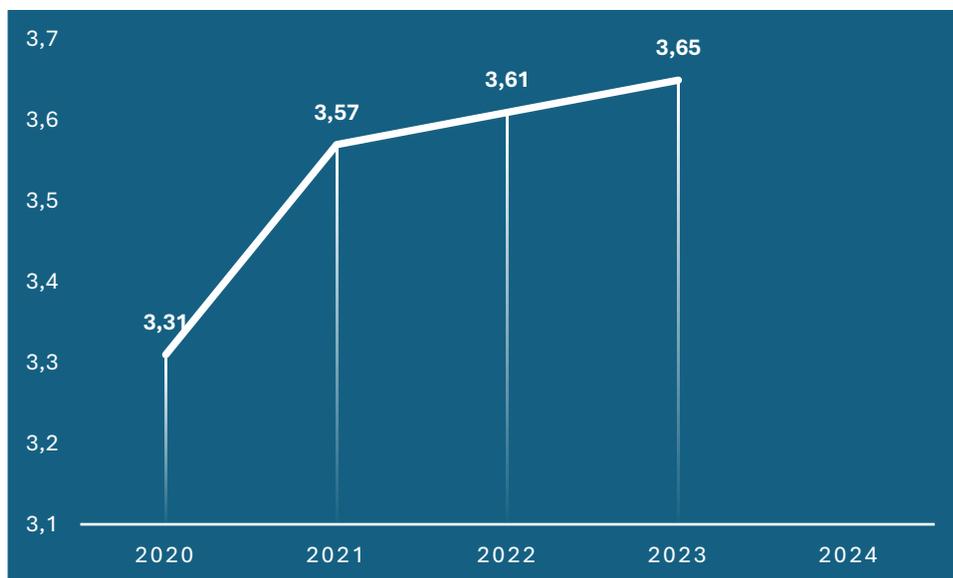
Gambar 2. 57 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Kerangka pengukuran IDSD 2022

mengacu pada *global competitiveness index* (GCI) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Tujuan pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Rembang selama tahun 2020-2023 cenderung mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Peningkatan IDSD sangat penting bagi pemerintahan daerah karena mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : LPPD tahun 2020 – 2023

Gambar 2. 288 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2023

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK *Outcome*) Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome)
Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
1	PENDIDIKAN							
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	95,76	95,50	100,00	96,64	LPPD Kab. Rembang
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,24	99,94	99,95	100,00	100,11	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	72,13	91,34	95,28	100,00	110,97	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,64	53,18	100,00	100,00	72,96	
2	KESEHATAN							
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,0083	0,081	0,12	1,43	1,38	LPPD Kab. Rembang
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	95,24	100,00	100	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95,55	100,00	100,00	100,00	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,87	100,00	100,00	100,00	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,46	100,00	100,00	100,00	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	98,04	98,86	100,00	100,00	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	44,67	60,16	100,00	100,00	98,73	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	70,38	92,82	98,43	100,00	100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,98	98,54	100,00	100,00	99,28	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	37,20	62,90	87,57	100,00	100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,44	98,42	103,47	100,00	100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	97,06	90,40	100,99	100,00	100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	35,41	29,55	84,12	100,00	100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	102,81	130,34	100,00	100	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	26,30	-	100,00	45,92	LPPD Kab. Rembang
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	7,95	-	100,00	5,35	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	78,00	81,40	16,00	38,47	34,75	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	65,80	90,34	91,41	92,71	92,84	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	100,00	92,42	92,51	92,71	
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	-	100,00	14,22	100,00	100	
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	71,84	81,08	-	71,33	71,17	
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis	%	-	5,56	22,22	100,00	3,95	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	yang memiliki sertifikat kompetensi							
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	-	100,00	100,00	100	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	100,00	-	100,00	100	LPPD Kab. Rembang
	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	-	100,00	-	100,00	NIHIL	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	-	18,29	-	24,37	75,271	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	66,10	28,37	-	25,05	24,33	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	96,00	-	97,26	1,06	
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100	LPPD Kab. Rembang
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	60,00	81,00	80,81	100,00	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	57,00	60,00	81,48	100,00	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	60,00	93,96	100,00	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	57,00	57,00	100,00	100,00	43,50	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	58,00	57,00	48,00	10,41	18,14	
6	SOSIAL							

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	-	63,67	71,89	100,00	100	LPPD Kab. Rembang
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	-	100,00	100,00	100,00	100	
7	TENAGA KERJA							
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%		-	100,00	80,00	55,55	LPPD Kab. Rembang
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%		20,691	0,20	0,50	0,57	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%		0,0186	5.249,85	4.067.589.073,17	0	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	9,59	59,18	-	77,43	71,42	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	55,57	54,48	61,07	65,16	83,53	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	41,42	16,55	14,68	54,58	47,72	LPPD Kab. Rembang
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,000083	0,0075	0,01	0,01	100	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,000024	0,0028	2,18	1,22	1,50	
9	PANGAN							
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	141,00	141,00	163,46	76,55	130,16	LPPD Kab. Rembang
10	PERTANAHAN							
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi	%	-	-	-	100,00	95,54	LPPD Kab. Rembang

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan							
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	-	100,00	0	
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	-	-	-	100,00	100	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-	-	-	0	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	96,82	38,24	
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	-	100,00	0	
11	LINGKUNGAN HIDUP							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	68,10	67,67	65,90	65,52	66,96	LPPD Kab. Rembang
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	82,86	14,83	15,14	17,28	38,58	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	-	-	-	-	92,31	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	Perekaman KTP elektronik	%	98,72	97,76	98,97	99,48	99,63	LPPD Kab. Rembang
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	8,60	32,56	33,96	50,55	57,72	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,66	96,47	97,53	97,82	92,54	
	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	95,45	11,18	7,41	27,27	15	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	50,00	-	100,00	100,00	100	LPPD Kab. Rembang
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	75,00	4,87	3,45	36,84	50	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	TFR (Angka Kelahiran Total)	jumlah anak per wanita	2,10	2,10	2,10	2,04	2	LPPD Kab. Rembang

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,89	77,51	78,99	80,65	74,04	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,82	10,43	8,50	8,39	5,46	
15	PERHUBUNGAN							
	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	1,00	0,402	50,00	0,25	0,5	LPPD Kab. Rembang
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,22	0,28	0,39	0,33	0,285	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	LPPD Kab. Rembang
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	53,80	58,30	58,33	81,25	86,67	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	48,00	48,00	49,04	78,88	96,89	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,67	44,19	51,89	48,48	46,19	LPPD Kab. Rembang
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wira usaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
18	PENANAMAN MODAL							
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	13,01	24,40	16,32	8,69	8,72	LPPD Kab. Rembang
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3,00	3,47	3,69	61,86	46,78	LPPD Kab. Rembang
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	23,10	12,08	12,96	0,22	10,92	
	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	-	6,00	-	-	5	
20	STATISTIK							
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	LPPD Kab. Rembang

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
21	PERSANDIAN							
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100,00	44,80	0,64	44,96	45,27	LPPD Kab. Rembang
22	KEBUDAYAAN							
	Terlestariannya Cagar Budaya	%	33,58	55,97	81,38	81,21	80,92	LPPD Kab. Rembang
23	PERPUSTAKAAN							
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		81,62	40,22	61,00	61,77	75,35	LPPD Kab. Rembang
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	-	0,26	58,74	62,37	
24	KEARSIPAN							
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	32,77	2,42	3,73	28,96	20,23	LPPD Kab. Rembang
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	1.147 (berkas)	942 (berkas)	3,60	139,50	30,4	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	-	104.664.638 (kg)	90,87	100,00	95,88	LPPD Kab. Rembang
26	PARIWISATA							
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-55,48	45,45	100,00	116,67	-26,92	LPPD Kab. Rembang
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-86,84	10,72	75,54	20,20	22,83	
	Tingkat hunian akomodasi	%	19,00	32,85	29,50	21,59	26,89	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,99	3,10	-	3,45	3,63	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,38	1,19	2,17	2,13	2,27	
27	PERTANIAN							

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	kw/ha		55,23 (padi); 57,23 (jagung) 18,95 (kedelai)	5.860,55	568,13	713,90	LPPD Kab. Rembang
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan; Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%		-43,00	379,37	(59,06)	-68,09	
28	KEHUTANAN							
								LPPD Kab. Rembang
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota			-	-	-	-	LPPD Kab. Rembang
30	PERDAGANGAN							
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	2,91	100,00	100,00	100,00	2,96	LPPD Kab. Rembang
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,31	46,56	89,03	86,43	75,97	
	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	86,49	82,88	87,39	87,39	76,96	
31	PERINDUSTRIAN							
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,05	3,23	2.388,11	0,51	11,45	LPPD Kab. Rembang
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	-	-	-	20,00	0	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	-	100,00	8,89	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	-	100,00	100	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	0	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	-	25,00	11,00	80,00	100	
32	TRANSMIGRASI							
								LPPD Kab. Rembang
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN							
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	9,55	29,29	9,10	7,15	15,68	LPPD Kab. Rembang
	Rasio PAD	%	17,39	21,40	19,17	18,05	19,34	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 3	Nilai 3	3,00	3,00	3,01	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 2	Level 2	2,00	3,00	3	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	72,73	73,82	55,86	31,68	65,05	
	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	1,00	5,00	6	
34	PENGADAAN							
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	-	-	-	-	0	LPPD Kab. Rembang
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	348,36	75,12	93,77	63,84	100	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	94,90	49,41	45,66	77,78	19,07	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-	-	1.351,33	19,68	-6,37	
35	KEPEGAWAIAN							
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,02	132,00	423,77	51,00	59,78	LPPD Kab. Rembang

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,11	7,00	10,87	15,51	22,22	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,30	81,00	-	63,36	41,29	
36	MANAJEMEN KEUANGAN							
	<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	96,41	94,49	-12,58	5,33	8,23	LPPD Kab. Rembang
	<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	111,81	130,18	-5,55	9,34	1,75	
	Manajemen Aset	%	Ya	Ya	1,00	4,00	4	
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,50	8,12	7,26	0,99	8,08	
37	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	3,50	90,50	94,81	100,00	96,45	LPPD Kab. Rembang
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100,00	100,00	98,00	100,00	100	

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan, efisiensi dalam penggunaan anggaran dan berdampak pada peningkatan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rembang dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan

daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

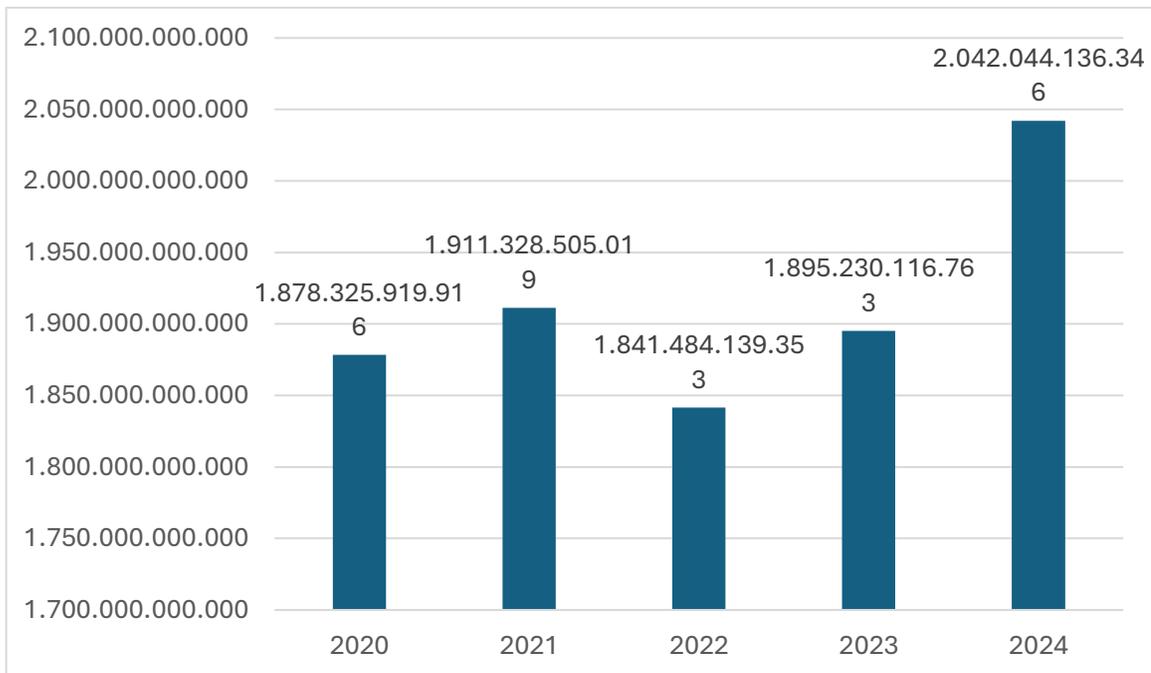
Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Rembang secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan

menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

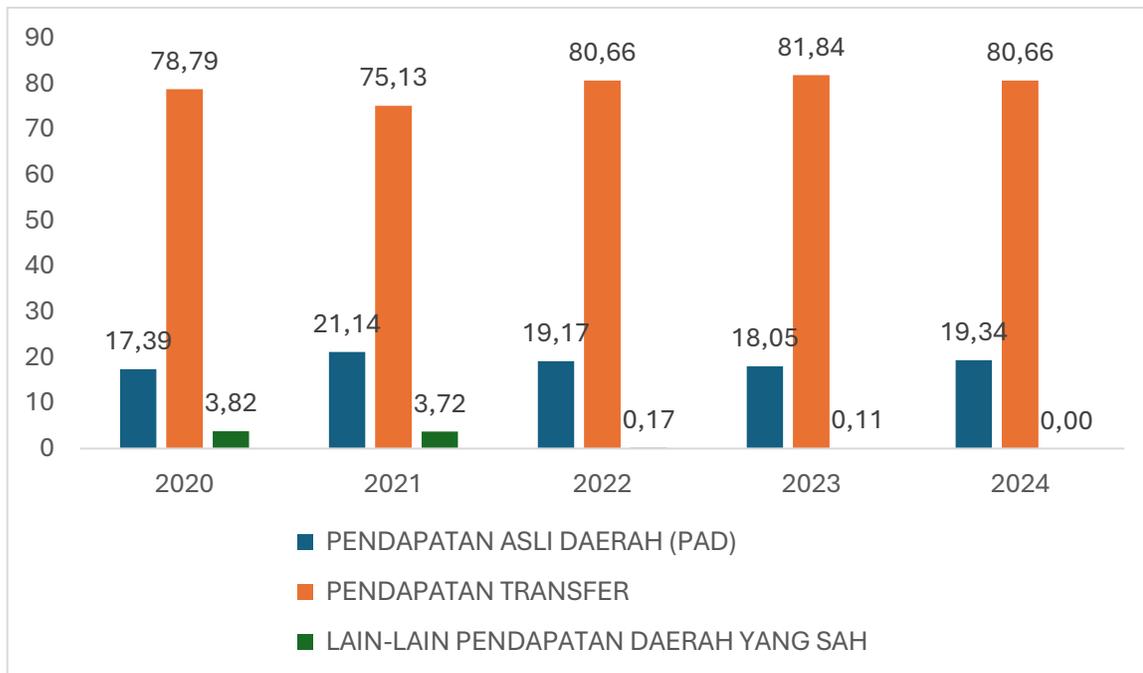
2.2.2 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dari sebesar Rp1.878.325.919.916 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.042.044.136.346 pada tahun 2024. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 tercantum pada gambar berikut.



Gambar 2.59 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Pendapatan daerah Kabupaten Rembang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proporsi masing-masing unsur pendapatan daerah paling besar adalah pendapatan transfer dengan perkembangan meningkat dari 78,79% pada tahun 2020 menjadi sebesar 80,66% pada tahun 2024. Proporsi pendapatan asli daerah meningkat dari sebesar 17,39% pada tahun 2020 menjadi sebesar 19,34% pada tahun 2024. Sementara itu lain-lain pendapatan daerah relatif kecil dengan kecenderungan menurun dari 3,82% pada tahun 2020 menjadi sebesar 0% pada tahun 2024. Perkembangan proporsi masing-masing unsur pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 2.60 Perkembangan Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp326.670.124.351,00 pada tahun 2020 menjadi Rp394.990.453.145,00 pada tahun 2024. Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 pendapatan transfer mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp1.479.953.202.848,00 pada tahun 2020 menjadi Rp1.647.053.683.201,00 pada tahun 2024. Pencapaian target dana transfer pemerintah pusat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp71.702.592.717,00 pada tahun 2020 menjadi Rp71.702.592.717,00 pada tahun 2024.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang 2020-2024 (Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.878.325.919.916	1.911.328.505.019	1.841.484.139.353	1.895.230.116.763	2.042.044.136.346
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	326.670.124.351	404.100.646.579	353.094.781.383	342.024.786.723	394.990.453.145
Pajak Daerah	87.544.136.466	109.959.371.761	110.699.397.246	114.392.935.143	130.035.999.270
Retribusi Daerah	16.368.148.360	16.918.657.734	19.439.698.492	19.531.007.931	17.835.256.193
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.961.666.343	10.839.239.869	12.702.367.621	13.046.001.354	11.670.572.806
Lain-lain PAD yang Sah	210.796.173.182	266.383.377.216	210.253.318.024	195.054.842.295	235.448.624.877
PENDAPATAN TRANSFER	1.479.953.202.848	1.436.076.389.264	1.485.289.385.870	1.551.111.332.940	1.647.053.683.201
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.368.623.473.244	1.299.326.523.909	1.348.741.603.211	1.419.282.152.547	1.476.252.573.669
Dana Perimbangan	1.012.352.994.244	1.031.432.921.909	1.088.099.353.211	1.170.834.089.547	1.203.898.426.669
Dana Instensif Daerah (DID)	95.746.665.000	7.369.788.000	8.578.224.000	0	20.980.893.000
Dana Desa	260.523.814.000	260.523.814.000	252.064.026.000	248.448.063.000	251.373.254.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	111.329.729.604	136.749.865.355	136.547.782.659	131.829.180.393	170.801.109.532
Pendapatan Bagi Hasil	97.043.873.316	120.762.316.716	119.936.641.000	121.152.548.393	126.552.960.032
Bantuan Keuangan	14.285.856.288	15.987.548.639	16.611.141.659	10.676.632.000	44.248.149.500
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.702.592.717	71.151.469.176	3.099.972.100	2.093.997.100	0
Pendapatan Hibah	71.702.592.717	5.043.562.673	3.099.972.100	2.093.997.100	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	66.107.906.503	0	0	0

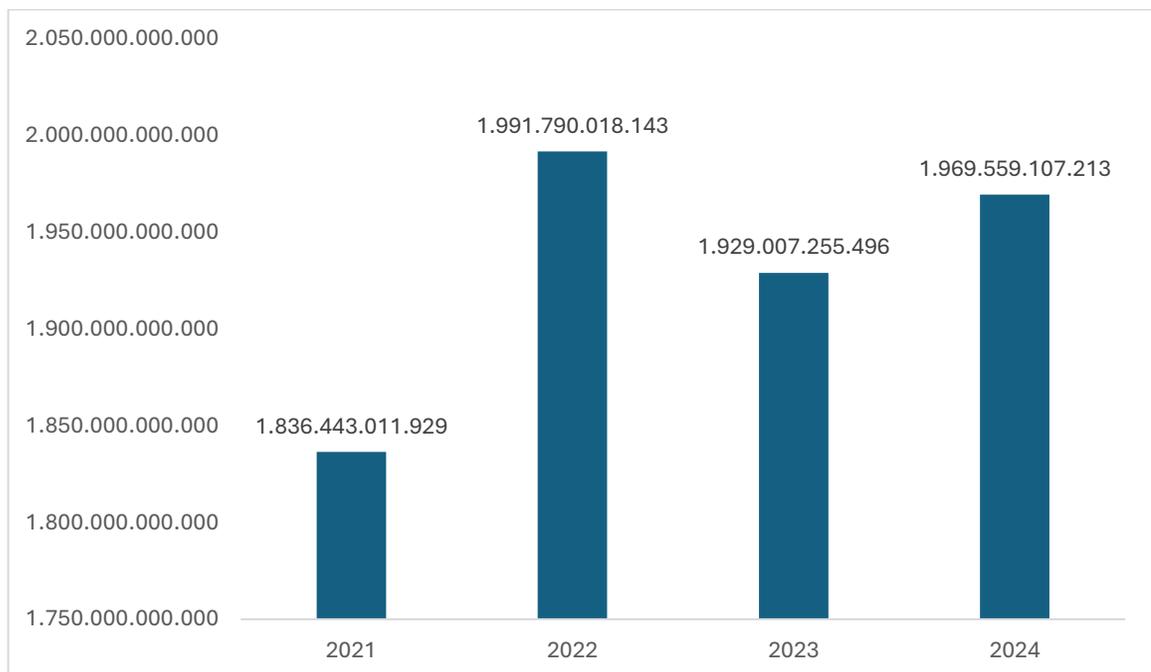
Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
PENDAPATAN	3,00	1,73%	-3,79	2,84	7,75	2,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,58	19,16	-14,45	-3,24	15,49	5,80
Pajak Daerah	-15,02	20,39	0,67	3,23	13,67	5,65
Retribusi Daerah	-16,29	3,25	12,97	0,47	(8,68)	(1,25)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,37	-10,36	14,67	2,63	(10,54)	1,87
Lain-lain PAD yang Sah	15,62	20,87	-26,70	-7,79	20,71	6,88
PENDAPATAN TRANSFER	2,25	-3,06	3,31	4,24	6,19	2,67
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,25	-5,33	3,66	4,97	4,01	2,45
Dana Perimbangan	-3,91	1,85	5,21	7,07	2,82	2,78
Dana Insentif Daerah (DID)	100,00	-1199,18	14,09	0,00		8,03
Dana Desa	0,80	0,00	-3,36	-1,46	1,18	(0,54)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-22,40	18,59	-0,15	-3,58	29,56	5,28
Pendapatan Bagi Hasil	-10,63	19,64	-0,69	1,00	4,46	3,72
Bantuan Keuangan	-102,36	10,64	3,75	-55,58	314,44	38,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,86	-0,77	-2195,23	-48,04	0,00	(30,50)
Pendapatan Hibah	6,86	-1321,67	-62,70	-48,04	0,00	(39,27)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.3 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2024, tercatat realisasi sebesar Rp1.830.776.504.959,00 pada tahun 2020 menjadi Rp1.969.559.107.213,00 pada tahun 2024. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2024 terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.61 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 belanja operasi meningkat dari sebesar Rp1.214.983.893.484,00 pada tahun 2020 menjadi Rp1.392.749.103.318,00 pada tahun 2024. Belanja modal cenderung meningkat dari sebesar Rp154.123.440.858,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp214.887.416.195,00 pada tahun 2024. Belanja Tidak Terduga fluktuatif dari Rp56.727.215.917,00 pada tahun 2020 menjadi Rp84.500.000,00 pada tahun 2024. Belanja transfer cenderung

menurun dari Rp404.941.954.700 pada tahun 2020 menjadi Rp361.838.087.700,00 pada tahun 2024.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	1.830.776.504.959	1.836.443.011.929	1.991.790.018.143	1.929.007.255.496	1.969.559.107.213
BELANJA OPERASI	1.214.983.893.484	1.256.542.221.398	1.295.901.428.809	1.244.729.831.700	1.392.749.103.318
Belanja Pegawai	729.743.084.509	758.906.313.696	731.219.473.094	736.797.815.445	856.607.844.856
Belanja Barang dan Jasa	389.891.343.862	412.453.151.139	440.190.827.887	383.989.899.479	424.845.019.660
Belanja Bunga	1.110.103.113	511.986.048	387.850.732	4.951.515.018	2.405.880.833
Belanja Subsidi	6.600.000.000	0	700.000.000	0	0
Belanja Hibah	83.857.142.000	83.081.370.515	116.456.840.096	112.793.001.758	103.745.957.969
Belanja Bantuan Sosial	3.782.220.000	1.589.400.000	6.946.437.000	6.197.600.000	5.144.400.000
BELANJA MODAL	154.123.440.858	187.286.320.101	280.273.201.664	306.994.695.651	214.887.416.195
Belanja Modal Tanah	0	1.223.010.000	25.043.309.520	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.547.171.479	46.697.324.031	88.311.359.739	57.237.284.895	83.280.076.394
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.709.319.083	67.632.210.746	66.587.369.416	101.930.882.436	90.430.749.366
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.270.452.676	67.739.432.724	97.159.204.555	141.367.761.816	35.653.672.737
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.596.497.620	3.994.342.600	3.171.958.434	6.458.766.504	5.464.233.698
BELANJA TAK TERDUGA	56.727.215.917	5.482.217.430	2.162.132.670	1.198.000.000	84.500.000
Belanja Tak Terduga	56.727.215.917	5.482.217.430	2.162.132.670	1.198.000.000	84.500.000
BELANJA TRANSFER	404.941.954.700	387.132.253.000	413.453.255.000	376.084.728.145	361.838.087.700
Belanja Bagi Hasil	12.357.333.100	11.972.924.000	10.391.229.000	12.629.517.449	12.595.433.700
Belanja Bantuan Keuangan	392.584.621.600	375.159.329.000	403.062.026.000	363.455.210.696	349.242.654.000
SURPLUS / (DEFISIT)	47.549.414.956	74.885.493.090	-150.305.878.790	-33.777.138.733	72.485.029.133
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.525.861.117	75.734.487.673	182.737.177.232	66.884.667.157	19.703.524.024
Penggunaan SiLPA	40.143.475.817	65.325.181.073	133.340.384.032	28.562.969.761	19.703.524.024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pinjaman Daerah	28.382.385.300	0	49.396.793.200	38.321.697.396	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	10.409.306.600	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.750.095.000	17.279.596.732	3.868.328.680	13.404.004.400	74.314.486.196
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.300.000.000	3.001.922.132	0	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.450.095.000	0	0	13.404.004.400	74.314.486.196
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	14.277.674.600	3.868.328.680	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	17.775.766.117	58.454.890.941	178.868.848.552	53.480.662.757	(54.610.962.172)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	65.325.181.073	133.340.384.032	28.562.969.761	19.703.524.024	17.874.066.962

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata
BELANJA DAERAH	(1,79)	0,31	8,46	(3,15)	2,10	1,19
BELANJA OPERASI	(3,44)	3,42	3,13	(3,95)	11,89	2,21
Belanja Pegawai	(18,53)	4,00	(3,65)	0,76	16,26	(0,23)
Belanja Barang dan Jasa	15,03	5,79	6,73	(12,77)	10,64	5,08
Belanja Bunga	(76,93)	(53,88)	(24,25)	1.176,65	(51,41)	194,04
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	39,76	(0,93)	40,17	(3,15)	(8,02)	13,57
Belanja Bantuan Sosial	(113,99)	(57,98)	337,05	(10,78)	(16,99)	27,46
BELANJA MODAL	(34,35)	21,52	49,65	9,53	(30,00)	3,27
Belanja Modal Tanah	-		1.947,68	-	-	486,92
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,70	(22,87)	89,11	(35,19)	45,50	20,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(35,85)	41,76	(1,54)	53,08	(11,28)	9,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	(120,51)	60,25	43,43	45,50	(74,78)	(9,22)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	(43,86)	11,06	(20,59)	103,62	(15,40)	6,97
BELANJA TAK TERDUGA		(90,34)	(60,56)	(44,59)	(92,95)	(72,11)
Belanja Tak Terduga		(90,34)	(60,56)	(44,59)	(92,95)	(72,11)
BELANJA TRANSFER	1,32	(4,40)	6,80	(9,04)	(3,79)	(1,82)
Belanja Bagi Hasil	3,34	(3,11)	(13,21)	21,54	(0,27)	1,66
Belanja Bantuan Keuangan	1,26	(4,44)	7,44	(9,83)	(3,91)	(1,90)
SURPLUS / (DEFISIT)	187,49	57,49	(300,71)	(77,53)	(314,60)	(89,57)

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Rembang relatif besar, yaitu mencapai Rp729.743.084.509,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp856.607.844.856 pada tahun 2024. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten
Rembang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	729.743.084.509	758.906.313.696	731.219.473.094	736.797.815.445	856.607.844.856

Dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja daerah dan pengeluaran Pembiayaan), proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 38,78% pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 41,91% pada tahun 2024. Secara rinci proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	729.743.084.509	758.906.313.696	731.219.473.094	736.797.815.445	856.607.844.856
2	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	1.881.526.599.959	1.853.722.608.661	1.995.658.346.823	1.942.411.259.896	2.043.873.593.409
3	Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	38,78	40,94	36,64	37,93	41,91

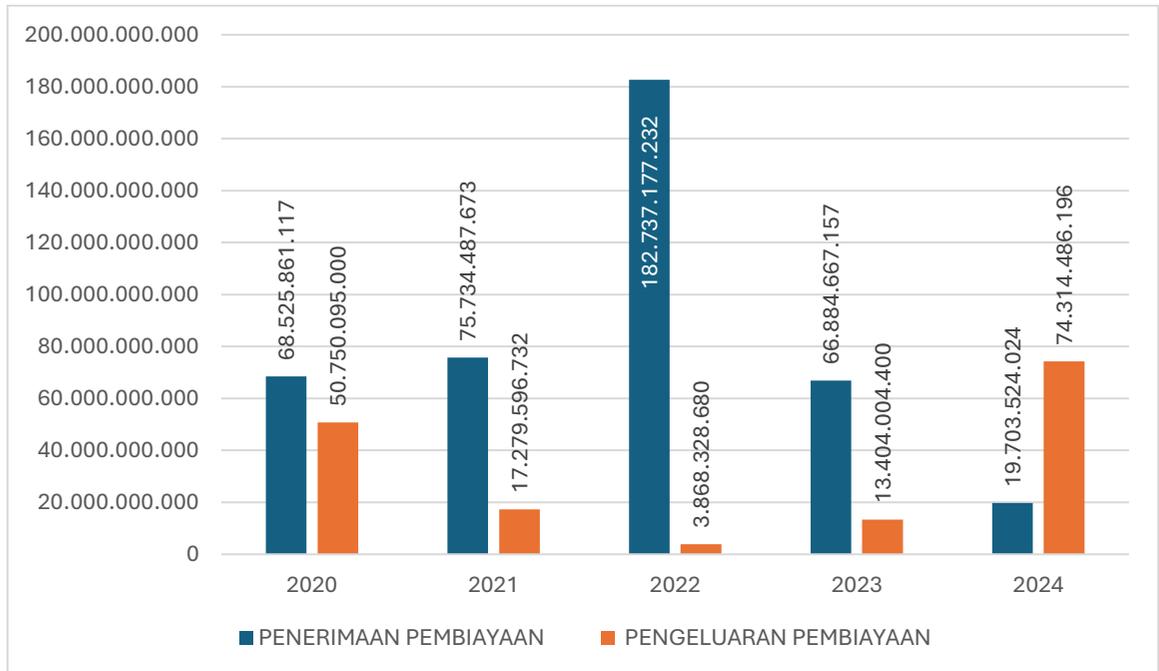
2.2.4 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan,

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Rembang fluktuatif dari sebesar Rp68.525.861.117,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp19.703.524.024,00. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

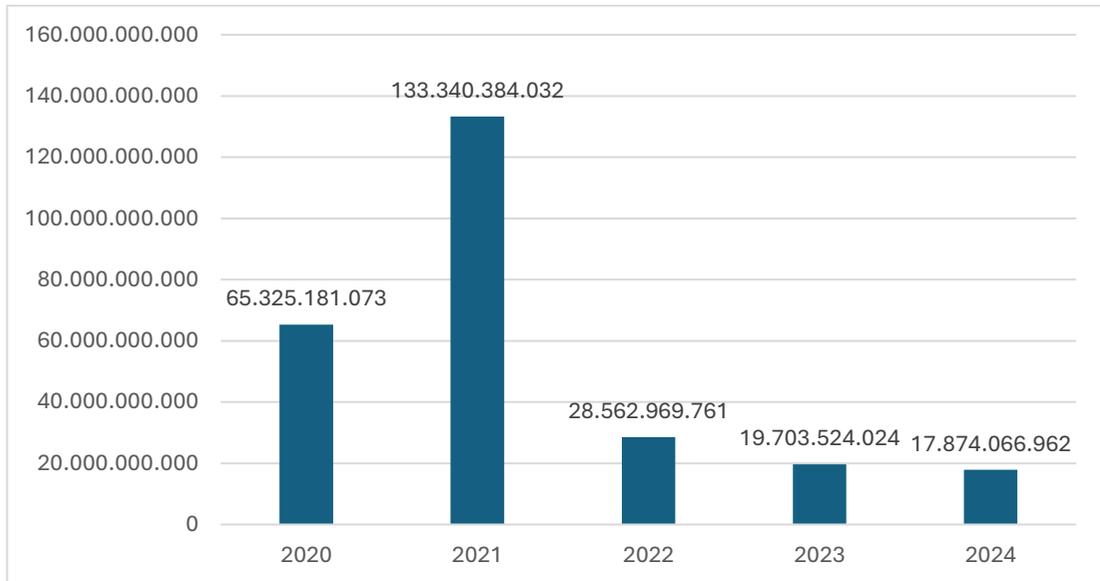
Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Rembang fluktuasi, dari sebesar Rp50.750.095.000 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp74.314.486.196,00. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.62 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Rembang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp65.325.181.073,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp17.874.066.962,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan semakin baik, yang dipengaruhi oleh penyerapan anggaran belanja daerah semakin baik.



Gambar 2.63 Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 (Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.525.861.117	75.734.487.673	182.737.177.232	66.884.667.157	19.703.524.024
Penggunaan SiLPA	40.143.475.817	65.325.181.073	133.340.384.032	28.562.969.761	19.703.524.024
Penerimaan Pinjaman Daerah	28.382.385.300	0	49.396.793.200	38.321.697.396	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	10.409.306.600	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.750.095.000	17.279.596.732	3.868.328.680	13.404.004.400	74.314.486.196
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.300.000.000	3.001.922.132	0	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.450.095.000	0	0	13.404.004.400	74.314.486.196
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	14.277.674.600	3.868.328.680	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	17.775.766.117	58.454.890.941	178.868.848.552	53.480.662.757	(54.610.962.172)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	65.325.181.073	133.340.384.032	28.562.969.761	19.703.524.024	17.874.066.962

Pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(123,68)	10,52	141,29	(63,40)	(70,54)	(21,16)
Penggunaan SiLPA	(87,87)	62,73	104,12	(78,58)	(31,02)	(6,12)
Penerimaan Pinjaman Daerah	(174,35)			(22,42)		(98,39)
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-					-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(40,96)	(65,95)	(77,61)	246,51	454,42	103,28
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	43,40	(43,36)				0,02
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	(50,79)				454,42	201,82
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-		(72,91)	-	-	(18,23)
PEMBIAYAAN NETTO	(359,88)	228,85	205,99	(70,10)	(202,11)	(39,45)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	38,55	104,12	(78,58)	(31,02)	(9,28)	4,76

Analisis defisit riil anggaran dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 defisit riil anggaran cenderung fluktuatif sebesar minus Rp3.200.680.043 menjadi minus Rp 1.829.457.063. Secara rinci terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.878.325.919.916	1.911.328.505.019	1.841.484.139.353	1.895.230.116.763	2.042.044.136.346
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.830.776.504.959	1.836.443.011.929	1.991.790.018.143	1.929.007.255.496	1.969.559.107.213
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.750.095.000	17.279.596.732	3.868.328.680	13.404.004.400	74.314.486.196
	Defisit riil	-3.200.680.043	57.605.896.358	-154.174.207.470	-47.181.143.133	-1.829.457.063

Penerimaan pembiayaan daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Selengkapnya komposisi penerimaan pembiayaan sebagai penutup defisit riil anggaran terlihat pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 2.13
Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil
Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penggunaan SiLPA	40.143.475.817	65.325.181.073	133.340.384.032	28.562.969.761	19.703.524.024
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	28.382.385.300	0	49.396.793.200	38.321.697.396	0
3.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	10.409.306.600	0	0	0

2.2.5 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Proyeksi APBD Kabupaten Rembang dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian nasional dan daerah berada pada pertumbuhan yang tinggi dengan laju inflasi pada angka yang stabil.
- Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan pengelolaan pajak dan retribusi, serta peningkatan kinerja pengelolaan BUMD sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan bagi laba (dividen) perusahaan.

- c. Kebijakan pengalokasian pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2030 tercantum ada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024-2030

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	2.009.262.554.829	2.064.965.778.576	2.122.248.605.977	2.181.156.595.281	2.241.736.634.886	2.304.036.982.515
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	442.486.746.792	466.614.595.626	475.946.887.538	485.465.825.289	495.175.141.795	505.078.644.631
Pajak Daerah	177.386.000.000	180.933.720.000	184.552.394.400	188.243.442.288	192.008.311.134	195.848.477.356
Retribusi Daerah	40.032.543.037	40.833.193.898	41.649.857.776	42.482.854.931	43.332.512.030	44.199.162.270
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.317.551.792	13.583.902.828	13.855.580.884	14.132.692.502	14.415.346.352	14.703.653.279
Lain-lain PAD yang Sah	226.729.195.000	231.263.778.900	235.889.054.478	240.606.835.568	245.418.972.279	250.327.351.724
PENDAPATAN TRANSFER	1.566.775.808.037	1.598.351.182.950	1.646.301.718.439	1.695.690.769.992	1.746.561.493.091	1.798.958.337.884
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.470.797.265.000	1.514.921.182.950	1.560.368.818.439	1.607.179.882.992	1.655.395.279.481	1.705.057.137.866
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	81.000.000.000	83.430.000.000	85.932.900.000	88.510.887.000	91.166.213.610	93.901.200.018
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	0	0
BELANJA DAERAH	2.014.262.554.829	2.064.965.778.576	2.122.248.605.977	2.181.156.595.281	2.241.736.634.886	2.304.036.982.515
BELANJA OPERASI	1.422.448.618.305	1.457.538.653.802	1.498.265.192.808	1.540.107.058.113	1.583.093.793.010	1.627.255.677.277
Belanja Pegawai	935.031.434.933	958.407.220.806	982.367.401.326	1.006.926.586.360	1.032.099.751.019	1.057.902.244.794
Belanja Barang dan Jasa	327.911.276.222	338.030.466.774	353.185.815.598	368.841.376.110	385.011.555.392	401.711.121.018
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi						

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Hibah	147.877.585.550	149.356.361.406	150.849.925.020	152.358.424.270	153.882.008.512	155.420.828.598
Belanja Bantuan Sosial	11.628.321.600	11.744.604.816	11.862.050.864	11.980.671.373	12.100.478.087	12.221.482.867
BELANJA MODAL	215.245.475.950	223.387.294.988	232.322.786.788	241.615.698.259	251.280.326.189	261.331.539.237
Belanja Modal Tanah	12.600.000.000	13.104.000.000	13.628.160.000	14.173.286.400	14.740.217.856	15.329.826.570
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.644.835.550	28.750.628.972	29.900.654.131	31.096.680.296	32.340.547.508	33.634.169.408
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.478.627.000	69.137.772.080	71.903.282.963	74.779.414.282	77.770.590.853	80.881.414.487
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.415.931.000	111.712.568.240	116.181.070.970	120.828.313.808	125.661.446.361	130.687.904.215
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	656.082.400	682.325.696	709.618.724	738.003.473	767.523.612	798.224.556
BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	373.568.460.574	381.039.829.785	388.660.626.381	396.433.838.909	404.362.515.687	412.449.766.001
Belanja Bagi Hasil	13.013.909.574	13.274.187.765	13.539.671.521	13.810.464.951	14.086.674.250	14.368.407.735
Belanja Bantuan Keuangan	360.554.551.000	367.765.642.020	375.120.954.860	382.623.373.958	390.275.841.437	398.081.358.265
SURPLUS / (DEFISIT)	-5.000.000.000	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penggunaan SiLPA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN NETTO	5.000.000.000	0	0	0	0	0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0	0	0	0

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Sedangkan permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat menjadi perhatian selama 5 tahun ke depan (2025-2029) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.3.1.1 Permasalahan Pada Aspek Geografi

Kabupaten Rembang yang secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa, pada 5 tahun ke depan memiliki permasalahan geografi meliputi:

1. Penurunan kualitas lingkungan dan terjadinya perubahan iklim. Penurunan kualitas lingkungan tersebut ditandai dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 68,10 tahun 2024 menjadi sebesar 66,96.
2. Ancaman Bencana. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di pantai utara Pulau Jawa, wilayah pesisir Kabupaten Rembang harus menghadapi risiko gelombang pasang dan abrasi. Indeks Risiko Bencana pada tahun 2024 cukup tinggi yaitu sebesar 114,24. Gelombang pasang disebabkan oleh dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir. Gelombang pasang atau abrasi di Kabupaten Rembang juga disebabkan akibat kerusakan ekosistem lingkungan di wilayah pesisir, sedimentasi dan reklamasi. Selain gelombang pasang, bencana lain yang dihadapi Kabupaten Rembang yaitu banjir, longsor/gerakan tanah. Secara khusus memasuki musim hujan, banjir dan longsor menjadi bencana musiman yang selalu menimpa beberapa kawasan di Kabupaten Rembang. Bencana longsor dipengaruhi oleh faktor alam seperti

kelas kemiringan lereng, drainase permukaan, tekstur tanah, kelembaban. Menurunnya kualitas lingkungan yang cukup drastis membuat tanah dan sungai tidak lagi dapat menahan debit air yang begitu tinggi. Hal ini diperparah karena lokasi tangkapan air di hulu atau kawasan lindung sudah semakin rusak.

3. Timbulan sampah. Timbulan sampah menjadi masalah yang belum dapat diatasi dengan baik. Data timbulan sampah terkelola pada tahun 2023 sebesar 33,29%. Setiap tahunnya timbulan sampah di Kabupaten Rembang semakin meningkat, sementara pengelolaannya belum maksimal. Timbulan sampah yang belum teratasi memberikan dampak tambahan terhadap penurunan kualitas lingkungan, termasuk banjir, dan pencemaran air melalui sampah plastik.
4. Terganggunya kelestarian kawasan lindung akibat aktivitas tambang dan pembangunan pabrik di beberapa wilayah. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di antaranya penurunan produktivitas lahan, terjadinya pencemaran udara, bencana alam, dan konflik sosial. Aktivitas ini dalam jangka panjang sangat mempengaruhi lingkungan hidup juga kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Rembang.
5. Daya dukung air yang rendah. Situasi ini terjadi akibat terjadinya eksploitasi Kawasan Lindung Pegunungan Kendeng, Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih. Eksploitasi yang dilakukan berdampak pada rusaknya wilayah tangkapan air, yang membuat debit air menurun drastis. Berkurangnya kawasan tutupan hijau seperti pepohonan juga membuat daerah tangkapan air berkurang, situasi ini membuat air hujan yang turun tidak dapat ditampung, dan langsung mengalir menuju anak sungai, sehingga menyebabkan luapan banjir.
6. Struktur kependudukan Kabupaten Rembang mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 70,04%. Kondisi ini akan mempengaruhi *dependency ratio* dan *labor supply*. Termasuk ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta penguatan mental, spiritual dan nilai Pancasila di masyarakat.

7. Meningkatnya jumlah penduduk lansia di Kabupaten Rembang. Persentase penduduk lansia tahun 2024 sebesar 14,61% dari jumlah penduduk. Hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kondisi ini adalah masalah jaminan kesehatan dan kepedulian terhadap pelayanan kebutuhan lansia ke depannya.

2.3.1.2 Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, meliputi:

1. Belum stabilnya kondisi perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (3,85%) dan 2022 (5,55%) mulai mengalami kenaikan pasca gejolak pandemi Covid-19 di tahun 2019-2020, namun di tahun 2024 kembali mengalami perlambatan menjadi sebesar 5,08%.
2. Tingginya angka kemiskinan, Angka kemiskinan cukup tinggi dan penurunan penduduk miskin lambat. Pada tahun 2024 sebesar 14,02% sedikit turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 14,17%, sementara itu target penurunan kemiskinan menurut SDG's pada tahun 2030 adalah nol persen. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang menghambat pembangunan di daerah, sehingga persoalan kemiskinan ini akan selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk dituntaskan.
3. Rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi tersebut ditandai dengan rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Rembang pada tahun 2024 sebesar 8,17 tahun, setara dengan jenjang SMP. Tingkat Pendidikan yang rendah tersebut berdampak pada ketidakmampuan untuk mengakses pekerjaan yang layak. Rendahnya tingkat pendidikan dipengaruhi oleh rendahnya minat untuk menamatkan sekolah, terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan berbiaya murah, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang kemampuan mengakses atau menempuh pendidikan tinggi akan mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah.

4. Kondisi kesehatan masyarakat belum optimal. Ditandai dengan besaran nilai Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,35 yaitu termasuk kategori keluarga tidak sehat. Berdasarkan nilai IKS, keluarga dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu: Keluarga Sehat jika nilai IKS $> 0,8$, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS $0,5 - 0,8$, Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS $< 0,5$. Selain itu juga pelayanan kesehatan belum optimal. Terbatasnya fasilitas kesehatan membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan dan menikmati layanan kesehatan yang berkualitas. Ketika kualitas layanan kesehatan rendah maka kemungkinan terpapar penyakit sangat tinggi, yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu edukasi kesehatan masyarakat juga masih tergolong rendah, pola hidup sehat belum dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan berupa infrastruktur, namun juga tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk edukasi pola hidup sehat masih terbatas.
5. Pengangguran. Belum optimalnya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, pada tahun 2024 TPT sebesar 2,84% sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023, 2,60%. Kondisi pengangguran dipengaruhi oleh *supply* dan *demand* lapangan kerja. Masyarakat yang telah menempuh pendidikan yang layak tidak memiliki jaminan dapat memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Terbatasnya lowongan pekerjaan berkualitas serta minimnya akses terhadap modal kerja menjadi salah satu alasan utama yang membuat bertambahnya angka pengangguran.
6. Keterbatasan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akses modal/pembiayaan terhadap para pelaku UMKM masih terbatas. Selain akses, persyaratan terhadap pinjaman modal juga sangat rumit, yang terkadang menghambat para pelaku UMKM dan wirausahawan untuk memperoleh modal.
7. Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia yang belum optimal. Kesetaraan gender yang belum terwujud terlihat dari adanya ketimpangan gender

yang berupa ketimpangan dalam memperoleh hak di bidang politik, ekonomi, sipil dan sosial budaya, dan terjadinya eksploitasi, kekerasan, penelantaran atau diskriminasi terhadap perempuan. Keseimbangan dan keadilan gender juga belum optimal yang ditandai dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan tahun 2023 sebesar 58,22%, dibandingkan dengan Kabupaten Pati (59,62%), Blora (68,88%), dan Kudus (63,47%). Hak anak yang perlu terus ditingkatkan pemenuhannya meliputi hak kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk berbicara, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan yang optimal. Hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi meliputi hak kesetaraan dan non-diskriminasi di masyarakat dan hukum, hak aksesibilitas terhadap layanan publik, hak untuk hidup, hak peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penduduk Lansia diproyeksikan akan terus bertambah, sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Hak Lansia yang harus dipenuhi meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.

8. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sosial budaya pada era saat ini terbilang cukup sulit. Terdapat anomali yang terjadi, pada satu sisi akses terhadap teknologi (media sosial, dan perangkat elektronik) mudah untuk didapatkan sebagai sarana belajar sosial-budaya dan upaya promosi budaya, promosi produk usaha, namun pada sisi lain kemunculan media sosial juga sering kali menimbulkan potensi konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Kemudahan memiliki dan mengakses gawai dan media sosial yang terinstal di dalamnya menjadi tren di kalangan masyarakat, dampak negatif lainnya adalah konten-konten asing dari mancanegara dapat diakses dan terpampang mudah di media sosial yang berdampak pada generasi muda yang lebih

menyukai gaya hidup dan budaya asing, menggunakan bahasa asing, memfavoritkan makanan asing, sementara kegemaran melestarikan budaya lokal mulai menurun, dan hanya dilakukan oleh sekelompok organisasi atau komunitas saja. Tergerusnya budaya lokal serta menjamurnya berbagai budaya asing dalam jangka panjang dapat menghilangkan budaya lokal yang berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa dan negara.

2.3.1.3 Permasalahan Pada Aspek Daya Saing

Permasalahan pembangunan pada aspek daya saing di Kabupaten Rembang meliputi:

1. Daya saing perekonomian yang masih kurang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Rembang namun ada kecenderungan menurun, dan mulai tahun 2023 kontribusi tertinggi telah tergantikan oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 23,89%, pada tahun 2024 turun menjadi 22,39%, sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan pada tahun 2022 sebesar 23,29% meningkat menjadi sebesar 24,38%. Lahan pertanian Kabupaten Rembang memiliki komoditi tanaman pangan utama yaitu padi, jagung, kedelai dan tanaman hortikultura lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir produksinya mengalami penurunan, produksi padi mengalami penurunan karena sistem pengairan masih bergantung pada curah hujan, sementara infrastruktur irigasi di Kabupaten Rembang masih belum baik. Total sawah yang dapat dialiri oleh irigasi masih mencapai separuh dari total keseluruhan sawah di Kabupaten Rembang. Sementara itu situasi anomali cuaca/perubahan iklim (*el nino dan la nina*) yang terjadi belakangan juga sangat mempengaruhi hasil panen, bahkan tidak jarang terjadi gagal panen. Di samping anomali cuaca, ketersediaan dan kesiapan teknologi untuk menghadapi perubahan iklim belum dimiliki oleh para petani dan pemerintah daerah, sehingga produktivitas hasil pertanian belum bisa dikendalikan secara optimal. Pada sektor perikanan, sebagai daerah pesisir jumlah produksi perikanan khususnya

perikanan budidaya masih memerlukan perhatian akibat produksi yang cenderung menurun. Sektor pertanian dan perikanan memerlukan inovasi dan riset lebih mendalam dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi perubahan iklim serta mengantisipasi anomali cuaca yang berdampak pada penurunan produksi pertanian dan perikanan.

2. Daya saing sumber daya manusia yang masih kurang. Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Sebagai salah satu parameter dalam menilai kualitas sumber daya manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun bukan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Rembang masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional. Begitu juga dengan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang juga masih berada di bawah Provinsi dan Nasional. Kondisi tersebut terjadi karena layanan pendidikan belum merata dan inklusif, pendidikan yang berkualitas juga belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Begitu juga dengan layanan kesehatan, secara umum masih terdapat kekurangan pada layanan kesehatan yang didapatkan masyarakat. Persoalan seperti kematian ibu dan bayi, stunting, gizi buruk dan permasalahan kesehatan lain kinerjanya belum sepenuhnya baik. Persoalan-persoalan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang belum baik.
3. Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi dan daya saing sumber daya manusia akan tercapai maksimal apabila daya

saing infrastrukturnya tersedia dengan baik. Hampir di semua aspek pembangunan memiliki permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur, fasilitas bangunan atau gedung menjadi aspek penting dalam pemberian pelayanan publik bagi masyarakat. Selain ketersediaan fasilitas bangunan atau gedung, infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga menjadi infrastruktur penting. Kabupaten Rembang yang berada pada jalur strategis “Pantura” masih belum memiliki infrastruktur yang baik dalam hal jalan dan jembatan, masih banyak jalan kabupaten yang belum dalam kondisi baik yang membuat lalu lintas peredaran barang dan jasa menjadi terhambat. Begitu juga jalan-jalan yang ada di daerah pelosok yang berada pada titik rawan bencana yang sering kali sulit dilalui jika terjadi bencana. Permasalahan sumber daya air juga menjadi tidak kalah penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, secara khusus di Kabupaten Rembang sumber air baku diperoleh melalui daerah tangkapan air daerah kawasan lindung pegunungan Karst yang mulai dieksploitasi sebagai daerah pertambangan. Ketersediaan air baku sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, industri, pariwisata dan aktivitas lainnya, sehingga sumber air yang ada di Kabupaten Rembang sangat perlu untuk diupayakan kelestariannya.

4. Peningkatan angka ketergantungan penduduk dengan kondisi angka ketergantungan sebesar 42,77% yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 43 penduduk usia tidak produktif, tahun 2023 Angka ketergantungan 41,55%.
5. Belum optimalnya daya saing daerah yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,10 (2023 update Agustus 2024) lebih rendah dari IDSD Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,89.

2.3.1.4 Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Rembang yaitu:

1. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Daerah. implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, jika hal tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi salah satu tolok ukur dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi 2024 sebesar 88,76 di bawah angka Jawa Tengah yaitu 91,11.
2. Belum optimalnya kondusifitas daerah. Indeks ketenteraman dan ketertiban daerah menurun Tahun 2023 sebesar 179, pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 160.
3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Nilai Indeks SPBE kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 3,64 berada di bawah Nilai Indeks SPBE Jawa Tengah sebesar 4,26.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 4,39.

Dari beberapa capaian kinerja indikator yang digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rembang, terlihat bahwa sebagian besar capaian kinerja indikator yang ada masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Hal tersebut menjadi tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang

2.3.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/ panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kabupaten Rembang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel 2.15
Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Derah
Kabupaten Rembang 2025-2029

Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Rembang	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Rembang 2025 – 2029
	Global	Nasional	Regional	
Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Perdagangan internasional	Rendahnya Produktivitas	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Implementasi <i>City Branding</i>
	Disrupsi Teknologi			
	Pemanfaatan Luar Angkasa			
Kemiskinan	Penduduk Kelas Menengah	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Penurunan tingkat kemiskinan	Pengentasan Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran) serta Penanganan masalah Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia
Kesetaraan Gender	Demografi Global			
Ketahanan Pangan			Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
Penyediaan Infrastruktur Daerah Belum Merata	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah
Pengelolaan Sumber Daya Air Belum Maksimal				
Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal			Persaingan Sumber Daya Alam	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
Kelestarian Kawasan Lindung				
Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah	Urbanisasi Dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu Strategis Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Rembang	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Jangka Menengah Kab. Rembang 2025 – 2029
	Global	Nasional	Regional	
			Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	
Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal	Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
	Keuangan Internasional			

Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Rembang, dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Rembang selama 5 tahun ke depan (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, karena kualitas SDM yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang masih memiliki pekerjaan berat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM masyarakat. Jika dilihat dari capaian indikator-indikator yang berkaitan dengan SDM, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya optimal sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan daerah.

Kabupaten Rembang pada 5 tahun ke depan harus menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing, agar dapat mencapai Kabupaten Rembang yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, dan mencegah ketertinggalan dari daerah lainnya yang juga sama-sama memiliki harapan untuk berkembang dan maju. Mencapai cita-cita tersebut diupayakan utamanya melalui peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial). Harapannya ketika masyarakat memiliki pendidikan serta kesehatan yang baik, maka peluang meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dapat dicapai,

sehingga kemajuan dan kesejahteraan dapat dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Implementasi *City Branding*

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan, karena memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayahnya. Pengembangan potensi ekonomi daerah diharapkan tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan tingkat provinsi dan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa potensi yang perlu dikembangkan ke depan oleh Kabupaten Rembang adalah potensi pertanian, perikanan baik perikanan tangkap, budidaya perikanan maupun pegaraman, pertambangan mineral berupa batuan, minyak dan gas bumi, industri, pariwisata alam berupa hutan *mangrove*, pantai, dan pariwisata religi dan sejarah. Potensi sumber daya alam tentunya perlu diarahkan pada upaya hilirisasi agar menghasilkan nilai tambah yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Rembang berada di jalur yang cukup strategis. Selain karena berada pada jalur pantai utara pulau Jawa yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian, Kabupaten Rembang juga memiliki potensi dari pertanian, perikanan, kelautan serta industri pengolahan. Namun demikian, secara keseluruhan potensi dari beberapa sektor tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Rembang harus dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, perikanan dan industri pengolahan. Pengoptimalan potensi tiap-tiap sektor perlu dilakukan agar Kabupaten Rembang mampu bersaing dan kompetitif dengan

wilayah sekitarnya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan perekonomian daerah Kabupaten Rembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif pada 5 tahun ke depan.

Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif juga memegang peranan penting dalam peningkatan potensi ekonomi. Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata yang cukup banyak dan beragam, diantaranya yaitu wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam. Jumlah objek wisata di Kabupaten Rembang tercatat 32 objek wisata unggulan, antara lain : Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum RA Kartini, Makam RA Kartini, Pantai Pasir Putih Wates, Pantai Karangjahe, Pantai Binangun Indah, Pasujudan Sunan Bonang, Pasar Mbrumbung, Wana Wisata Kartini Mantingan, Taman Alas Pandansili Kadiwono, Taman Konservasi Hutan Mangrove, Pantai Caruban, Pantai Balongan, Taman Wisata Alam Sumber Semen, Wisata Kuliner Lontong Tuyuhan, Situs Perahu Kuna Punjulharjo, Masjid Jami' Lasem, Masjid Agung Rembang, dan *Old Town Heritage*.

Kunjungan wisata di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Namun demikian, peningkatan kunjungan wisata tersebut belum terlalu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan kepariwisataan semakin penting karena memperluas kesempatan kerja dan pertumbuhan pusat perekonomian. Oleh karena itu perlu perhatian khusus pada pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan perekonomian.

Peluang Penetapan Lasem sebagai Cagar Budaya Nasional perlu dipertimbangkan. Lasem memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang menjadikannya kandidat kuat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Lasem memiliki sejarah panjang yang mencakup era Kerajaan Majapahit, masa kolonial Belanda, hingga masa pergerakan nasional. Banyak bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh, termasuk rumah-rumah tua bergaya Tionghoa dan kolonial. Lasem dikenal sebagai "Tiongkok Kecil" karena populasi etnis *Tionghoa*-nya yang signifikan dan pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Tradisi dan budaya lokal, seperti batik Lasem dengan motif khas, juga memperkaya identitas budaya wilayah ini. Penetapan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat meningkatkan daya tarik Lasem sebagai destinasi

wisata budaya. Wisatawan dapat menikmati situs-situs bersejarah, arsitektur khas, dan tradisi lokal yang unik. Peningkatan jumlah wisatawan akan membawa dampak positif pada ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, kuliner, dan kerajinan tangan.

Status Cagar Budaya Nasional akan memberikan perlindungan hukum bagi bangunan-bangunan bersejarah di Lasem, mencegah perusakan atau perubahan yang tidak sesuai dengan nilai sejarahnya. Dengan status ini, pengelolaan dan perawatan situs-situs bersejarah dapat dilakukan dengan lebih terencana dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, dan para ahli. Lasem dapat menjadi sumber belajar sejarah yang penting bagi pelajar, peneliti, dan masyarakat umum. Berbagai aspek sejarah dan budaya Lasem dapat dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut. Penetapan ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih mendalam mengenai sejarah, arsitektur, dan budaya Lasem, yang dapat berkontribusi pada pengetahuan nasional dan internasional. Mengakui Lasem sebagai Cagar Budaya Nasional berarti mengakui warisan budaya yang berharga dan penting bagi identitas nasional Indonesia. Status ini akan meningkatkan kebanggaan masyarakat Lasem terhadap warisan budaya mereka dan menguatkan rasa memiliki terhadap kekayaan budaya nasional.

Penetapan Lasem sebagai Cagar Budaya Nasional menawarkan berbagai peluang yang signifikan dalam hal pelestarian sejarah, pengembangan pariwisata, peningkatan ekonomi lokal, dan pendidikan. Dengan kekayaan sejarah dan budaya yang dimilikinya, Lasem layak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan sebagai bagian penting dari warisan budaya nasional Indonesia. Hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya bagi masyarakat Lasem, tetapi juga bagi seluruh bangsa.

Penetapan wajah kota dan *city branding* merupakan strategi penting untuk mengembangkan identitas unik dan daya tarik suatu wilayah. Kabupaten Rembang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui strategi ini, mengingat kekayaan budaya, sejarah, dan sumber daya alam yang dimilikinya. Berikut adalah uraian mengenai pentingnya penetapan wajah kota dan *city branding*

untuk Kabupaten Rembang. Penetapan wajah kota membantu menciptakan identitas yang kuat dan kohesif untuk Kabupaten Rembang, yang dapat diakui baik oleh penduduk lokal maupun wisatawan. *Branding* yang efektif dapat membangun citra positif Kabupaten Rembang sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi, ditinggali, dan berinvestasi. Dengan *city branding* yang tepat, Rembang dapat menarik lebih banyak wisatawan. Misalnya, menonjolkan keunikan budaya Lasem, pantai-pantai indah, dan situs-situs bersejarah. *Branding* yang baik dapat membantu mengembangkan berbagai bentuk pariwisata, termasuk wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, keindahan alam, dan kuliner.

Citra positif dari *city branding* dapat menarik investasi dari sektor swasta, baik dalam bidang pariwisata, properti, maupun industri lainnya. *Branding* yang kuat mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dengan meningkatkan penjualan produk khas daerah seperti batik Lasem, makanan khas, dan kerajinan tangan. *Branding* yang menekankan kekayaan budaya dan sejarah mendorong pelestarian situs-situs bersejarah dan tradisi lokal. Strategi *branding* yang sukses seringkali diikuti oleh peningkatan infrastruktur kota, seperti perbaikan jalan, penataan ruang publik, dan pembangunan fasilitas umum. *Branding* yang baik juga mendorong peningkatan layanan publik dan fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

City branding memerlukan kampanye pemasaran yang efektif untuk menyebarluaskan citra positif Rembang melalui berbagai media, termasuk media sosial, situs web resmi, dan publikasi pariwisata. Kerjasama dengan agen perjalanan, *influencer*, dan media massa untuk mempromosikan Kabupaten Rembang secara luas. Melibatkan masyarakat dalam proses penetapan wajah kota dan *city branding* juga diperlukan untuk memastikan bahwa identitas yang dibangun mencerminkan nilai dan aspirasi lokal.

Penetapan wajah kota dan *city branding* Kabupaten Rembang adalah langkah strategis yang dapat membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan pariwisata, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki,

serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Rembang dapat mengembangkan identitas kota yang kuat dan menarik, serta meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

3. Pengentasan Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran) serta Penanganan masalah Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia.

Kesenjangan sosial selalu menjadi isu penting bagi pembangunan daerah. Kesenjangan sosial ditandai dengan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Kabupaten Rembang sebesar 14,02% dibandingkan dengan kabupaten se Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Rembang menempati posisi ke-7 tertinggi. Hal ini menjadi isu penting, karena isu kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang segera penanganan agar tidak berdampak pada kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk gangguan keamanan seperti pencurian/perampokan karena terhimpit masalah ekonomi. Pengurangan kemiskinan sangat penting untuk dilakukan, mengingat kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi. Pengurangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, melibatkan campur tangan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait.

Pengurangan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, air bersih, dan layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan mendorong peningkatan literasi. Pengurangan kemiskinan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi individu dan komunitas yang terkena dampak. Hal ini dapat mencakup peluang pekerjaan yang lebih baik, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Pengurangan kemiskinan diharapkan juga berdampak pada peningkatan keamanan wilayah.

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berwirausaha menjadi penting dalam rangka mengurangi tingkat

pengangguran. Pengangguran terjadi karena masih belum adanya *link and match* antara pendidikan dengan permintaan pasar. Selain itu pengangguran juga disebabkan oleh penduduk usia produktif yang tidak memiliki keterampilan dan kreativitas, serta terbatasnya akses dan pengetahuan terhadap peluang wirausaha. Pengurangan pengangguran perlu dilakukan dengan melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dan partisipasi sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Isu ketimpangan gender perlu diatasi agar kesetaraan gender dapat dicapai. Kesetaraan juga berkaitan dengan perlindungan, khususnya perlindungan terhadap perempuan dalam memperjuangkan haknya, serta menjauhkan mereka dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran atau diskriminasi. Isu pemenuhan hak anak juga perlu ditingkatkan baik hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk berbicara, serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal. Hal yang tidak kalah penting adalah pemenuhan hak Lanjut Usia (Lansia) meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Pemenuhan hak penyandang disabilitas juga perlu menjadi perhatian dengan pemenuhan hak kesetaraan dan non-diskriminasi di masyarakat dan hukum, hak aksesibilitas terhadap layanan publik, hak untuk hidup, hak peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan.

4. Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pada aspek tata kelola pemerintahan, isu yang berkembang adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang dapat bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan serangkaian langkah dan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah untuk

mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Tujuan utama yang diharapkan tercapai dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan sistem yang lebih responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Reformasi birokrasi bukan proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang efektif dan efisien salah satunya bermanfaat dalam meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Jika hal tersebut dapat dicapai maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam jangka Panjang, secara keseluruhan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rembang akan mengarahkan pencapaian visi pembangunan jangka daerah.

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara terus menerus karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada kesehatan manusia, dan mendukung keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sehat mendukung pertanian yang berkelanjutan sehingga produksi pangan dapat terus tercukupi. Ekosistem yang alami berperan dalam melindungi dari bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan. Hal ini dipicu kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Buruknya kualitas lingkungan hidup berpotensi melahirkan bencana alam. Salah satunya adalah bencana banjir akibat semakin berkurangnya jumlah tutupan lahan, salah satunya melalui pertambangan yang terjadi di kawasan hutan lindung. Penurunan kualitas lingkungan juga ditandai

dengan fenomena perubahan iklim, seperti *el nino* dan *la nina* yang belum dapat diantisipasi dampaknya.

Penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim memberikan dampak terjadinya bencana yang selalu menimbulkan kerusakan yang parah. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam jangka panjang harus melakukan upaya keras untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak, melakukan penghijauan serta pelarangan aktivitas tambang di daerah lindung untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Tentunya upaya peningkatan kualitas lingkungan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi perusahaan swasta dan masyarakat umum.

Data timbulan sampah mencapai 765,47 m³ tiap hari. Besaran sampah yang dikelola dengan 3R di Kabupaten Rembang hanya sebesar 0,5 m³/hari atau sekitar 0,03% dari total timbulan sampah Kabupaten Rembang dan sampah yang terkelola dengan 3R hanya di Kecamatan Rembang. Volume sampah yang diangkut ke TPA berasal dari sampah permukiman maupun sampah non permukiman. Pada tahun 2022, volume sampah yang terangkut sebesar 113,136 m³/hari dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang yaitu 72,03 m³/hari.

Dalam mengatasi masalah persampahan diperlukan komitmen seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rembang telah merancang program RDF (*Refuse Derived Fuel*) dari Sampah. RDF dari sampah menawarkan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah dan kebutuhan energi. Dengan pengumpulan dan pengolahan sampah yang efektif, RDF dapat menjadi sumber energi alternatif yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, serta peningkatan teknologi dan infrastruktur, sangat penting untuk mengoptimalkan manfaat RDF dan mengatasi tantangan yang ada. Namun demikian, perlu komitmen agar program tersebut dapat terealisasi.

6. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah

Keberadaan jalur Pantura juga jaringan jalan kabupaten yang telah menghubungkan semua wilayah kecamatan dan desa, merupakan infrastruktur pokok sebagai satu kesatuan sistem transportasi Nasional, sistem transportasi wilayah maupun sistem transportasi lokal dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Di sepanjang koridor Pantura yang melintasi Kabupaten Rembang telah berkembang berbagai aktivitas ekonomi, seperti industri, jasa, perdagangan, perhubungan darat dan perhubungan laut. Selain itu, keberadaan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang didukung infrastruktur pendukungnya seperti ketersediaan air baku, energi listrik dan telekomunikasi menjadi kekuatan untuk pengembangan potensi pantai melalui pembangunan pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan umum yang dipadukan dengan pengembangan industri pengolahan berbasis pertambangan, pertanian, perkebunan maupun perikanan dan kelautan. Kondisi Kabupaten Rembang yang relatif berkembang pada bagian pantai utara menimbulkan kesenjangan dengan wilayah bagian selatan. Konsentrasi aktivitas di pantai utara mempercepat pertumbuhan kawasan melalui mekanisme pasar, sementara pada wilayah bagian selatan yang mobilitas angkutan barang dan manusia relatif terbatas berkembang relatif lambat, sehingga untuk dapat mengimbangi perkembangan di bagian utara diperlukan insentif berupa alokasi pembangunan secara afirmatif fiskal ke bagian wilayah selatan, agar terjadi pemerataan pembangunan.

Di sisi lain terkait pembangunan infrastruktur wilayah masih dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum begitu memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang, begitu juga dengan pengelolaan potensi air permukaan yang belum optimal untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui pembangunan embung, bendung dan *check dam*.

Peluang eksternal pengembangan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Rembang sangat terbuka, karena wilayah Kabupaten Rembang menjadi simpul transportasi darat, memiliki potensi terminal barang untuk mengelola peredaran arus barang yang semakin meningkat. Di samping itu keunggulan Kabupaten Rembang menjadi *waterfront city* yang memberikan peluang dalam pengembangan kota bahari untuk memicu pengembangan daerah sekitar. Sementara faktor risiko dalam pengembangan infrastruktur wilayah masih dihadapkan pada persoalan seperti kejadian bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor dan kekeringan serta fluktuasi harga bahan bangunan sebagai dampak inflasi secara Nasional. Hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif agar pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan baik.

Rencana Pembangunan Tol dan Reaktivasi Kereta Api Rembang Sebagai *Backbone* Ekonomi dan Industri juga perlu menjadi isu strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan untuk diwujudkan. Keberadaan tol dan jalur kereta api dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, manfaat praktis yang dirasakan jika satu daerah terkoneksi dengan daerah lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Secara khusus bagi Kabupaten Rembang yang selama ini masih mengandalkan posisi jalur pantura sebagai jalur utama untuk menghubungkan Rembang dengan Kabupaten/Kota lain di pantai utara Pulau Jawa. Simpul lainnya seperti jalan provinsi yang menghubungkan Rembang-Grobogan, atau Rembang-Blora merupakan jalur alternatif yang dapat ditempuh dari Kabupaten yang berada di sebelah selatan Kabupaten Rembang, sekaligus juga menjadi jalur alternatif jika jalur Pantura mengalami kelumpuhan. Situasi ini tentu memberikan dampak negatif ketika terjadi kelumpuhan jalur pantura sektor Demak-Kudus-Pati-Rembang, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat rentan mengalami bencana Banjir. Kelumpuhan yang terjadi di jalur Pantura sangat berdampak bagi Kabupaten Rembang yang juga berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Dampak paling utama yaitu terhambatnya lalu-lintas barang dan jasa yang akan masuk dan keluar dari Kabupaten Rembang.

Situasi ini menghadirkan pentingnya pembangunan Tol dan reaktivasi jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Rembang sebagai simpul transportasi yang dapat dimanfaatkan sebagai lalu-lintas barang dan jasa. Pembangunan tol dan reaktivasi jalur kereta api dipandang sangat penting, jika pembangunannya dapat direalisasikan pada beberapa tahun ke depan, tentu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu menyiapkan aspek-aspek pendukung, agar rencana pembangunan tol dan reaktivasi Jalur Kereta Api di Kabupaten Rembang dapat direalisasikan segera.

Pembangunan jalan lingkar Kabupaten Rembang juga memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan lingkar merupakan salah satu proyek infrastruktur yang sangat penting bagi pengembangan wilayah dan peningkatan konektivitas. Jalan lingkar dapat mengalihkan lalu lintas dari pusat kota, mengurangi kemacetan dan memperlancar arus kendaraan. Dengan mengurangi kemacetan, perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien, menghemat waktu dan biaya operasional kendaraan. Jalan lingkar meningkatkan konektivitas antar wilayah yang penting untuk perdagangan dan mobilitas penduduk serta membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, mendorong perkembangan ekonomi dan sosial di daerah-daerah tersebut. Dengan mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Memudahkan akses bagi layanan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga respon terhadap keadaan darurat dapat lebih cepat. Pembangunan jalan lingkar dapat mengatur penyebaran pembangunan kota agar tidak terkonsentrasi di pusat kota saja, membantu dalam perencanaan tata ruang yang lebih baik. Infrastruktur yang baik menarik investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun asing, yang mendorong pembangunan ekonomi wilayah.

Pembangunan jalan lingkar memiliki signifikansi strategis yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan mengatasi isu-isu strategis tersebut, jalan lingkar tidak hanya dapat

meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong perkembangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya pembangunan jalan lingkar harus dipahami dalam konteks yang komprehensif, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

Pembangunan pelabuhan nasional Sluke juga memainkan peran yang sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi, konektivitas internasional, dan pengembangan wilayah. Pembangunan pelabuhan nasional memiliki dampak strategis yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas internasional, dan mengembangkan wilayah.

7. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah, dalam dua puluh tahun kedepan wilayah Jawa Tengah memiliki potensi menjadi pengampu pangan nasional. Kabupaten Rembang memiliki nilai PDRB tertinggi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan mata pencaharian 35,25% masyarakat adalah petani/pekebun/peternak dan nelayan/perikanan. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Rembang cukup baik, lima tahun terakhir nilai indeks ketahanan pangan cenderung meningkat.

Namun, diperlukan upaya modernisasi pertanian maupun perikanan untuk meningkatkan produktivitasnya. Ketahanan pangan sendiri tidak terbatas pada ketersediaan/ketercukupan pangan tetapi perlu didukung dengan keterjangkauan ke seluruh masyarakat dan pemanfaatannya. Pada aspek keterjangkauan perlu diperhatikan distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, manajemen stok, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar dan informasi. Selanjutnya, pada aspek pemanfaatan perlu diperhatikan perbaikan pola konsumsi, penganeekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, serta keamanan dan mutu pangan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

3.1.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Visi ini mencerminkan arah kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan landasan utama dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Visi ini harus selaras dengan visi pembangunan nasional serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Dari rumusan visi di atas, menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan yang ingin dicapai dari tahun 2025 sampai tahun 2029 adalah menjadikan Kabupaten Rembang menjadi wilayah yang sejahtera. Sejahtera pada visi tersebut bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Rembang yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan, Perumahan Layak, pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak dan perlindungan sosial), dan merasakan keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan lahir dan batin. Kesejahteraan ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi dan tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Di samping itu juga memiliki daya saing, modern, inovatif, mandiri dan tangguh dalam lingkungan hidup yang lestari. Makna sejahtera pada visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat**

Sejahtera dalam pengertian terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat merujuk pada kondisi di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan layak. Masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli pakaian, barang kebutuhan pokok dan rumah yang layak huni.

2. **Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan**

Selain kebutuhan dasar, masyarakat yang sejahtera ditandai dengan tingkat kemudahan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sampai pada pendidikan tinggi. Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan tingkat atau derajat kesehatan yang tinggi, karena kualitas pelayanan kesehatan yang baik.

3. **Tingginya Tingkat Pendapatan dan Produktivitas Masyarakat**

Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan tingginya pendapatan masyarakat dan tingginya produktivitas masyarakat. Kondisi ini tercipta karena kondisi perekonomian daerah yang semakin baik, lapangan kerja terbuka luas dan kompetensi yang tinggi serta didukung dengan daerah yang kondusif bagi masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi.

4. **Terpenuhinya Keamanan, Ketenteraman dan Kebahagiaan Lahir dan Batin**

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan rasa aman, tenteram dan bahagia lahir serta batin. Timbulnya rasa aman, tenteram dan bahagia lahir serta batin dari masyarakat karena, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat secara nyaman dan produktif. Selain itu, pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan agar kesejahteraan yang dicapai dapat bertahan dalam jangka panjang. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pengurangan risiko bencana, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu visi ini menuntut strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan sektor ekonomi lokal, didukung dengan optimalisasi layanan publik dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 merupakan RPJMD tahap I dari 4 tahap RPJMD dalam 20 tahun periode RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045. Jika dilihat dari rumusan visi kedua dokumen tersebut terdapat keterkaitan yang erat antara visi RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan visi RPJPD tahun 2025 - 2045, khususnya di pemakaian frase Sejahtera.

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Visi Jangka Menengah 2025-2029	Visi Jangka Panjang 2025-2045
Mewujudkan Rembang Sejahtera	Rembang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Visi jangka menengah 2025-2029 "*Mewujudkan Rembang Sejahtera*" dan visi jangka panjang 2025-2045 "*Rembang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan*" memiliki kesinambungan yang kuat dalam arah pembangunan daerah. Keduanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, dengan visi jangka panjang yang memberikan cakupan yang lebih luas, termasuk aspek kemajuan dan keberlanjutan.

Kesesuaian antara kedua visi ini terlihat dari bagaimana visi jangka menengah berperan sebagai tahap awal dalam membangun kesejahteraan masyarakat, yang kemudian akan diperkuat dengan pencapaian kemajuan dan keberlanjutan dalam visi jangka panjang. Oleh karena itu, program dan kebijakan dalam periode 2025-2029 harus dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan agar sejalan dengan visi jangka panjang menuju tahun 2045.

3.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah strategis dan operasional untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Misi berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah. Dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), misi dirancang agar dapat diterapkan secara realistis dalam kurun waktu lima tahun.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan dalam 5 butir, merupakan gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi Mewujudkan **Kabupaten Rembang Sejahtera**, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing merupakan salah satu misi utama dalam pembangunan Kabupaten Rembang. Peningkatan kualitas SDM ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, sehat, dan memiliki daya saing di dunia kerja serta kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, Pembangunan keluarga, serta perlindungan kelompok rentan.

Salah satu langkah utama dalam mewujudkan SDM yang unggul adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas di semua jenjang. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga, terutama anak-anak dan remaja, dapat memperoleh pendidikan yang baik sebagai bekal untuk masa depan yang lebih cerah.

Faktor lain yang akan mempengaruhi kualitas SDM adalah kemampuan literasi masyarakat. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, finansial, dan budaya. Dengan meningkatnya kemampuan literasi, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Program literasi berbasis komunitas serta perpustakaan desa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan berpikir kritis masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam pembangunan SDM yang unggul. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, baik melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai maupun peningkatan tenaga medis yang profesional. Selain itu, program pemenuhan gizi masyarakat, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta kampanye pola hidup sehat, menjadi langkah strategis dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain Pendidikan dan Kesehatan, peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja juga menjadi prioritas. Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, pengembangan wirausaha, serta kemitraan dengan sektor swasta menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif. Dengan adanya akses terhadap pelatihan dan peluang kerja yang lebih luas, diharapkan masyarakat Kabupaten Rembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Kualitas dan ketahanan keluarga juga menjadi faktor penting dalam pembangunan SDM yang berkualitas. Program pengendalian penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta edukasi tentang pola asuh anak yang baik merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga. Dengan keluarga yang harmonis dan berkualitas, generasi penerus akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental, sosial, dan emosional mereka.

Kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sosial yang adil dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Rembang terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui kebijakan afirmatif, pemberdayaan perempuan, serta program perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dengan adanya perlindungan yang baik, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, berbasis potensi unggulan, serta mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam lima tahun ke depan. Melalui berbagai strategi yang komprehensif, pemerintah berupaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendorong investasi, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM), serta mengoptimalkan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis potensi lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berupaya meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kemudahan perizinan, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan bisnis lokal. Peningkatan investasi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu, sinergi dengan sektor swasta dan investor potensial akan terus diperkuat guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Dalam meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, pemerintah akan mendorong inovasi dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan produk kreatif lainnya. Berbagai program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan akses permodalan akan disediakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil. Dengan strategi ini, diharapkan UMKM dan koperasi mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Produktivitas industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata juga menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rembang akan meningkatkan infrastruktur pendukung industri pengolahan,

mempermudah akses pasar bagi produk lokal, serta memperkuat sistem logistik dan distribusi. Sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik lokal, peningkatan sarana dan prasarana wisata, serta promosi yang lebih masif guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan sektor ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.

Selain ekonomi, perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan dan pelestarian budaya daerah. Pemerintah akan mengoptimalkan potensi budaya sebagai bagian dari sektor pariwisata dan industri kreatif dengan mendukung kegiatan seni dan budaya, festival daerah, serta pelestarian warisan budaya yang menjadi identitas khas Kabupaten Rembang. Dengan demikian, selain menjadi daya tarik wisata, budaya daerah juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.

Meningkatkan kualitas perlindungan sosial juga menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus memperkuat program jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan kebijakan perlindungan tenaga kerja informal. Dengan adanya perlindungan sosial yang lebih baik, diharapkan ketimpangan sosial dapat dikurangi dan masyarakat memiliki jaminan kesejahteraan yang lebih baik.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor pertanian dan perikanan, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Berbagai program peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan akan dijalankan, seperti modernisasi alat produksi, peningkatan akses permodalan bagi petani dan nelayan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani dan nelayan. Selain itu, pemerintah akan mendorong pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di sektor ini.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan utama dalam menjalankan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sementara pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Rembang akan selalu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi. Digitalisasi sistem pemerintahan juga akan ditingkatkan agar pelayanan lebih cepat, efisien, dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas.

Sedangkan untuk aspek pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang akan memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan penguatan inovasi, seperti penerapan *e-government* dan pelayanan digital, akan dikembangkan lagi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan tanpa harus mengalami proses yang berbelit-belit. Selain itu, evaluasi dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) juga akan dilakukan agar pelayanan dapat berjalan lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, terciptanya kerukunan sosial, agama, ras, maupun kelompok masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah akan terus mengembangkan program-program yang memperkuat toleransi antar umat beragama, membangun dialog antarbudaya, serta mendorong kerja sama antarkelompok masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang

harmonis dan damai. Pendidikan tentang nilai-nilai kebhinekaan juga akan diperkuat di berbagai lapisan masyarakat agar perbedaan yang ada dapat menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih maju dan inklusif.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, peningkatan ketenteraman dan perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Rembang akan bekerja sama dengan aparat keamanan serta berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan yang berbasis partisipasi warga. Program-program seperti peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), optimalisasi sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta percepatan penanganan bencana dan konflik sosial akan terus dikembangkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman, tenteram, dan terbebas dari ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak pada pertumbuhan investasi serta konektivitas wilayah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam beberapa tahun ke depan. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis akan dilakukan untuk memastikan infrastruktur yang tersedia mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara optimal.

Salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan jalan, jembatan, irigasi, serta drainase yang menjadi kewenangan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus melakukan perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan guna meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, terutama di daerah yang masih terisolasi. Selain itu,

perbaikan sistem irigasi akan menjadi perhatian utama untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sistem drainase yang baik juga akan terus dikembangkan guna mengurangi risiko banjir, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Selain pembangunan infrastruktur transportasi dan pengairan, pemenuhan kebutuhan air minum yang layak serta infrastruktur dasar bagi masyarakat juga menjadi prioritas penting. Pemerintah Kabupaten Rembang akan memperluas cakupan layanan air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses. Program pembangunan dan rehabilitasi jaringan perpipaan, penyediaan sumur bor, serta pengelolaan air limbah yang lebih baik akan terus dikembangkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih secara merata.

Adapun untuk mendukung konektivitas yang lebih luas, peningkatan kualitas jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah juga akan menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Rembang akan mengembangkan sistem transportasi yang lebih efisien dengan memperbaiki infrastruktur terminal, halte, dan akses jalan menuju kawasan ekonomi, pariwisata, serta pusat industri. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor perdagangan dan investasi.

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Mewujudkan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan daerah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap selaras dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis akan diterapkan guna meningkatkan kualitas

pengelolaan lingkungan hidup serta menurunkan ancaman dan risiko bencana.

Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Rembang. Pemerintah akan memperkuat regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta mengembangkan program rehabilitasi lahan kritis dan konservasi hutan. Selain itu, upaya pengelolaan limbah dan pengurangan pencemaran lingkungan akan terus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap industri dan pola konsumsi masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

Menurunnya ancaman dan risiko bencana juga menjadi tujuan utama dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Kabupaten Rembang menghadapi berbagai potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang efektif. Pemerintah akan mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta memperkuat infrastruktur tanggap bencana seperti tanggul, embung, dan saluran drainase. Selain itu, pengelolaan kawasan rawan bencana akan dilakukan secara terpadu untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Kabupaten Rembang dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Selain sebagai Langkah-langkah strategis dan operasional untuk pencapaian visi, misi juga disusun dan dirumuskan untuk menjawab isu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Rembang. Keterkaitan antara isu strategis Pembangunan jangka menengah dengan misi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Rumusan Misi	
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
Pengentasan Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran) serta Penanganan masalah Kesenjangan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia	2.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan
Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Implementasi <i>City Branding</i>		
Peningkatan Ketahanan Pangan		
Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah	4.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim	5.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2025-2029	No Misi	Misi RPJPD 2025-2045
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	1.	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif

No Misi	Misi RPJMD 2025-2029	No Misi	Misi RPJPD 2025-2045
2.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan	2.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inovatif dan Produktif
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional	3.	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien
4.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	5.	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan
5.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	4.	Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Untuk keterkaitan misi jangka menengah Kabupaten Rembang dengan misi jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.4
Keterkaitan Misi Jangka Menengah Kabupaten Rembang dengan Misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah

Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	Misi 1: Transformasi Sosial,
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan	Misi 2: Transformasi Ekonomi
	Misi 3: Transformasi Tata Kelola,

Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional	Misi 4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,
	Misi 5; Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Misi 6: Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan
	Misi 7: Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Misi 8: Kestinambungan Pembangunan

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Rembang periode 2025-2029. Tujuan merujuk pada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna mewujudkan visi, mengimplementasikan misi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Rumusan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing

Terdapat 2 (dua) tujuan yang akan mendukung pelaksanaan misi pertama ini. Kedua tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan1; Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, memiliki daya saing tinggi, serta produktif.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan.
 - 2) Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat secara menyeluruh.
 - 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara paripurna didukung dengan pengembangan akses pelayanan kesehatan.
2. Tujuan 2; Mewujudkan upaya pengendalian penduduk, serta pembangunan yang responsif terhadap keadilan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga serta pengendalian penduduk
- 2) Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak

b. Misi 2; Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan

Tujuan dalam mendukung misi ini adalah: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan yang

berkelanjutan dengan pengembangan sektor unggulan. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya realisasi investasi dalam mendukung peningkatan produktivitas daerah.
- 2) Meningkatnya daya saing dan produktivitas usaha mikro, kecil dan koperasi serta perdagangan.
- 3) Meningkatnya produktivitas industri pengolahan.
- 4) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, pemajuan kebudayaan dan sektor ekonomi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin.
- 6) Meningkatnya taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dan juga perikanan.
- 7) Meningkatnya Ketahanan Pangan

c. Misi 3; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional

Tujuan yang dirumuskan untuk mendukung misi ini adalah: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital. Adapun sasarannya meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan *e-government*.
- 2) Meningkatnya kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 4) Terciptanya kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat.
- 5) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana daerah.
- 6) Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.

d. Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tujuan yang akan mendukung pelaksanaan misi keempat ini adalah: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dalam mendukung investasi dan aktivitas masyarakat. Sasaran yang ingin diwujudkan melalui tujuan ini yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan air baku, jalan, jembatan, irigasi, drainase serta layanan dasar kewenangan kabupaten yang merata.
- 2) Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi.
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

e. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan yang akan mendukung pelaksanaan misi keempat ini adalah: Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Cascading Visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
Visi: Mewujudkan Rembang Sejahtera				
Misi 1; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing				
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, memiliki daya saing tinggi, serta produktif guna mendukung		Indeks Pembangunan Manusia		

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
pembangunan yang berkelanjutan				
	1 Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah		
		Persentase lembaga DIKMAS yang terakreditasi A APK PAUD 3-6 Tahun APM SD/MI/ sederajat APM SMP/MTs/ sederajat % Desa Vokasi % Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompetensi % Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % Lembaga PAUD yang terakreditasi A % Lembaga SD yang terakreditasi A % Lembaga SMP yang terakreditasi A % Partisipasi Warga negara usia 7- 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	2 Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat secara menyeluruh	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		% Peningkatan Perpustakaan Yang Aktif (Cakupan pelayanan umum perpustakaan)	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
	3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara paripurna didukung dengan pengembangan akses pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)		
		Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Persentase Puskesmas memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang memadai	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat essensial di puskesmas		
		Cakupan desa siaga mandiri	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan	
Mewujudkan upaya Pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta pembangunan yang responsif terhadap keadilan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			
		Laju Pertumbuhan Penduduk			
		Indeks Ketimpangan Gender			
		Indeks Perlindungan Anak			
	1	Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga serta pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Keluarga		
			Indeks Kualitas Keluarga		
			Total Fertility Rate (TFR)		
			Persentase Ketersediaan Dok Informasi Kependudukan dan KB	Program Pengendalian Penduduk	Daldu KB
			Persentase Kerjasama yang mendukung Pendidikan kependudukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Daldu KB
			Persentase Penggunaan KB MKJP		Daldu KB
			ASFR 15-19 Tahun		
			Persentase Unmet Need KB	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Daldu KB
			Cakupan PIK-R yang aktif		
			Cakupan anggota BKB ber KB		
			Cakupan anggota BKL yang ber KB		
		Cakupan anggota BKR ber KB			
		Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB			

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
	2 Meningkatkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemenuhan Hak Anak Indeks Perlindungan Khusus Anak		
		Persentase industri perempuan (IR) yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha	Program Pengarus-Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	PPPA
		Persentase Lembaga Pengarusutamaan Gender dan PUHA yang Kuat dan Kembangkan		
		Persentase cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	PPPA
		Persentase Kelp. Perlindungan Anak Desa/ Kelurahan	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	PPPA
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	PPPA
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		PPPA
Misi 2; Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan				

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan	
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan yang berkelanjutan dengan pengembangan sektor unggulan.		Pertumbuhan Ekonomi			
		Tingkat Kemiskinan			
		PDRB per kapita			
	1	Meningkatnya realisasi investasi dalam mendukung peningkatan produktivitas daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB		
			Jumlah perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/ insentif penanaman	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman modal
			Pertumbuhan investor	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman modal
			% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman modal
			% penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP		
	2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas usaha mikro, kecil dan koperasi berbasis potensi lokal.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
		% KSP/USP memiliki IUSP	Program Penilaian	Koperasi dan UMKM	

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			Kesehatan KSP/USP Koperasi	
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UMKM
		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UMKM
		Pertumbuhan aset koperasi Pertumbuhan jumlah modal sendiri koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi dan UMKM
		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Program Pengembangan UMKM	Koperasi dan UMKM
		% cakupan pasar sesuai peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	perdagangan
		% kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan
		Pertumbuhan ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Perdagangan
		% produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan retail modern	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan
	3 Meningkatkan produktivitas industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan		
		Pertumbuhan usaha industri	Program Perencanaan dan	Perindustrian

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			Pembangunan Industri	
		% usaha industri yang memiliki ijin usaha	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Perindustrian
	4 Meningkatkan perhatian dan pengembangan terhadap potensi budaya daerah	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)		
		Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan		
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		
		% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan
		Pertumbuhan kualitas SDM Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pariwisata
		Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pariwisata
		Pertumbuhan usaha Ekraf bidang Pariwisata yang memperoleh HAKI	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
		Pertumbuhan usaha Ekraf bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui	Pariwisata

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		yang memperoleh HAKI	Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	
		Pertumbuhan Pelaku Ekraf Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		Pertumbuhan SDM Tenaga Kerja Pariwisata yang berkompeten	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
	5 Meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
		Persentase PSKS yang dapat melaksanakan UKS	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Persentase Kemandirian PPKS	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
		Persentase Kemandirian FM	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
		Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja
		% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga kerja
	6 Meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dan juga perikanan	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan dan hortikultura Pertumbuhan produksi produksi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	Pertanian

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		tanaman perkebunan		
		Pertumbuhan populasi ternak		
		% sarana pertanian dalam kondisi baik		
		Pertumbuhan produksi tembakau berkualitas baik		
		% prasarana peternakan dalam kondisi baik		
		indeks pertanaman		
		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
		Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan
		Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan
		Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan
	7	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
		% Ketercukupan kebutuhan beras sesuai angka kecukupan gizi	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pangan
		Nilai ketersediaan energi per kapita		
		Nilai konsumsi energi per kapita	Penanganan Kerawanan Pangan	
		Persentase penanganan kasus kerawanan pangan		
Misi 3; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.		Indeks reformasi Birokrasi		
		Opini Laporan Keuangan BPK		
	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan <i>e-government</i>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
			Indeks Kematangan Organisasi	
			Nilai SAKIP	
			Indeks Perencanaan Pembangunan (hasil penilaian Mandiri)	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	
			Opini Laporan Keuangan BPK	
	Nilai Maturitas SPIP			

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Indeks Reformasi Hukum		
		Indeks Pengelolaan Pertanahan		
		% cakupan pelayanan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo
		Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kominfo
		Indeks Perencanaan Strategis		
		Indeks teknologi, informasi dan komunikasi		
		Indeks penyelenggaraan		
		Indeks penerapan manajemen		
		Indeks pelaksanaan audit TIK		
		Indeks layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik		
		Indeks layanan publik berbasis elektronik		
		Nilai IKM OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan
		Nilai SAKIP OPD		
		Indeks Manajemen Risiko OPD		
		% Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Urusan penunjang pemerintahan bidang Kesra

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		% Rumusan Bahan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat		
		% Cakupan pengamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian
		Persentase publikasi data statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Persentase capaian indikator urusan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan
		Persentase tingkat kepuasan PD dalam pemanfaatan Informasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah		
		Persentase tingkat harmonisasi Perencanaan rumpun Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan
		Rata-rata Nilai Perencanaan Kinerja rumpun Perekonomian dan SDA Persentase tingkat harmonisasi Perencanaan Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan		

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Persentase tingkat harmonisasi Perencanaan rumpun Perekonomian dan SDA		
		Rata-rata Nilai Perencanaan Kinerja Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Rata-rata Nilai Perencanaan Kinerja rumpun Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
		% OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Kearsipan
		% Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah
		% Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang telah ditetapkan		
		% Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan Tepat Waktu		
		% kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD		
		% Peningkatan Wajib Pajak Daerah	Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		% Realisasi Penerimaan PAD		
		% harmonisasi perencanaan pendapatan transfer		
		% Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang telah sesuai rekomendasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Urusan penunjang pemerintahan bidang pengawasan (Inspektorat)
		% Penurunan temuan berulang hasil pemeriksaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Urusan penunjang pemerintahan bidang pengawasan (Inspektorat)
		% Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
		% Kepemilikan KIA		
		% Kepemilikan KK		
		% kepemilikan KTP - El		
		Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pertanahan
	2 Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	Indeks Profesionalitas ASN		
		Indeks Pelayanan Publik		
		Persentase Perencanaan	Program Kepegawaian Daerah	Urusan penunjang pemerintahan

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi		n bidang kepegawaian
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
		Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya		
		Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik		
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Pengembangan SDM Aparatur	
	3 Meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah		
		Persentase implementasi Riset dan Pengembangan yang mendukung perencanaan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Litbang
		Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan		
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Litbang
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
	4 Terciptanya kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat	Indeks Harmoni		
		Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
	5 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana daerah	Indeks Rasa Aman		
		Indeks Risiko Bencana (IRB)		
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tramtibum
		Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah		
		Kecamatan yang kondusif		

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Damkar	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tramtibum
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang		
			% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Sosial
			% penanganan kejadian bencana		
			Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	Program Penanganan Bencana	Sosial
			% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Satpol PP
			% penanganan kejadian bencana		
	6	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa		
			Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdes
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan					
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur merata yang mendukung investasi dan aktivitas masyarakat			Indeks Infrastruktur		
	1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan air baku, jalan, jembatan, irigasi, drainase serta layanan dasar	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Persentase ketersediaan Air Baku		

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
	kewenangan kabupaten yang merata.			
		Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
		Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
		Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR
		Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
		Persentase Rumah terdampak bencana / relokasi	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Permukiman
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	2 Meningkatkan kualitas jaringan transportasi yang menjangkau semua wilayah.	Indeks Konektivitas		
		Persentase Lalu lintas berkeselamatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Perhubungan

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Permukiman
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di kawasan kumuh		
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan				
Meningkatkan Kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq)	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
	1	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	
			Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Lingkungan Hidup

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Persentase Luas RTH Baru/ Terfasilitasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup
		Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	ESDM
		Porsi EBT dalam Bauran Energi		

Rincian dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerja dan targetnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Rembang
Beserta Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026-2030

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Misi 1; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing												
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, memiliki daya saing tinggi, serta produktif		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,53	72,92	73,31	73,7	74,09	74,46	74,85	74,85	
	1	Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,3	12,35	12,4	12,45	12,5	12,54	12,58	12,58
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,73	8,14	8,55	8,96	9,37	9,78	10,19	10,19	
2	Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat secara menyeluruh	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	58,74 (th 2023)	64,24	69,74	75,24	80,74	86,24	91,74	91,74	

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara paripurna didukung dengan pengembangan akses pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,77	75,07	75,37	75,67	75,97	76,26	76,56	76,86
Mewujudkan upaya pengendalian penduduk, serta pembangunan yang responsif terhadap keadilan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	62,78	63,63	64,47	65,32	66,16	67	67,85	79,66
			Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,82	0,8	0,78	0,76	0,74	0,72	0,7	0,7

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Indeks Ketimpangan Gender (IPG)	Angka	0,265	0,256	0,247	0,238	0,229	0,22	0,211	0,211
		Indeks Perlindungan Anak	Angka	64,67 (th 2022)	65,17	65,67	66,17	66,67	67,17	67,67	67,67
	1	Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga serta pengendalian penduduk	Angka	62,7	63,45	64,2	64,95	65,7	66,47	67,22	67,22
		Indeks Kualitas Keluarga	Angka	76,2	77,15	77,56	77,98	78,3	78,45	78,88	78,88
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2,04	2,02	2	1,98	1,96	1,94	1,92	1,92
	2	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan	Angka	88,03	88,53	89,03	89,53	90,03	90,53	91,03	91,03
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	88,03	88,53	89,03	89,53	90,03	90,53	91,03	91,03

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	perempuan dan anak											
		Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67,34	67,78	68,29	68,88	69,55	70,29	71,12	71,12	71,12
		Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	62,5 (th 2022)	65,2	67,9	70,6	73,3	76	78,7	78,7	78,7
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	78,92 (th 2022)	80,42	81,92	83,42	84,92	86,42	87,92	87,92	87,92
Misi 2; Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan												
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan yang berkelanjutan dengan pengembangan sektor unggulan.		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,08	5,14	5,20-6,00	5,40-6,20	5,60-6,40	5,80-6,60	6,00-6,80	6,00-6,80	6,00-6,80

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		PDRB per Kapita	Juta Rp.	38,77	46,45	54,13	61,81	69,49	69,5	77,18	77,18	
		Tingkat Kemiskinan	%	14,02	12,81	12,14	11,48	10,81	10,14	9,47	9,47	
	1	Meningkatnya realisasi investasi dalam mendukung peningkatan produktivitas daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB	%	22,54	23,44	23,73	24,02	24,31	24,6	24,9	24,9
	2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas usaha mikro, kecil dan koperasi serta perdagangan	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	4,35	5,17	5,2	5,23	5,27	5,3	5,33	5,33
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%		2,41	3,01	3,62	4,22	4,82	5,42	5,42
			Rasio PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran;	%	13,05	13,07	13,09	13,11	13,13	13,15	13,17	13,17

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
	3	Meningkatnya produktivitas industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	24,39	24,84	25,12	25,4	25,67	25,95	26	26
	4	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata, Pemajuan Kebudayaan dan Sektor Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	%		81,68	82,1	82,51	82,92	83,34	83,75	83,75
			Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan	%	3,64	3,76	3,88	4	4,12	4,24	4,36	4,36
			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp		2409842	2924128	3438413	3952699	446985	4981270	4981270

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	5	Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	2,76	2,64	2,52	2,43	2,3	2,21	2,1	2,1
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,84	2,53-2,23	2,48-2,18	2,43-2,13	2,38-2,08	2,34-2,04	2,29-1,99	2,29-1,99
	6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dan juga perikanan	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,5
	7	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,85	84,88	85,1	85,34	85,58	85,82	86,06	86,06
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%		8,47	8,15	7,85	7,55	7,25	6,95	6,95
Misi 3; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional												

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,72	70,34	70,82	71,3	71,78	72,27	72,75	72,75
		Opini Laporan Keuangan BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,99	4,01	4,03	4,05	4,07	4,09	4,11	4,11

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>government</i>											
		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	38,03	41,53	45,03	48,53	52,03	55,53	59,03	59,03	59,03
		Indeks Perencanaan Pembangunan (hasil penilaian Mandiri)	Indeks	7,2	7,25	7,3	7,35	7,4	7,45	7,5	7,5	7,5
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks	71,61	72,1	72,58	72,89	73,11	73,35	73,7	73,7	73,7
		Nilai SAKIP	Angka	78,4	80,19	83,00	84,32	85,74	87,30	88,90	88,9	88,9
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	74,328	75,5578	76,7878	78,0178	79,2478	80,4778	81,7078	81,7078	81,7078
		Nilai Maturitas SPIP	Angka	3,007	3,009	3,014	3,019	3,025	3,033	3,039	3,039	3,039
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	66,97	67,97	69,07	70,17	71,27	72,38	73,48	73,48	73,48

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Indeks Pengelolaan Pertanahan	Angka	44,64	45,46	46,28	47,1	47,93	48,74	49,56	49,56
	2	Meningkatnya kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	Indeks	77,24	79,74	82,24	84,74	87,24	89,74	92,24	92,24
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,39	4,45	4,48	4,51	4,53	4,56	4,59	4,59
	3	Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks	58,32	61,82	65,32	68,82	72,32	75,82	79,32	79,32

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	4	Terciptanya kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat	Indeks Harmoni	Angka								
	5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana daerah	Indeks Rasa Aman	%	74,56	75,02	75,25	75,8	76,06	76,45	77,1	77,1
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	74.96	71.00	67.00	63.00	59.00	55.00	50.00	50.00
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,65	0,69	0,73	0,77	0,81	0,85	0,89	0,89
	6	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa	Angka								
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan												

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dalam mendukung investasi dan aktivitas masyarakat		Indeks Infrastruktur	Angka	67,4	69,9	72,4	74,9	77,4	79,9	82,4	82,4
	1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan air baku, jalan, jembatan, irigasi, drainase serta layanan dasar kewenangan kabupaten	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	36,745	40	43,5	47,5	51,75	56,25	61	61

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	yang merata.											
		Persentase ketersediaan Air Baku	%	40,43	44,21	49,48	54,75	60,02	65,29	69,56	69,56	69,56
	2	Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi	Angka	58,77	61	64	67	70	73	76,5	76,5	76,5
	3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	98.01	98.11	98.21	98.31	98.41	98.51	98.61	98.61	98.61
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan												
Meningkatkan Kualitas		Indeks Kualitas Lingkungan	Angka	66,52	76,15	76,32	76,49	76,66	76,83	77,00	77,00	77,00

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Hidup (IKLH)									
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO2eq)	Indeks	NA	1.829.049,37	3.026.942,44	4.224.835,52	5.422.728,59	6.620.621,67	7.818.514,74	7.818.514,74
	1 Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	52,86	73,53	73,73	73,93	74,13	74,33	74,53	74,53
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	90,17	86,11	86,31	86,51	86,71	86,91	87,11	87,11
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	48,23	65,21	62,28	62,34	62,41	62,48	62,55	62,55

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Rembang

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan upaya atau cara untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing		
Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, memiliki daya saing tinggi, serta produktif		
1. Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal, Peningkatan pemerataan jumlah dan kualitas guru pada setiap satuan pendidikan, Peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan, peningkatan peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang baik untuk mendukung peningkatan partisipasi sekolah, peningkatan pembelajaran inklusif pada setiap satuan pendidikan	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Guru dengan fokus pada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dengan fokus pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang memiliki sarana dan prasarana rusak berat. 3. Peningkatan peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang kondusif dengan fokus kecamatan yang memiliki jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dengan memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi	
2. Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat secara menyeluruh	Meningkatnya budaya literasi masyarakat melalui pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan serta taman bacaan berbasis masyarakat	Peningkatan peran perpustakaan dalam mendukung kemampuan literasi masyarakat dengan prioritas pada pengembangan perpustakaan dan taman baca masyarakat
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara paripurna didukung dengan pengembangan akses pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi, Penguatan Pola Hidup Bersih dan Sehat masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala, penyediaan tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap layanan, kampanye kesehatan masyarakat melalui penciptaan kesadaran menggunakan media sosial dan kampanye publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang belum terakreditasi paripurna. 2. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas dengan fokus pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang kekurangan tenaga kesehatan.
	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan kemandirian	Penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; peningkatan keterjangkauan pangan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pangan, diversifikasi bahan pangan, penyediaan cadangan pangan, penanganan kawasan rawan pangan, dan pengawasan peredaran bahan pangan	yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial); serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi.
Tujuan 2: Mewujudkan upaya pengendalian penduduk, serta pembangunan yang responsif terhadap keadilan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga		
1. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga serta pengendalian penduduk	Meningkatkan keterampilan Keluarga melalui penguatan dalam perencanaan keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, komunikasi efektif dalam keluarga, pengasuhan anak dan pelatihan keterampilan kepada anggota keluarga, terutama ibu rumah tangga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dalam Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) keluarga dengan fokus pada pemberian bantuan subsidi dan akses keuangan untuk keluarga berpendapatan rendah dan mendorong keluarga. 2. Penguatan dalam Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) keluarga dengan fokus pada pemberian bantuan subsidi dan akses keuangan untuk keluarga berpendapatan rendah dan mendorong keluarga.
	Meningkatkan keterampilan keluarga melalui penguatan dalam perencanaan keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, komunikasi efektif dalam keluarga, pengasuhan anak dan pelatihan keterampilan kepada anggota keluarga, terutama ibu rumah tangga.	Penguatan ketahanan keluarga dengan fokus peningkatan kesadaran akan peran keluarga, pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan fasilitas perlindungan sosial keluarga
	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana yang berkualitas	Peningkatan pengendalian penduduk dengan fokus kebijakan pada penyediaan alkon dan pelayanan KB yang komprehensif
2. Meningkatkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak melalui fasilitas pelayanan kesehatan untuk perempuan dan anak, pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling dan dukungan psikososial	Penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak dengan fokus pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk perempuan dan anak, pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling dan dukungan psikososial
	1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perluasan kewirausahaan untuk	Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan kompetensi perempuan.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	perempuan, pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan dan perlindungan dalam dunia kerja	
	2. Meningkatkan efektivitas Pencegahan dan penanggulangan kekerasan pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT melalui Kampanye Kesadaran tentang eksploitasi seksual, peningkatan penegakan hukum dan pengembangan aplikasi dan sistem pengaduan serta penghapusan eksploitasi dan perdagangan manusia	1. Peningkatan efektivitas perlindungan anak dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak dan penanganan kekerasan terhadap anak. 2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada anak korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum.
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan		
Tujuan 1: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan yang berkelanjutan dengan pengembangan sektor unggulan		
1. Meningkatnya realisasi investasi dalam mendukung peningkatan produktivitas daerah	1. Meningkatkan realisasi investasi melalui penyederhanaan dan perbaikan proses regulasi investasi melalui perizinan investasi yang mudah dan cepat, penyusunan kebijakan yang mendukung investasi dalam sektor-sektor unggulan dan pemberian berbagai insentif bagi investor	1. Peningkatan kemudahan akses perizinan investasi dengan fokus pada PMA dan investor nasional. 2. Pemberian insentif kepada investor dengan fokus pada investor dengan usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
	2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas yang mendukung penanaman modal melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, ketersediaan pasokan energi yang stabil dan terjangkau dan penyiapan kawasan industri dengan fasilitas yang memadai	Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung penanaman modal dengan fokus pada perbaikan infrastruktur transportasi dan ketersediaan pasokan energi.
2. Meningkatnya daya saing dan produktivitas usaha mikro,	1. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan	1. Peningkatan akses permodalan UMKM dengan fokus pada usaha mikro dan kecil.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>kecil dan koperasi serta perdagangan</p>	<p>pendidikan kewirausahaan, pendampingan UMKM, peningkatan akses ke pembiayaan, inovasi dan pengembangan produk, peningkatan <i>branding</i> dan pemasaran serta pengembangan dukungan digitalisasi UMKM.</p>	<p>2. Penguatan kapasitas UMKM dengan fokus pada inovasi pemasaran dan pengelolaan usaha mikro dan kecil.</p>
	<p>2. Pemberdayaan koperasi melalui pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi, penguatan sistem pembiayaan dan permodalan koperasi, kolaborasi antar koperasi dan UMKM, digitalisasi koperasi dan peningkatan peran koperasi dalam ekonomi lokal.</p>	<p>Penguatan koperasi dengan fokus pada penguatan sistem pembiayaan dan permodalan koperasi, kolaborasi antar koperasi dan UMKM</p>
<p>3. Meningkatnya produktivitas industri pengolahan</p>	<p>1. Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan melalui pengembangan infrastruktur yang memadai, penyediaan kawasan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi, serta menyediakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal agar siap bersaing. Selain itu, mempermudah akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah, serta membuka akses pasar domestik dan internasional melalui pemasaran digital.</p>	<p>1. Peningkatan akses permodalan dan pemasaran bagi industri kecil dan menengah dengan fokus pada industri kecil berbasis potensi lokal dan industri kecil berorientasi ekspor.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas industri kecil dengan fokus pada proses produksi dan manajemen usaha</p>
	<p>2. Penguatan sektor perdagangan melalui peningkatan infrastruktur pasar, mendorong digitalisasi</p>	<p>1. Peningkatan daya tarik pasar tradisional dengan fokus pada pasar-pasar di kawasan wisata.</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>pasar dan perdagangan lokal, kemitraan dan kolaborasi antara pedagang dan UMKM, pengembangan pasar wisata dan produk lokal dan promosi dan pemasaran produk lokal dengan mengadakan <i>event</i>, festival, atau <i>bazaar</i>.</p>	<p>2. Peningkatan pemasaran produk unggulan lokal dengan fokus pada pasaran regional dan internasional (ekspor).</p>
<p>4. Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata, Pemajuan Kebudayaan dan Sektor Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Meningkatkan kelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda melalui peningkatan pendidikan dan literasi seni budaya, integrasi pendidikan seni dan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan di sekolah, <i>workshop</i> kesenian dan festival budaya daerah, pembangunan pusat kebudayaan daerah, perbaikan dan pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan fasilitas seni di ruang publik, peningkatan promosi dan apresiasi seni dan budaya daerah, pemberian apresiasi seni dan penghargaan untuk seniman lokal, promosi melalui media sosial dan digital dan pengembangan produk seni dan budaya daerah, pelestarian dan pengembangan kearifan lokal melalui kampanye pelestarian tradisi dan kearifan lokal, pemberdayaan komunitas seni lokal, menghidupkan tradisi lokal dan mendorong industri kreatif lokal.</p>	<p>Peningkatan potensi budaya untuk mendukung perekonomian masyarakat dengan prioritas pada pelestarian dan pengembangan seni tradisional seperti batik Lasem, wayang, dan musik tradisional sebagai aset ekonomi kreatif yang berdaya saing. Selain itu, pemerintah akan mendorong penguatan industri pariwisata budaya dengan memperbaiki infrastruktur destinasi wisata berbasis sejarah dan religi, seperti Makam Sunan Bonang dan Kota Tua Lasem, serta mengadakan festival budaya secara berkala untuk menarik wisatawan.</p>
	<p>Meningkatkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas penginapan, restoran, serta tempat</p>	<p>1. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dengan fokus pada kawasan pariwisata unggulan daerah.</p> <p>Peningkatan penyediaan akomodasi makan dan minum dengan fokus pada inovasi pengembangan daya tarik layanan.</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	wisata yang mendukung kenyamanan wisatawan. Pengembangan inovasi dan <i>branding pariwisata</i> dalam memberikan dan menawarkan layanan yang lebih menarik, baik dari segi fasilitas, kenyamanan, maupun keunikan wisata lokal.	
5. Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada PPKS melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas, baik di sekolah reguler maupun pendidikan khusus, pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas program bantuan sosial melalui perluasan program bantuan untuk keluarga miskin dan pemberian bantuan untuk penyandang disabilitas.</p> <p>3. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat rentan melalui pelatihan keterampilan untuk masyarakat miskin, pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.</p>	<p>Peningkatan cakupan layanan kepada PPKS di luar panti dengan fokus pada pemberian akses pendidikan dan kaum difabel.</p> <p>Perluasan program bantuan sosial dengan fokus pada bantuan pangan non tunai kepada kelompok rentan.</p> <p>Peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan fokus pada pengembangan wirausaha.</p>
6. Meningkatnya taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dan juga perikanan	Meningkatnya kualitas hidup pelaku usaha pertanian dan perikanan melalui modernisasi dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, penguatan infrastruktur dan akses pasar, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, serta diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan.	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan, mendorong penggunaan teknologi modern, serta penguatan hilirisasi industri disektor pertanian dan perikanan
7. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah melalui pemberdayaan pertanian	Peningkatan ketahanan pangan melalui penyedia sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi,

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan perikanan, serta penguatan jaringan distribusi	dan penguatan jaringan distribusi, serta memastikan kecukupan kebutuhan pangan daerah
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional		
Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.		
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan <i>e-government</i>	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan sistem <i>e-government</i> yang terintegrasi, inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan, penguatan keamanan data dan privasi pengguna.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada penguatan jaringan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital.
	2. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah, pelaporan keuangan, dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan pada perangkat daerah.	Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dengan fokus pada pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan.
	3. menguatkan reformasi hukum melalui penyusunan kebijakan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Penguatan formulasi kebijakan dan penyusunan produk hukum daerah dengan fokus pada penggantian atau revisi produk hukum daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah saat ini.
2. Meningkatnya kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan peningkatan sarana pelayanan dan	Peningkatan kinerja pelayanan publik dengan fokus pada <i>Mall</i> Pelayanan Publik

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>pelayanan masyarakat</p>	<p>pengaduan pelayanan yang responsif.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur melalui akurasi perencanaan kebutuhan ASN, rekrutmen ASN yang akuntabel, dan pengembangan jenjang karier ASN berdasarkan sistem merit.</p>	<p>peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN dan Kompetensi ASN dengan fokus pada kebutuhan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.</p>
<p>3. Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah</p>	<p>Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan melalui identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangannya serta identifikasi kebutuhan inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan penelitian dan kembangan dan identifikasi kebutuhan inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fokus pada inovasi pelayanan publik dan <i>smartcity</i>.</p>
<p>4. Terciptanya kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat</p>	<p>Meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama melalui optimalisasi FKUB, dan mendorong tokoh-tokoh agama untuk memberikan teladan menanamkan nilai-nilai saling menghargai perbedaan sejak dini, baik di sekolah maupun di masyarakat; Peningkatan silaturahmi antar kelembagaan melalui memperkuat dialog antar kelompok dengan forum-forum terbuka yang mengedepankan saling pengertian dan toleransi.</p>	<p>Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan antar lembaga kemasyarakatan untuk mengurangi konflik SARA dengan fokus pada wilayah-wilayah rawan konflik SARA</p>
<p>5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanganan bencana daerah</p>	<p>Meningkatkan intensitas dan efektivitas ketentraman dan perlindungan masyarakat melalui upaya memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; Penguatan kehadiran aparat keamanan dan memperkuat sistem patroli dan pemantauan, terutama di daerah-daerah</p>	<p>1. Peningkatan koordinasi dan patroli dengan aparat keamanan dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan fokus pada koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah kecamatan dan desa.</p> <p>2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban dan rasa aman masyarakat dengan fokus pada wilayah-wilayah yang rawan kejahatan dan rawan pelanggaran.</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	rawan pelanggaran perda/perkada.	
	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; Penguatan kelembagaan bencana tingkat kecamatan; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana dengan fokus pada lembaga pemkot yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan dengan lembaga swasta dan masyarakat. 2. Penguatan kelembagaan bencana dengan fokus pada lembaga di tingkat kecamatan dan desa.
6. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatkan kemajuan desa melalui enam dimensi kunci: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan		
Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dalam mendukung investasi dan aktivitas masyarakat		
1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan air baku, jalan, jembatan, irigasi, drainase serta layanan dasar kewenangan kabupaten yang merata.	1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan air baku, jalan, jembatan, irigasi, drainase serta layanan dasar kewenangan kabupaten yang merata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan fokus pada jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak berat. 2. Pembangunan jalan dan jembatan baru dengan fokus pada jalan antar kecamatan dan poros desa yang belum memadai. 3. Intensifikasi pengawasan jalan dan jembatan dengan fokus pada wilayah rawan bencana.
	2. Meningkatkan ketersediaan air baku untuk pertanian melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten sekitar dan perbaikan sistem irigasi kewenangan kabupaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama dengan kabupaten sekitar dalam penyediaan air baku pertanian dengan fokus pada pengelolaan bersama sumber air baku dengan kabupaten sekitar. 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas irigasi kewenangan kabupaten dengan fokus pada lahan pertanian sawah yang belum memiliki saluran irigasi atau saluran irigasi dalam kondisi rusak.
	3. meningkatkan kualitas dan ketersediaan sanitasi aman melalui identifikasi wilayah dengan sanitasi buruk dan pembangunan	Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat dengan fokus pada pemukiman kumuh dan padat penduduk serta wilayah dengan sanitasi kurang baik.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	sanitasi berbasis masyarakat.	
	4. Meningkatkan ketersediaan air minum layak melalui peningkatan akses layanan air minum perpipaan.	Peningkatan dan perluasan cakupan layanan air minum dengan fokus pada wilayah kecamatan yang belum terjangkau pelayanan air minum.
2. Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi	Meningkatkan ketersediaan sarana perhubungan yang berkualitas secara bertahap.	penyediaan sarana transportasi dengan fokus pada daerah yang belum terjangkau sarana transportasi umum.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Meningkatkan jumlah rumah layak huni melalui pemberian bantuan sosial untuk pemugaran rumah keluarga miskin dan peningkatan efektivitas pemanfaatan dana CSR.	Peningkatan efektivitas program bantuan perumahan dan program bantuan CSR untuk pemugaran rumah dengan fokus pada rumah keluarga miskin yang masuk dalam daftar pemugaran
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		
1. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, serta pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pencemaran air dengan fokus pada sungai dan embung sebagai bahan baku air minum. 2. Peningkatan konsistensi implementasi RPPLH dengan fokus pada pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). 3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, serta pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan fokus pada koordinasi antara pemerintah dengan sumber pencemaran.

3.2.2. Pentahapan Pembangunan Daerah

Pentahapan pembangunan daerah di dalamnya berisi Tema Pembangunan dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Pentahapan pembangunan daerah jangka menengah daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026-2030 Dalam RPJMD Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Tema Tahunan Pembangunan Kabupaten Rembang 2026-2030				
	Tema 2026	Tema 2027	Tema 2028	Tema 2029	Tema 2030
	Tema Pembangunan:	Tema Pembangunan:	Tema Pembangunan:	Tema Pembangunan:	Tema Pembangunan:
Visi: "Mewujudkan Rembang Sejahtera"	Peningkatan Pembangunan SDM dan Perekonomian Daerah Didukung oleh Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Infrastruktur Mantap sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup.	Pengembangan Pembangunan SDM Berkualitas dan Perekonomian Daerah Didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dan Infrastruktur Mantap sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup.	Penguatan Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Perekonomian Daerah Didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Infrastruktur Mantap sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup.	Pemantapan Perekonomian Daerah dan SDM yang Unggul, Didukung Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas secara Berkelanjutan.	Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan SDM yang Produktif dan Berdaya Saing Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Modern, Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi, serta Lingkungan Hidup yang Lestari.

Misi RPJMD	Prioritas 2026	Prioritas 2027	Prioritas 2028	Prioritas 2029	Prioritas 2030
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing	Peningkatan Pembangunan SDM peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi dengan konsep "satu desa satu sarjana," serta peningkatan mutu tenaga pengajar. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, kualitas	Pengembangan SDM berkualitas Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi dengan konsep "satu desa satu sarjana," serta pengembangan mutu tenaga pengajar. Pengembangan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, kualitas tenaga medis, serta akses	Penguatan SDM berkualitas Penguatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi dengan konsep "satu desa satu sarjana," serta penguatan mutu tenaga pengajar. Penguatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, kualitas	Pemantapan SDM unggul peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi dengan konsep "satu desa satu sarjana," serta peningkatan mutu tenaga pengajar. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, kualitas	Perwujudan SDM produktif dan berdaya saing Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi dengan konsep "satu desa satu sarjana," serta peningkatan mutu tenaga pengajar. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, kualitas tenaga medis, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui

Misi RPJMD	Prioritas 2026	Prioritas 2027	Prioritas 2028	Prioritas 2029	Prioritas 2030
	tenaga medis, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui optimalisasi Puskesmas dan layanan keliling.	masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui optimalisasi Puskesmas dan layanan keliling	tenaga medis, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui optimalisasi Puskesmas dan layanan keliling	tenaga medis, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui optimalisasi Puskesmas dan layanan keliling	optimalisasi Puskesmas dan layanan keliling
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan	Peningkatan perekonomian daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan sentra produksi pangan, dan peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan obyek wisata, pemberdayaan petani dan nelayan, serta akses teknologi untuk bisnis.	Pengembangan perekonomian daerah Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, penurunan angka kemiskinan, Pengembangan sentra produksi pangan, dan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan obyek wisata, pemberdayaan petani dan nelayan, serta akses teknologi untuk bisnis.	Penguatan perekonomian daerah Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, penurunan angka kemiskinan, Penguatan sentra produksi pangan, dan penguatan ekonomi kreatif., penguatan obyek wisata, pemberdayaan petani dan nelayan, serta akses teknologi untuk bisnis.	Pemantapan perekonomian daerah Pemantapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, penurunan angka kemiskinan, pemantapan sentra produksi pangan, dan pemantapan ekonomi kreatif, pemantapan obyek wisata, pemberdayaan petani dan nelayan, serta akses teknologi untuk bisnis.	Perwujudan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Perwujudan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat melalui digitalisasi, penurunan angka kemiskinan, penguatan sentra produksi pangan yang, dan peningkatan ekonomi kreatif, penguatan obyek wisata, pemberdayaan petani dan nelayan, serta akses teknologi untuk bisnis.
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional	Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan penerapan merit sistem berbasis kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN). Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelayanan publik guna menciptakan	Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Pengembangan penerapan merit sistem berbasis kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN). Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelayanan publik guna menciptakan	Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Penguatan penerapan merit sistem berbasis kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN). Penguatan Digitalisasi Pemerintahan dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelayanan publik guna menciptakan	Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan Pemantapan penerapan merit sistem berbasis kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemantapan Digitalisasi Pemerintahan dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelayanan publik guna menciptakan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang modern Perwujudan penerapan merit sistem berbasis kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN). Perwujudan Digitalisasi Pemerintahan dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelayanan publik guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Misi RPJMD	Prioritas 2026	Prioritas 2027	Prioritas 2028	Prioritas 2029	Prioritas 2030
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan infrastruktur mantap .	transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan infrastruktur mantap	transparansi dan akuntabilitas. Penguatan infrastruktur mantap	transparansi dan akuntabilitas. Pemantapan infrastruktur berkualitas	Perwujudan infrastruktur yang merata dan terintegrasi,
	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten, membangun embung dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten Peningkatan akses terhadap air bersih, dan menyediakan lingkungan perumahan yang layak bagi masyarakat	Pemantapan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten, membangun embung dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten. Pemantapan akses terhadap air bersih, dan menyediakan lingkungan perumahan yang layak bagi masyarakat	kualitas dan kuantitas jalan kabupaten, membangun embung dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten. Penguatan akses terhadap air bersih, dan menyediakan lingkungan perumahan yang layak bagi masyarakat	Pemantapan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten, membangun embung dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten Pemantapan akses terhadap air bersih, dan menyediakan lingkungan perumahan yang layak bagi masyarakat	Perwujudan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten, membangun embung dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten Perwujudan akses terhadap air bersih, dan menyediakan lingkungan perumahan yang layak bagi masyarakat
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Peningkatan daya dukung lingkungan Hidup. Peningkatan kelestarian lingkungan. pengelolaan sampah terpadu dengan metode <i>refuse derived fuel</i> (RDF),	Pengembangan daya dukung lingkungan hidup Pengembangan kelestarian lingkungan. pengelolaan sampah terpadu dengan metode <i>refuse derived fuel</i> (RDF),	Penguatan daya dukung lingkungan hidup Penguatan kelestarian lingkungan. pengelolaan sampah terpadu dengan metode <i>refuse derived fuel</i> (RDF),	Pemantapan daya dukung lingkungan hidup Pemantapan kelestarian lingkungan. pengelolaan sampah terpadu dengan metode <i>refuse derived fuel</i> (RDF),	Perwujudan serta Lingkungan hidup yang lestari Perwujudan kelestarian lingkungan. pengelolaan sampah terpadu dengan metode <i>refuse derived fuel</i> (RDF),

3.2.3. Program Pembangunan

3.2.3.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Perumusan program prioritas juga perlu memperhatikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2025 – 2029

Misi	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2025 - 2029	Program Nomenklatur	OPD Penanggung jawab
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi dengan konsep “satu desa satu sarjana,” serta peningkatan mutu tenaga pengajar	1. Program pengelolaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2. memperbaiki sarana dan prasarana layanan kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga medis, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui optimalisasi Puskesmas dan layanan keliling.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
Misi 2 ; Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta	3. Penurunan angka kemiskinan,	1. Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Misi	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2025 - 2029	Program Nomenklatur	OPD Penanggung jawab
Mampu Mengurangi Kemiskinan			
	4. Penguatan sentra produksi pangan,	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
	5. Peningkatan ekonomi kreatif.	1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
	6. Pengembangan obyek wisata,	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
	7. Pemberdayaan petani dan nelayan,	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan
	8. Akses teknologi untuk bisnis	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Dinas Perdagangan dan Koperasi,

Misi	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2025 - 2029	Program Nomenklatur	OPD Penanggung jawab
		Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Usaha Kecil dan Menengah
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional	9. Penerapan merit system berbasis kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN).	1. Program Kepegawaian Daerah	Badan kepegawaian Daerah
	10. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi,	1. Program pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	11. Mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelayanan publik guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten,	2. Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
	13. Membangun embung dan cekdam,	3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	14. Menjaga kelestarian lingkungan.	4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	15. Pengelolaan sampah terpadu dengan metode	5. Program Pengelolaan Sampah	Dinas LH

Misi	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2025 - 2029	Program Nomenklatur	OPD Penanggung jawab
	refuse derived fuel (RDF),		

Agar program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana, perlu disesuaikan dengan program nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Jika Program prioritas yang bersumber dari Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati tersebut belum cukup memadai atau dirasa masih kurang untuk menjawab tujuan, dimana tujuan ini menjawab visi dan misi, maka ditambah Program Perangkat Daerah lainnya. Program Perangkat Daerah lainnya tersebut dipilih atau diseleksi yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Sinkronisasi program prioritas dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
Visi: Mewujudkan Rembang Sejahtera					
Misi 1; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing					
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, memiliki daya saing tinggi, serta produktif guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan			Indeks Pembangunan Manusia		
	1	Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan sesuai kewenangan	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Persentase lembaga DIKMAS yang terakreditasi A	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
			APK PAUD 3-6 Tahun		
			APM SD/MI/ sederajat		
			APM SMP/MTs/ sederajat		
			% Desa Vokasi		
			% Guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi		
			% Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
			% Lembaga PAUD yang terakreditasi A		
			% Lembaga SD yang terakreditasi A		
			% Lembaga SMP yg terakreditasi A		
			% Partisipasi Warga negara usia 7- 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan		
	2	Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat secara menyeluruh.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	% Peningkatan Perpustakaan Yang Aktif (Cakupan pelayanan umum perpustakaan)	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara paripurna didukung dengan pengembangan akses pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Kesehatan
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan	
		dan masyarakat	Pendek) Pada Balita	Upaya Kesehatan Masyarakat		
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang memadai	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan	
			Persentase ketersediaan obat essensial di puskesmas			
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan desa siaga mandiri	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Mewujudkan upaya Pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta pembangunan yang responsif terhadap keadilan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			
			Laju Pertumbuhan Penduduk			
			Indeks Ketimpangan Gender			
			Indeks Perlindungan Anak			
	1	Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga serta pengendalian penduduk		Indeks Pembangunan Keluarga		
				Indeks Kualitas Keluarga		
				Total Fertility Rate (TFR)		
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Ketersediaan Dok Informasi Kependudukan dan KB	Program Pengendalian Penduduk	Dalduk KB	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Persentase Kerjasama yang mendukung Pendidikan kependudukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dalduk KB	

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan KB MKJP		Dalduk KB
			ASFR 15-19 Tahun		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Unmet Need KB	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dalduk KB
			Cakupan PIK-R yang aktif		
			Cakupan anggota BKB ber KB		
			Cakupan anggota BKL yang ber KB		
			Cakupan anggota BKR ber KB		
			Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB		
	2 Meningkatkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender		
			Indeks Pemberdayaan Gender		
			Indeks Pemenuhan Hak Anak		
			Indeks Perlindungan Khusus Anak		
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase industri perempuan (IR) yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	PPPA
			Persentase Lembaga Pengarusutamaan Gender dan PUHA yang Kuat dan Kembangkan		PPPA

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	PPPA	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Kelp. Perlindungan Anak Desa/ Kelurahan	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	PPPA	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	PPPA	
Misi 2; Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan						
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan yang berkelanjutan dengan pengembangan sektor unggulan.			Pertumbuhan ekonomi			
			Tingkat kemiskinan			
			PDRB per kapita			
	1	Meningkatnya realisasi investasi dalam mendukung peningkatan produktivitas daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Jumlah perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/ insentif penanaman	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Pertumbuhan investor	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman modal
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman modal	
			% penyelesaian permohonan			

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			perijinan dan non perijinan sesuai SOP		
	2 Meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha mikro, kecil dan koperasi serta perdagangan		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
			Rasio PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	% KSP/USP memiliki IUSP	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan aset koperasi Pertumbuhan jumlah modal sendiri koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Program Pengembangan UMKM	Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	perdagangan
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	Perdagangan
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan
	3	Meningkatnya produktivitas industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan		
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perindustrian
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Perindustrian
	4	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata, Pemajuan Kebudayaan dan Sektor Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)		
			Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan		
			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kebudayaan
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		Kebudayaan
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pariwisata
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	Pariwisata
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
	5	Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
			Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran		Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
				HIV/ AIDS dan NAPZA		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
		Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Teroenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
			Indeks Peranan Sosial		
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
			Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
			Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga kerja
	6 Meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pertanian		Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian dan perikanan,		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
	dan juga perikanan		kehutanan terahap PDRB		
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi lkan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	Pertanian
			Peningkatan Produksi Hortikultura		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan	Pangan

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan		
		kedaulatan dan kemandirian pangan		Kemandirian Pangan			
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan			
Misi 3; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional							
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.		Akuntabilitas dan profesionalitas tata kelola pemerintahan , serta kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks reformasi Birokrasi				
			Opini Laporan Keuangan BPK				
	1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
				Indeks Kematangan Organisasi			
				Nilai SAKIP			
				Indeks Perencanaan Pembangunan (hasil penilaian Mandiri)			
				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan			
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			
				Nilai Maturitas SPIP			
				Indeks Reformasi Hukum			
				Indeks Pengelolaan Pertanahan			
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kominfo
		Program Penunjang	Urusan penunjan				

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
				Urusan Pemerintahan Daerah	g pemerintahan
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Urusan penunjang pemerintahan bidang Kesra
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (JPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya lrualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilavahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Meningkatnya lrualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		bidang perekonomian dan SDA	Bidang Perekonomian dan SDA		
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Kearsipan
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan , baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Urusan penunjang pemerintahan bidang pengawasan (Inspektorat)

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
		Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pertanahan
	2 Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat		Indeks Profesionalitas ASN		
			Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	Urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian
		Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
		Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya		
		Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik		
	3 Meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah		Indeks Inovasi Daerah		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		Meningkatnya Pemanfaatan Basil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Litbang
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan , pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Litbang
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Permasalahan Daerah		
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
	4	Terciptanya kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat	Indeks Harmoni		
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbang ol
	5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana daerah	Indeks Rasa Aman		
			Tingkat waktu tanggap (response time) kebakaran		
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tramtibu m
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Tramtibu m

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
			Kebakaran	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Sosial
		Meningkatnya penanganan bencana pada saattanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Sosial
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya penanganan bencana pada	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan	
		saat tanggap darurat				
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana			
	6	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa			
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberde s	
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dalam mendukung investasi dan aktivitas masyarakat			Ketersediaan dan kualitas infrastruktur meningkat dan merata	Indeks Infrastruktur		
	1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan air baku, jalan, jembatan, irigasi, drainase serta layanan dasar kewenangan kabupaten yang merata.		Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		
				Persentase ketersediaan Air Baku		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kernanta pan Jalan	Program Penyelenggara an Jalan	PUPR
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR
		Meningkatnya akses masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas yang	Program Pengelolaan dan Pengembangan	PUPR	

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
		terhadap sistem penyediaan air minum	Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten / Kota	Sistem Penyediaan Air Minum	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Permukiman
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	2	Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi	Indeks Konektivitas		
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
	3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Permukiman
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan					
Meningkatkan Kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Kualitas pengelolaan lingkungan hidup meningkat	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq)		
	1	Meningkatnya kualitas dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		

Visi,Misi, Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Program Prioritas	urusan
	kelestarian lingkungan hidup				
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	ESDM
			Porsi EBT dalam Bauran Energi		

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah Kabupaten Rembang berisi program-program yang akan diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Bab IV Renstra. Program perangkat daerah berisi indikator dan target kinerja lima tahun ke depan yang sudah didukung dengan rencana pembiayaan pada masing-masing program, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana Strategis PD.

Target kinerja program dan anggaran ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Sebagai catatan, program tahun 2025 telah menjadi dokumen anggaran (APBD TA 2025) sehingga tidak perlu dicantumkan menjadi bagian RPJMD. Walaupun demikian, kinerja program TA 2025 tetap menjadi tanggung jawab kepala daerah. Sementara itu, target kinerja dan anggaran program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi:

4.1.1. Urusan Wajib Pemerintah Daerah

1. Pendidikan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan pendidikan
- b. Program pendidik dan tenaga kependidikan

2. Kesehatan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- c. Program Penanggulangan Bencana

6. Sosial.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Program Rehabilitasi Sosial

- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- d. Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
- e. Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- b. Program Penatagunaan Tanah

5. Lingkungan hidup;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Persampahan

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

9. Perhubungan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- b. Program Pengelolaan Pelayaran

10. Komunikasi dan informatika;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM

12. Penanaman modal;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga;

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Statistik Sektoral.

15. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi. .

16. Kebudayaan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- c. Program pembinaan sejarah
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya
- e. Program Pengelolaan Permuseuman

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan.

18. Kearsipan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
- b. Program Pemasaran pariwisata
- c. Program pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI
- d. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perijinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

4. Energi dan sumber daya mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan.

5. Perdagangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

6. Perindustrian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional

7. Transmigrasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Program Perekonomian dan Pemnagunan

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

3. Perencanaan Pembangunan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Keuangan Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan BMD
- c. Program pengelolaan pendapatan daerah

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- a. Program Kepegawaian Daerah
- b. Program Pengembangan SDM Aparatur.

6. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b. Program Riset dan Inovasi Daerah

7. Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

8. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik

- b. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					576.720.483.127		592.718.898.324		609.171.201.991		626.090.489.502		643.490.238.668
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					576.720.483.127		592.718.898.324		609.171.201.991		626.090.489.502		643.490.238.668
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					344.467.620.866		354.023.265.554		363.850.011.903		373.955.681.610		384.348.324.795
	Nilai IKM OPD DINDIKPORA	Angka	73,76	78,66		79,84		81,04		82,26		83,49	
	Nilai SAKIP OPD DINDIKPORA	Angka	79,88	81,33		82,06		82,80		83,55		84,30	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINDIKPORA												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					223.655.358.009		229.859.630.934		236.239.924.290		242.801.316.535		249.549.034.438
	Persentase lembaga DIKMAS yang terakreditasi A	Persen	16,67	22,00		24,20		26,62		29,28		32,21	
	APK PAUD 5-6 Tahun	Persen	89,81	91,92		93,00		94,08		95,18		96,30	
	APM SD/MI/ sederajat	Persen	97,12	97,12		97,18		97,23		97,29		97,35	
	APM SMP/MTs/ sedera jat	Persen	72,80	73,12		73,28		73,44		73,60		73,77	
	% Desa Vokasi	Persen	4,76	5,46		5,85		6,27		6,72		7,20	
	% Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompetensi	Persen	55,57	59,66		61,82		64,06		66,37		68,77	
	% Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	Persen	91,65	93,56		94,49		95,44		96,39		97,36	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	% Lembaga PAUD yang terakreditasi A	Persen	5,70	7,62	9,14	10,97		13,17		15,80			
	% Lembaga SD yang terakreditasi A	Persen	29,33	30,95	31,80	32,66		33,55		34,47			
	% Lembaga SMP yg terakreditasi A	Persen	72,80	72,37	77,93	83,91		90,35		97,29			
	% Partisipasi Warga negara usia 7- 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Persen	4,10	4,10	4,20	4,30		4,40		4,51			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SMP NEGERI 1 BULU			73.891.372		75.941.143		78.049.067		80.216.824		82.446.138	
	SMP NEGERI 3 KRAGAN			22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707	
	SMP NEGERI 3 PAMOTAN			38.042.139		39.097.440		40.182.681		41.298.726		42.446.463	
	SMP NEGERI 2 BULU			23.835.926		24.497.143		25.177.119		25.876.395		26.595.528	
	SMP NEGERI 1 GUNEM			30.509.986		31.356.343		32.226.712		33.121.785		34.042.276	
	SMP NEGERI 2 GUNEM			35.563.202		36.549.737		37.564.261		38.607.581		39.680.528	
	SMP NEGERI 1 KALIORI			148.736.181		152.862.171		157.105.220		161.468.703		165.956.097	
	SMP NEGERI 2 KALIORI			87.239.491		89.659.543		92.148.254		94.707.605		97.339.634	
	SMP NEGERI 1 KRAGAN			172.000.045		176.771.383		181.678.087		186.724.064		191.913.333	
	SMP NEGERI 2 KRAGAN			150.833.742		155.017.920		159.320.806		163.745.826		168.296.504	
	SMP NEGERI 1 LASEM			220.911.366		227.039.520		233.341.534		239.822.426		246.487.357	
	SMP NEGERI 2 LASEM			99.157.454		101.908.114		104.736.813		107.645.802		110.637.398	
	SMP NEGERI 3 LASEM			109.921.758		112.971.024		116.106.800		119.331.582		122.647.939	
	SMP NEGERI 1 PAMOTAN			161.988.956		166.482.583		171.103.697		175.855.978		180.743.211	
	SMP NEGERI 2 PAMOTAN			88.192.928		90.639.429		93.155.339		95.742.660		98.403.455	
	SMP NEGERI 1 PANCUR			105.545.482		108.473.348		111.484.281		114.580.676		117.765.000	
	SMP NEGERI 2 PANCUR			44.334.823		45.564.686		46.829.440		48.130.094		49.467.683	
	SMP NEGERI 1 REMBANG			171.809.358		176.575.406		181.476.670		186.517.053		191.700.569	
	SMP NEGERI 2 REMBANG			212.635.533		218.534.112		224.600.039		230.838.142		237.253.390	
	SMP NEGERI 3 REMBANG			126.940.610		130.461.984		134.083.262		137.807.328		141.637.146	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	SMP NEGERI 4 REMBANG				33.437.038		34.364.592		35.318.462		36.299.406		37.308.207
	SMP NEGERI 5 REMBANG				149.165.228		153.303.120		157.558.408		161.934.478		166.434.817
	SMP NEGERI 6 REMBANG				43.648.348		44.859.168		46.104.339		47.384.854		48.701.732
	SMP NEGERI 1 SALE				78.372.526		80.546.606		82.782.366		85.081.586		87.446.097
	SMP NEGERI 2 SALE				24.026.614		24.693.120		25.378.535		26.083.406		26.808.293
	SMP NEGERI 1 SARANG				145.971.213		150.020.503		154.184.674		158.467.041		162.871.016
	SMP NEGERI 2 SARANG				29.232.380		30.043.296		30.877.218		31.734.810		32.616.756
	SMP NEGERI 1 SEDAN				143.015.559		146.982.857		151.062.711		155.258.368		159.573.170
	SMP NEGERI 2 SEDAN				22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707
	SMP NEGERI 1 SLUKE				76.942.371		79.076.777		81.271.739		83.529.002		85.850.366
	SMP NEGERI 1 SULANG				148.259.462		152.372.228		156.601.677		160.951.175		165.424.187
	SMP NEGERI 2 SULANG				87.096.475		89.512.560		91.997.191		94.552.346		97.180.061
	SMP NEGERI 1 SUMBER				74.368.090		76.431.086		78.552.610		80.734.351		82.978.049
	SMP NEGERI 3 SALE				22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707
	SMP NEGERI 2 SLUKE				22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707
	SMP NEGERI 3 SLUKE				22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707
	SMP NEGERI 3 SARANG				22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707
	SMP NEGERI 4 KRAGAN				22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707
	SMP NEGERI 4 SALE				18.305.991		18.813.806		19.336.027		19.873.071		20.425.366
	TK NEGERI 1 REMBANG				56.634.161		58.205.211		59.820.834		61.482.314		63.190.975
	SKB REMBANG				95.343.706		97.988.571		100.708.474		103.505.579		106.382.114
	TK NEGERI 1 KRAGAN				22.882.489		23.517.257		24.170.034		24.841.339		25.531.707
	TK NEGERI PEMBINA PAMOTAN				70.935.717		72.903.497		74.927.105		77.008.151		79.148.293
	TK NEGERI PEMBINA PANCUR				26.314.863		27.044.846		27.795.539		28.567.540		29.361.463
	TK NEGERI 2 REMBANG				36.154.333		37.157.266		38.188.653		39.249.315		40.340.097
	TK NEGERI 1 KALIORI				33.408.434		34.335.195		35.288.249		36.268.355		37.276.293

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	TK NEGERI PEMBINA SULANG				45.822.185		47.093.307		48.400.493		49.744.781		51.127.244
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					138.248.373		142.083.428		146.027.287		150.083.089		154.254.065
	% Satuan Pendidikan yang memiliki GTK bersertifikat pendidik	Persen	55,57	59,66		61,82		64,06		66,37		68,77	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					38.137.482		39.195.429		40.283.390		41.402.232		42.552.845
	% pelayanan penerbitan izin Pendidikan PAUD dan DIKMAS	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% pelayanan penerbitan izin pendidikan SD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% pelayanan penerbitan izin pendidikan SMP	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.477.827.439		1.518.822.856		1.560.981.348		1.604.336.471		1.648.922.761
	% prestasi kepemudaan	Persen	52,00	54,02		55,06		56,12		57,20		58,30	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.288.248.937		2.351.725.713		2.417.003.378		2.484.133.890		2.553.170.726
	% Perolehan medali olahraga	Persen	61,63	66,36		68,86		71,45		74,14		76,93	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					953.437.057		979.885.714		1.007.084.741		1.035.055.788		1.063.821.136
	% aktivitas kepramukaan dalam kemasyarakatan	Persen	52,00	54,02		55,06		56,12		57,20		58,30	
DINAS KESEHATAN					373.476.994.704		383.837.368.928		394.491.675.666		405.448.395.320		416.716.255.951
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					373.476.994.704		383.837.368.928		394.491.675.666		405.448.395.320		416.716.255.951
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					142.517.417.182		146.470.897.039		150.536.540.438		154.717.583.468		159.017.356.727

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Nilai IKM OPD		79,90	80,10		80,20		80,30		80,40		80,50	
	Nilai SAKIP OPD		75,00	78,78		79,57		80,36		81,17		81,98	
	Indeks Manajemen Risiko OPD												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Pemenuhan SPM Kesehatan		75,00										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SUMBER												
	PUSKESMAS SARANG 2												
	PUSKESMAS SARANG 1												
	PUSKESMAS PANCUR												
	PUSKESMAS BULU												
	PUSKESMAS LASEM												
	PUSKESMAS SEDAN												
	PUSKESMAS SULANG												
	PUSKESMAS SLUKE												
	PUSKESMAS GUNEM												
	PUSKESMAS PAMOTAN												
	PUSKESMAS REMBANG 1												
	PUSKESMAS KALIORI												
	PUSKESMAS SALE												
	PUSKESMAS REMBANG 2												
	PUSKESMAS KRAGAN 1												
	PUSKESMAS KRAGAN 2												
	RSUD dr. R. SOETRASNO												
PROGRAM PENINGKATAN													

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
SUMBER DAYA AIR (SDA)													
	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	55,00	65,45		71,40		77,90		84,98		92,70	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				-	3.074.834.510	-	3.160.131.426	-	3.247.848.289	-	3.338.054.915	-	3.430.823.164
	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	Persen	99,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				-	286.031.117	-	293.965.714	-	302.125.422	-	310.516.736	-	319.146.341
	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Jaringan Persampahan	Persen	35,00	45,71		52,24		59,71		68,24		77,99	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				-	1.811.530.409	-	1.861.782.856	-	1.913.461.007	-	1.966.605.996	-	2.021.260.158
	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	Persen	96,00	98,20		98,39		98,59		98,79		98,98	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				-	6.197.340.872	-	6.369.257.139	-	6.546.050.814	-	6.727.862.619	-	6.914.837.384
	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	Persen	30,00	40,83		47,64		55,58		64,84		75,65	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				-	5.243.903.815	-	5.389.371.425	-	5.538.966.074	-	5.692.806.832	-	5.851.016.248
	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
				-		-		-		-		-	
PROGRAM PENATAAN				-	4.767.185.286	-	4.899.428.568	-	5.035.423.703	-	5.175.278.938	-	5.319.105.680

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA													
	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya		30,00	37,45		40,07		42,88		45,88		49,09	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				-	97.727.298.365	-	100.438.285.648	-	103.226.185.915	-	106.093.218.225	-	109.041.666.439
	Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap		80,00	83,83		84,67		85,51		86,37		87,23	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				-	429.046.676	-	440.948.571	-	453.188.133	-	465.775.104	-	478.719.511
	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	Persen	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	Persen	95,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
				-	2.173.836.490	-	2.234.139.427	-	2.296.153.209	-	2.359.927.196	-	2.425.512.190
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.722.212.288		15.130.611.281		15.550.596.897		15.982.503.427		16.426.674.925
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.722.212.288		15.130.611.281		15.550.596.897		15.982.503.427		16.426.674.925
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	5.187.841.716	-	5.331.754.145	-	5.479.749.491	-	5.631.945.551	-	5.788.463.565
	Nilai IKM OPD DPKP	Angka	78,00	80,01		81,04		82,08		83,13		84,20	
	Nilai SAKIP OPD DPKP	Angka	65,61	67,63		68,66		69,70		70,76		71,84	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DPKP												
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				-	381.374.823	-	391.954.285	-	402.833.896	-	414.022.315	-	425.528.454
	Persentase Rumah terdampak	Persen	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	bencana / relokasi												
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				-	5.482.263.079	-	5.634.342.853	-	5.790.737.259	-	5.951.570.778	-	6.116.971.532
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	67,00	85,49		88,05		90,70		93,42		96,22	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di kawasan kumuh	Persen	80,00	90,90		91,81		92,73		93,65		94,59	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				-	1.620.842.997	-	1.665.805.713	-	1.712.044.059	-	1.759.594.839	-	1.808.495.931
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	Persen	79,00	81,81		82,63		83,45		84,29		85,13	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				28,00		28,00		28,00		28,00		28,00	
	Persentase ketercukupan PSU di Perumahan	Persen	27,00	-		-		-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				-	95.343.706	-	97.988.571	-	100.708.474	-	103.505.579	-	106.382.114
	Persentase wilayah yang tersedia data pemanfaatan tanah	Persen	42,87	62,88		69,16		76,08		83,69		92,06	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					1.430.155.586		1.469.828.570		1.510.627.111		1.552.583.681		1.595.731.704
	Persentase Penyelesaian Permasalahan		41,82	46,74		49,41		52,23		55,22		58,37	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten												
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					12.620.021.921		12.970.105.464		13.330.121.172		13.700.355.602		14.081.103.681
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN M					12.620.021.921		12.970.105.464		13.330.121.172		13.700.355.602		14.081.103.681
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	8.038.756.861		8.261.754.610		8.491.078.993		8.726.912.543		8.969.443.122
	Nilai SAKIP OPD SATPOL PP	Angka	64,95	65,35		65,55		65,75		65,96		66,16	
	Nilai IKM OPD SATPOL PP												
	Indeks Manajemen Risiko OPD SATPOL PP												
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	4.581.265.060		4.708.350.854		4.839.042.179		4.973.443.059		5.111.660.558
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
	Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Persen	90,00	100,28		105,85		111,73		117,94		124,49	
	Kecamatan yang kondusif	Persen	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					16.070.658.318		16.516.463.646		16.974.916.846		17.446.382.827		17.931.237.158
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN M					16.070.658.318		16.516.463.646		16.974.916.846		17.446.382.827		17.931.237.158
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-	7.775.755.920		7.991.457.938		8.213.279.602		8.441.397.475		8.675.993.275

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Nilai IKM OPD BPBD	Angka	85,00	87,01	88,04	89,07	90,12	91,18					
	Nilai SAKIP OPD BPBD	Angka	73,00	75,01	76,04	77,08	78,14	79,21					
	Indeks Manajemen Risiko OPD BPBD												
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			-	4.729.047.804	-	4.860.233.140	-	4.995.140.314	-	5.133.876.706	-	5.276.552.834	
	% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	Persen	49,18	87,42	116,56	155,40	207,19	276,24					
	% penanganan kejadian bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			-	3.565.854.594	-	3.664.772.569	-	3.766.496.930	-	3.871.108.645	-	3.978.691.049	
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Damkar	Persen	40,00	50,63	56,95	64,07	72,08	81,09					
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang	Persen	40,00	50,63	56,95	64,07	72,08	81,09					
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA													
					18.615.693.874		19.132.099.323		19.663.155.627		20.209.285.488		20.770.923.948
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					18.615.693.874		19.132.099.323		19.663.155.627		20.209.285.488		20.770.923.948
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	6.991.449.377	-	7.185.394.474	-	7.384.841.956	-	7.589.950.576	-	7.800.883.721	
	Nilai IKM OPD DINSOS PPKB	Angka	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96					
	Nilai SAKIP OPD DINSOS PPKB	Angka	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50					
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINSOS PPKB												

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				-	743.404.408	-	764.026.690	-	785.234.043	-	807.043.348	-	829.471.978
	Persentase PSKS yang dapat melaksanakan UKS	Persen	60,00	66,15		69,46		72,93		76,58		80,41	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				-	1.934.619.133	-	1.988.286.102	-	2.043.475.647	-	2.100.231.699	-	2.158.599.467
	Persentase Kemandirian PPKS	Persen	15,03	15,03		15,03		15,03		15,03		15,03	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				-	4.036.216.520	-	4.148.182.489	-	4.263.325.026	-	4.381.735.781	-	4.503.509.079
	Persentase Kemandirian FM	Persen	1,80	2,01		2,12		2,23		2,36		2,49	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				-	255.134.036	-	262.211.538	-	269.489.834	-	276.974.718	-	284.672.153
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				-	196.408.034	-	201.856.457	-	207.459.457	-	213.221.492	-	219.147.154
	Persentase Taman Makam dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				-	348.624.260	-	358.295.211	-	368.240.535	-	378.468.149	-	388.986.198
	Persentase industri perempuan (IR) yang mendapatkan pendampingan	Persen	75,00	79,05		81,16		83,33		85,55		87,83	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	menjadi pelaku usaha												
	Persentase Lembaga Pengarusutamaan Gender dan PUHA yang Kuat dan Kembangkan	Persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				-	44.191.808	-	45.417.703	-	46.678.378	-	47.974.836	-	49.308.110
	Persentase cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan	Persen	100,00	100,00				100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				-	14.730.603	-	15.139.234	-	15.559.459	-	15.991.612	-	16.436.037
	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Persen	100,00	100,00				100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				-	294.612.051	-	302.784.686	-	311.189.185	-	319.832.238	-	328.720.731
	Persentase Kelp. Perlindungan Anak Desa/ Kelurahan	Persen	69,00	77,23		81,71		86,45		91,46		96,76	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				-	186.587.632	-	191.763.634	-	197.086.484	-	202.560.418	-	208.189.796
	Persentase Ketersediaan Dok Informasi Kependudukan dan KB	Persen	100,00	100,00				100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				-	2.622.047.251	-	2.694.783.701	-	2.769.583.745	-	2.846.506.921	-	2.925.614.506
	Persentase Kerjasama yang mendukung Pendidikan kependudukan	Persen	4,71	7,34		9,16		11,44		14,28		17,83	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase Penggunaan KB MKJP	Persen	20,17	20,17		20,17		20,17		20,17		20,17	
	ASFR 15-19 Tahun	Per 1000	36 Per 1000	34,00		33,00		32,00		31,00		30,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				-	947.668.763	-	973.957.405	-	1.000.991.878	-	1.028.793.700	-	1.057.385.018
	Persentase Unmet Need KB	Kelahira	10,49	10,07		9,87		9,67		9,48		9,29	
	Cakupan PIK-R yang aktif	Persen	38,89	50,80		58,07		66,37		75,86		86,70	
	Cakupan anggota BKB ber KB	Persen	90,12	90,22		90,27		90,32		90,37		90,42	
	Cakupan anggota BKL yang ber KB	Persen	86,75	86,81		86,84		86,87		86,90		86,93	
	Cakupan anggota BKR ber KB	Persen	88,10	88,16		88,19		88,22		88,25		88,28	
	Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB	Persen	94,95	95,01		95,04		95,07		95,10		95,13	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					35.453.758.305		36.437.257.179		37.448.658.742		38.488.768.028		39.558.413.583
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				-	209.756.153	-	215.574.857	-	221.558.643	-	227.712.273	-	234.040.650
	% Ketercukupan kebutuhan beras sesuai angka kecukupan gizi	Persen	97,90	97,90		97,90		97,90		97,90		97,90	
	Nilai ketersediaan energi per kapita	kkal/kap/hari	2.500,00	-		-		-		-		-	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				-	513.902.574	-	528.158.400	-	542.818.675	-	557.895.069	-	573.399.592
	Persentase Pangan Pokok non Beras, non	Persen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	terigu yang dikembangkan												
	Nilai ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hari	60,00	-		-		-		-		-	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				-	314.634.229	-	323.362.286	-	332.337.964	-	341.568.410	-	351.060.975
	Nilai konsumsi energi per kapita	kkal/kap/hari	2.150,00	-		-		-		-		-	
	Persentase penanganan kasus kerawanan pangan	Persen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				-	26.219.519	-	26.946.857	-	27.694.830	-	28.464.034	-	29.255.081
	Nilai konsumsi protein per kapita	gr/kap/hari	57,00	-		-		-		-		-	
	Persentase Pelaku PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	Persen	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
				-		-		-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	19.909.397.243	-	20.461.690.447	-	21.029.652.673	-	21.613.735.996	-	22.214.405.693
	Nilai SAKIP OPD DINTANPAN	Angka	75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00	
	Nilai IKM OPD DINTANPAN	Angka	78,00	80,01		81,04		82,08		83,13		84,20	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINTANPAN												
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				-	7.257.562.880	-	7.458.890.052	-	7.665.929.046	-	7.878.844.655	-	8.097.806.487
	Pertumbuhan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persen	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan												
	Pertumbuhan populasi ternak	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00		1,00	
	% sarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00		2,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			89,00	95,10		98,31		101,62		105,05		108,59	
				5.548.050.236		5.701.954.968		5.860.226.106		6.022.989.628		6.190.375.190	
	Pertumbuhan produksi tembakau berkualitas baik	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00		5,00	
	% prasarana peternakan dalam kondisi baik	Persen	30,00	40,83	47,64		55,58			64,84		75,65	
	indeks pertanian	Angka	1,54	1,57	1,59		1,61			1,63		1,65	
	Persentase Prasarana Penyuluhan Dalam Kondisi Baik	Persen	71,00	104,17	126,18		152,83			185,12		224,23	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				-		-		-		-		-	
				346.097.652		355.698.514		365.571.761		375.725.251		386.167.072	
	% Luas lahan TPH yang dikendalikan dari serangan OPT	Persen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			0,50		0,50	
	% luas lahan perkebunan yang dikendalikan dari serangan OPT	Persen	0,20	0,07	0,04		0,03			0,02		0,01	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				-		-		-		-		-	
				1.328.137.821		1.364.980.799		1.402.869.044		1.441.832.712		1.481.902.842	
	Persentase Pertumbuhan kelas kelompok tani	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			3,00		3,00	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
				25.877.256.607		26.595.100.186		27.333.309.589		28.092.472.402		28.873.193.371	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	13.349.093.675	-	13.719.401.908	-	14.100.216.097	-	14.491.839.354	-	14.894.583.644
	Nilai SAKIP OPD DLH	Angka	65,30	65,40		65,45		65,50		65,55		65,60	
	Nilai IKM OPD DLH	Angka	76,00	78,01		79,04		80,08		81,13		82,20	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DLH												
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				-	1.668.514.850	-	1.714.799.999	-	1.762.398.296	-	1.811.347.628	-	1.861.686.988
	% Ketercapaian target IKLH		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				-	2.526.608.202	-	2.596.697.141	-	2.668.774.563	-	2.742.897.837	-	2.819.126.010
	Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan	Persen	60,00	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				-	1.382.483.733	-	1.420.834.285	-	1.460.272.874	-	1.500.830.892	-	1.542.540.647
	Persentase Luas RTH Baru/ Terfasilitasi	Persen	1,00	1,10		1,21		1,33		1,46		1,61	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				-	90.576.520	-	93.089.143	-	95.673.050	-	98.330.300	-	101.063.008
	% perusahaan yg memiliki TPS limbah B3	Persen	30,00	34,13		36,41		38,84		41,43		44,19	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN				-	57.206.223	-	58.793.143	-	60.425.084	-	62.103.347	-	63.829.268

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
	Persentase izin lingkungan yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-	471.951.343	-	485.043.428	-	498.506.947	-	512.352.615	-	526.591.462
	Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	Persen	80,00	101,25	113,91	128,14	144,16	162,18					
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-	471.951.343	-	485.043.428	-	498.506.947	-	512.352.615	-	526.591.462
	% Penghargaan LH utk kelurahan	Persen	57,00	129,75	195,77	295,37	445,65	672,38					
	% Penghargaan LH utk sekolah	Persen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				-	42.904.668	-	44.094.857	-	45.318.813	-	46.577.510	-	47.871.951
	% kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	Persen	90,00	100,28	105,85	111,73	117,94	124,49					
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				-	5.815.966.049	-	5.977.302.853	-	6.143.216.918	-	6.313.840.304	-	6.489.308.930
	Persentase pengelolaan sampah	Persen	45,00	57,80	65,51	74,24	84,14	95,36					
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.973.749.583		9.222.684.337		9.478.681.579		9.741.945.073		10.012.684.532
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI													

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	5.059.890.463	-	5.200.253.482	-	5.344.598.719	-	5.493.041.065	-	5.645.698.769
	Nilai SAKIP OPD DINDUKCAPIL	Angka	77,50	82,07		84,45		86,90		89,42		92,02	
	Nilai IKM OPD DINDUKCAPIL												
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINDUKCAPIL												
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				-	2.178.603.676	-	2.239.038.856	-	2.301.188.632	-	2.365.102.475	-	2.430.831.296
	% Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% Kepemilikan KIA	Persen	44,00	48,09		50,28		52,56		54,95		57,45	
	% Kepemilikan KK	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% kepemilikan KTP - EI	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIIL				-	348.004.526	-	357.658.285	-	367.585.930	-	377.795.362	-	388.294.715
	% Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	Persen	97,00	98,18		98,35		98,53		98,71		98,89	
	% penerbitan akta kelahiran	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				-	1.244.235.360	-	1.278.750.856	-	1.314.245.587	-	1.350.747.803	-	1.388.286.582
	% penerbitan akta kematian	Persen	60,00	72,36		78,15		84,40		91,15		98,44	
	% Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				-	143.015.559	-	146.982.857	-	151.062.711	-	155.258.368	-	159.573.170
	Persentase elemen profil data kependudukan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
DINAS PEMBERDAYAAN					16.832.606.314		17.299.548.329		17.779.737.881		18.273.557.182		18.781.399.606

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
MASYARAKAT DAN DESA													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	6.869.189.066	-	7.059.742.622	-	7.255.702.342	-	7.457.224.202	-	7.664.468.735
	Nilai IKM OPD DINPERMADES	Angka	84,00	86,60		87,21		87,82		88,43		89,05	
	Nilai SAKIP OPD DINPERMADES	Angka	73,00	75,01		76,04		77,08		78,14		79,21	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINPERMADES												
PROGRAM PENATAAN DESA				-	1.077.383.875	-	1.107.270.856	-	1.138.005.757	-	1.169.613.040	-	1.202.117.884
	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa		2,40	3,75		4,69		5,86		7,32		9,16	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				-	2.364.523.902	-	2.430.116.570	-	2.497.570.157	-	2.566.938.353	-	2.638.276.417
	Persentase Bumdes Kawasan Perdesaan dan Bumdes lainnya yang berkontribusi terhadap PAdes		75,00	90,90		91,81		92,73		93,65		94,59	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				-	5.177.163.221	-	5.320.779.425	-	5.468.470.142	-	5.620.352.926	-	5.776.548.768
	Rata-rata IKM desa	Angka	40,00	54,50		59,41		64,75		70,58		76,93	
	% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola		22,00	26,18		28,56		31,16		33,99		37,08	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pemerintahan Desa												
	% Pemerintah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas		49,00	51,02		52,06		53,12		54,21		55,31	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				-	1.344.346.251	-	1.381.638.856	-	1.419.989.484	-	1.459.428.660	-	1.499.987.802
	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif		64,00	68,06		70,19		72,38		74,64		76,98	
DINAS PERHUBUNGAN					27.779.342.099		28.549.950.153		29.342.421.003		30.157.385.426		30.995.492.618
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	22.073.021.312	-	22.685.334.156	-	23.315.018.831	-	23.962.576.538	-	24.628.523.119
	Nilai IKM OPD DINHUB	Angka	85,26	88,29		89,84		91,42		93,03		94,67	
	Nilai SAKIP OPD DINHUB	Angka	71,00	73,01		74,04		75,09		76,14		77,22	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINHUB												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				-	5.706.320.787	-	5.864.615.996	-	6.027.402.173	-	6.194.808.889	-	6.366.969.499
	Persentase Lalu lintas berkeselamatan	Persen	70,00	78,85		80,74		82,68		84,66		86,69	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.834.626.488		12.162.922.905		12.500.533.367		12.847.726.598		13.204.779.171
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK													

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	6.958.844.721	-	7.151.885.354	-	7.350.402.711	-	7.554.554.806	-	7.764.504.264
	Nilai IKM OPD DINKOMINFO	Angka	85,00	86,43		86,86		87,30		87,73		88,17	
	Nilai SAKIP OPD DINKOMINFO	Angka	83,00	84,92		85,35		85,77		86,20		86,63	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum	Persen											
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINKOMINFO												
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				-	1.714.756.547	-	1.762.324.456	-	1.811.241.906	-	1.861.547.834	-	1.913.282.313
	% cakupan pelayanan informasi publik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				-	2.569.512.869	-	2.640.791.998	-	2.714.093.376	-	2.789.475.347	-	2.866.997.961
	Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	Angka	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Indeks Perencanaan Strategis	Angka	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Indeks teknologi, informasi dan komunikasi	Angka	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Indeks penyelenggaraan	Angka	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Indeks penerapan manajemen	Angka	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Indeks pelaksanaan audit TIK	Angka	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Indeks layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Angka	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Indeks layanan publik berbasis elektronik	Angka	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				-	187.731.757	-	192.939.497	-	198.294.985	-	203.802.485	-	209.466.382
	Persentase publikasi data statistik sektoral	Persen	0,93	1,00		1,05		1,10		1,15		1,21	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				-	403.780.594	-	414.981.600	-	426.500.388	-	438.346.126	-	450.528.251
	% Cakupan pengamanan informasi	Persen	#### #####	32,14		34,44		36,90		39,53		42,36	
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					2.469.297.100		2.537.796.211		2.608.238.699		2.680.680.634		2.755.179.722
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				-	133.376.310	-	137.076.212	-	140.881.084	-	144.793.954	-	148.817.939
	Jumlah perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/ insentif penanaman	Perusahaan	50,00	51,00		52,02		53,06		54,12		55,20	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				-	143.015.559	-	146.982.857	-	151.062.711	-	155.258.368	-	159.573.170
	Pertumbuhan investor	Persen	5,00	5,125		5,25		5,38		5,52		5,66	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				-	2.192.905.232	-	2.253.737.141	-	2.316.294.903	-	2.380.628.311	-	2.446.788.613
	% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP	Persen	78,00	82,05		84,16		86,31		88,53		90,80	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					34.186.439.124		35.134.782.148		36.110.030.460		37.112.960.319		38.144.370.652
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	5.392.639.996	-	5.542.233.596	-	5.696.071.293	-	5.854.275.534	-	6.016.972.345
	Nilai SAKIP OPD DINBUDPAR	Angka	79,00	80,00		80,51		81,02		81,53		82,05	
	Nilai IKM OPD DINBUDPAR	Angka	80,00	81,00		81,51		82,02		82,53		83,05	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINBUDPAR												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				-	982.040.169	-	1.009.282.285	-	1.037.297.283	-	1.066.107.461	-	1.095.735.770
	% seni tradisi yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Persen	40,00	51,00		52,02		53,06		54,12		55,20	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				-	286.031.117	-	293.965.714	-	302.125.422	-	310.516.736	-	319.146.341
	Pertumbuhan Sejarah yang didokumentasikan	Persen	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN				-	629.268.458	-	646.724.571	-	664.675.929	-	683.136.820	-	702.121.950

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA													
	% cagar budaya yang dilestarikan	Persen	30,00	37,80		40,82		44,09		47,62		51,43	
PROGRAM PENGLOLAAN PERMUSEUMAN				-	381.374.823	-	391.954.285	-	402.833.896	-	414.022.315	-	425.528.454
	Pertumbuhan kunjungan museum	Persen	5,00	5,20		5,41		5,62		5,85		6,08	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				-	20.084.151.610	-	20.641.292.558	-	21.214.240.062	-	21.803.450.165	-	22.409.392.230
	Pertumbuhan kualitas SDM Pariwisata	Persen	3,00	3,02		3,03		3,05		3,06		3,08	
	Pertumbuhan daya tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Persen	7,00	7,04		7,07		7,11		7,14		7,18	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				-	3.122.506.362	-	3.209.125.712	-	3.298.202.526	-	3.389.807.704	-	3.484.014.220
	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	5,00	5,03		5,05		5,08		5,10		5,13	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				-	448.115.417	-	460.546.285	-	473.329.828	-	486.476.220	-	499.995.934
	Pertumbuhan usaha Ekraf bidang Pariwisata yang memperoleh HAKI	Persen	5,00	5,03		5,05		5,08		5,10		5,13	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				-	2.860.311.172	-	2.939.657.141	-	3.021.254.222	-	3.105.167.363	-	3.191.463.408
	Pertumbuhan Pelaku Ekraf Bidang Pariwisata	Persen	5,00	5,04		5,08		5,11		5,15		5,19	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pertumbuhan SDM Tenaga Kerja Pariwisata yang berkompeten	Persen	5,00	5,03		5,05		5,08		5,10		5,13	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					6.140.134.649		6.310.463.996		6.485.625.730		6.665.759.272		6.851.008.116
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				-	258.381.443	-	265.549.028	-	272.919.965	-	280.500.118	-	288.295.528
	% Peningkatan Perpustakaan Yang Aktif (Cakupan pelayanan umum perpustakaan)	Persen	94,00	95,48		95,95		96,43		96,91		97,40	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				-	167.804.922	-	172.459.886	-	177.246.914	-	182.169.819	-	187.232.520
	% Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	4.906.387.096	-	5.042.491.882	-	5.182.458.075	-	5.326.397.083	-	5.474.423.566
	Nilai SAKIP OPD DINARPUS	Angka	68,00	69,00		69,51		70,02		70,54		71,06	
	Nilai IKM OPD DINARPUS												
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINARPUS												
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				-	652.150.947	-	670.241.828	-	688.845.963	-	707.978.159	-	727.653.657
	% OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	Persen	90,00	95,19		95,38		95,57		95,76		95,95	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				-	155.410.240	-	159.721.371	-	164.154.813	-	168.714.093	-	173.402.845
	% Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					16.670.846.946		17.133.301.703		17.608.876.690		18.097.950.446		18.600.912.563
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	11.922.730.401	-	12.253.470.849	-	12.593.594.682	-	12.943.372.623	-	13.303.083.306
	Nilai SAKIP OPD DINLUTKAN	Angka	72,00	73,00		73,51		74,02		74,53		75,05	
	Nilai IKM OPD DINLUTKAN	Angka	76,00	77,00		77,51		78,02		78,53		79,05	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINLUTKAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				-	2.850.776.801	-	2.929.858.284	-	3.011.183.375	-	3.094.816.805	-	3.180.825.197
	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap	Persen	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	
PROGRAM PENGELOLAAN PERI KANAN BUDIDAYA				-	943.902.687	-	970.086.857	-	997.013.893	-	1.024.705.230	-	1.053.182.925
	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Persen	1,25	1,25		1,25		1,25		1,25		1,25	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				-	52.439.038	-	53.893.714	-	55.389.661	-	56.928.068	-	58.510.162
	%Usaha Perikanan yang taat peraturan	Persen	45,00	55,56		61,73		68,59		76,21		84,68	
	%Usaha Perikanan yang taat peraturan Dinlutkan	Persen	45,00	55,56		61,73		68,59		76,21		84,68	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				-	900.998.019	-	925.991.999	-	951.695.080	-	978.127.719	-	1.005.310.974
	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	Persen	1,25	1,25		1,25		1,25		1,25		1,25	
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					29.893.112.055		30.722.356.780		31.575.127.873		32.452.104.107		33.353.984.077
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	14.626.677.895	-	15.032.426.733	-	15.449.687.006	-	15.878.790.837	-	16.320.080.047
	Nilai IKM OPD DINDAGKOP UKM	Angka	82,00	84,01		85,04		86,07		87,12		88,19	
	Nilai SAKIP OPD DINDAGKOP UKM	Angka	78,00	82,05		84,16		86,31		88,53		90,80	
	Indeks Manajemen Risiko OPD DINDAGKOP UKM												
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				-	11.441.245	-	11.758.629	-	12.085.017	-	12.420.669	-	12.765.854
	% KSP/IUSP memiliki IUSP	Persen	92,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				-	95.343.706	-	97.988.571	-	100.708.474	-	103.505.579	-	106.382.114
	Persentase Koperasi yang Patuh Pada Ketentuan Peraturan	Persen	62,00	78,75		82,69		86,82		91,16		95,72	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				-	52.439.038	-	53.893.714	-	55.389.661	-	56.928.068	-	58.510.162
	% koperasi KSP/USP Sehat	Persen	62,00	78,00		81,12		84,36		87,74		91,25	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN				-	143.015.559	-	146.982.857	-	151.062.711	-	155.258.368	-	159.573.170
	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				-	57.206.223	-	58.793.143	-	60.425.084	-	62.103.347	-	63.829.268
	Pertumbuhan aset koperasi Pertumbuhan jumlah modal sendiri koperasi	Persen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				-	448.115.417	-	460.546.285	-	473.329.828	-	486.476.220	-	499.995.934
	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja usaha mikro	Persen	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				-	143.015.559	-	146.982.857	-	151.062.711	-	155.258.368	-	159.573.170
	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Persen	5,00	57,80		196,52		668,17		2.271,77		7.724,02	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				-	85.809.335	-	88.189.714	-	90.637.627	-	93.155.021	-	95.743.902
	% usaha dagang yang tertib usaha	Persen	3,50	7,14		10,20		14,58		20,82		29,75	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				-	11.631.932.098	-	11.954.605.706	-	12.286.433.836	-	12.627.680.608	-	12.978.617.859
	% cakupan pasar sesuai peraturan	Persen	40,00	50,29		53,81		57,58		61,61		65,92	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	perundang-undangan												
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				-	429.046.676	-	440.948.571	-	453.188.133	-	465.775.104	-	478.719.511
	% kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok	Persen	10,00	16,90		21,97		28,56		37,13		48,27	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				-	1.096.452.616	-	1.126.868.571	-	1.158.147.452	-	1.190.314.156	-	1.223.394.306
	Pertumbuhan ekspor	Persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				-	452.882.602	-	465.445.714	-	478.365.252	-	491.651.499	-	505.315.040
	% alat UTTP sesuai standar	Persen	45,00	55,56		61,73		68,59		76,21		84,68	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				-	619.734.087	-	636.925.714	-	654.605.081	-	672.786.262	-	691.483.738
	% produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan retail modern	Persen	80,00	84,05		86,15		88,31		90,51		92,78	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					11.694.204.886		12.018.605.962		12.352.210.569		12.695.284.242		13.048.100.273
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	6.331.121.439	-	6.506.748.823	-	6.687.358.902	-	6.873.095.437	-	7.064.106.383
	Nilai IKM OPD DINPERINNAKER	Angka	82,56	84,11		84,53		84,95		85,38		85,80	
	Nilai SAKIP OPD DINPERINNAKER	Angka	72,00	73,45		74,18		74,92		75,67		76,43	
	Indeks Manajemen												

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Risiko OPD DINPERINNAKER												
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-	95.343.706	-	97.988.571	-	100.708.474	-	103.505.579	-	106.382.114
	Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik	Persen	50,00	81,60		83,23		84,90		86,59		88,33	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				-	1.573.171.144	-	1.616.811.428	-	1.661.689.822	-	1.707.842.049	-	1.755.304.874
	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	60,00	70,42		76,28		82,64		89,53		96,99	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				-	2.049.889.673	-	2.106.754.284	-	2.165.232.192	-	2.225.369.943	-	2.287.215.442
	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	45,00	52,00		54,08		56,24		58,49		60,83	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				-	786.585.572	-	808.405.714	-	830.844.911	-	853.921.025	-	877.652.437
	% perusahaan yang taat aturan	Persen	65,00	73,44		74,91		76,41		77,94		79,49	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				-	762.749.646	-	783.908.571	-	805.667.793	-	828.044.630	-	851.056.909
	Pertumbuhan usaha industri	Persen	3,50	4,57		5,22		5,97		6,82		7,80	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				-	38.137.482	-	39.195.429	-	40.283.390	-	41.402.232	-	42.552.845
	% usaha industri yang memiliki ijin usaha	Persen	20,00	31,25		39,06		48,83		61,04		76,29	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				-	57.206.223	-	58.793.143	-	60.425.084	-	62.103.347	-	63.829.268
	% usaha industri yang masuk database	Persen	60,00	70,42		76,28		82,64		89,53		96,99	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
SEKRETARIAT DAERAH					109.735.068.638		112.779.155.403		115.909.605.465		119.128.910.537		122.439.635.099
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
BAGIAN PEMERINTAHAN													
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				-	1.716.186.703	-	1.763.794.285	-	1.812.752.533	-	1.863.100.418	-	1.914.878.045
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	75,00	79,05		81,16		83,33		85,55		87,83	
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang Pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				-	69.882.169.109	-	71.820.723.381	-	73.814.276.065	-	75.864.413.949	-	77.972.770.162
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang Pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
BAGIAN HUKUM													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN				-	1.515.910.536	-	1.557.962.391	-	1.601.207.292	-	1.645.679.662	-	1.691.414.925

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	75,00	79,05		81,16		83,33		85,55		87,83	
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang Pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				-	3.861.420.082	-	3.968.537.140	-	4.078.693.200	-	4.191.975.940	-	4.308.475.601
	Penerapan atas rumusan kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
	Penerapan atas rumusan kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persen	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	60,00	81,20		82,42		83,65		84,91		86,18	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				-	762.749.646	-	783.908.571	-	805.667.793	-	828.044.630	-	851.056.909
	% Penerapan atas rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	60,00	106,67		142,22		189,63		252,84		337,12	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	% Penerapan atas rumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persen	80,00	81,20		82,42		83,65		84,91		86,18	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				-	2.288.248.937	-	2.351.725.713	-	2.417.003.378	-	2.484.133.890	-	2.553.170.726
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	60,00	81,20		82,42		83,65		84,91		86,18	
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang adm pembangunan	Persen	80,00	80,80		81,61		82,42		83,25		84,08	
	% Penerapan atas rumusan kebijakan bidang Perekonomian	Persen	95,00	95,48		95,95		96,43		96,91		97,40	
BAGIAN UMUM													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	23.688.429.718	-	24.345.554.521	-	25.021.322.507	-	25.716.271.559	-	26.430.955.270
	% Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	90,00	91,35		92,72		94,11		95,52		96,96	
	Jumlah Rumusan Bahan kebijakan yang menjadi kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur	Angka	73,00	77,05		79,17		81,33		83,56		85,85	
	Nilai SAKIP OPD SETDA	Angka	84,00	85,00		85,51		86,02		86,53		87,04	
	Nilai IKM OPD SETDA	Angka	37,00	39,03		40,08		41,17		42,28		43,42	
	Indeks Manajemen Risiko OPD SETDA												

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BAGIAN ORGANISASI													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	880.975.841	-	905.414.399	-	930.546.300	-	956.391.548	-	982.970.730
	Nilai IKM Kabupaten	Nilai	83,00	84,00		84,51		85,02		85,53		86,05	
	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	84,00	85,00		85,51		86,02		86,53		87,04	
	% Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah Jumlah	Nilai	73,00	77,05		79,17		81,33		83,56		85,85	
	Jumlah Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan Bidang Aparatur	Nilai	37,00	39,03		40,08		41,17		42,28		43,42	
	Rata-rata Nilai Akuntabilitas OPD	Angka	5,00	7,20		8,64		10,37		12,44		14,93	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH													
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	5.138.978.067	-	5.281.535.002	-	5.428.136.398	-	5.578.898.942	-	5.733.942.732
	Rata-rata nilai Akuntabilitas OPD	Angka	73,00	77,05		79,17		81,33		83,56		85,85	
	% Pelayanan Pimpinan Daerah Nilai IKM OPD SETDA	Persen	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	83,00	84,00		84,51		85,02		85,53		86,05	
SEKRETARIAT DPRD					30.567.784.139		31.415.744.488		32.287.762.184		33.184.531.319		34.106.766.253

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-		-		-		-		-	
	Nilai SAKIP OPD DPRD	Angka	85,00	89,05	91,14		93,29		95,48		97,73		
	Nilai IKM OPD DPRD												
	Indeks Manajemen Risiko OPD DPRD												
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				-	30.567.784.139	-	31.415.744.488	-	32.287.762.184	-	33.184.531.319	-	34.106.766.253
	% SOP Layanan DPRD yang mendukung Fungsi Pembentukan Perda	Dokumen	95,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	% SOP Layanan DPRD yang mendukung Fungsi Anggaran dan Pengawasan	Dokumen	95,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	% Pemenuhan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Fungsi Anggaran dan Pengawasan)	Persen	95,00	98,10	98,20		98,29		98,39		98,49		
	% pemenuhan pelayanan dan dukungan tugas dan fungsi DPRD (Fungsi Pembentukan Perda)	Persen	96,00	98,12	98,24		98,35		98,47		98,59		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					10.075.922.821		10.355.432.222		10.642.871.539		10.938.469.563		11.242.461.765
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PERENCANAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN				-	6.454.768.877	-	6.633.826.281	-	6.817.963.694	-	7.007.327.682	-	7.202.069.091

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Nilai SAKIP OPD BAPPEDA	Angka	80,75	81,25		81,50		81,75		82,01		82,26	
	Nilai IKM OPD BAPPEDA	Angka	84,50	85,50		86,01		86,52		87,03		87,54	
	Indeks Manajemen Risiko OPD BAPPEDA												
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				94,00		94,00		94,00		94,00		94,00	
					1.074.523.563		1.104.331.199		1.134.984.503		1.166.507.873		1.198.926.420
	Persentase capaian indikator urusan RPJMD	Persen	94,00	98,29		98,59		98,88		99,18		99,48	
	Persentase tingkat kepuasan PD dalam pemanfaatan Informasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persen	82,00	84,01		85,04		86,07		87,12		88,19	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				-		-		-		-		-	
					1.492.128.995		1.533.521.142		1.576.087.619		1.619.862.308		1.664.880.078
	Persentase tingkat harmonisasi Perencanaan rumpun Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	80,00	85,85		86,71		87,58		88,45		89,34	
	Rata-rata Nilai Perencanaan Kinerja rumpun Perekonomian dan SDA Persentase tingkat harmonisasi Perencanaan Rumpun	Angka	24,00	26,04		27,13		28,26		29,43		30,66	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Infrastruktur dan Kewilayahan												
	Persentase tingkat harmonisasi Perencanaan rumpun Perekonomian dan SDA	Persen	80,00	85,85		86,71		87,58		88,45		89,34	
	Rata-rata Nilai Perencanaan Kinerja Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	80,00	86,02		87,05		88,10		89,15		90,22	
	Rata-rata Nilai Perencanaan Kinerja rumpun Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Angka	24,50	25,51		26,03		26,56		27,10		27,66	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				-	1.054.501.385	-	1.083.753.599	-	1.113.835.723	-	1.144.771.701	-	1.176.586.176
	Persentase implementasi Riset dan Pengembangan yang mendukung perencanaan	Persen	80,00	83,83		84,67		85,51		86,37		87,23	
	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	Persen	80,00	83,83		84,67		85,51		86,37		87,23	
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					379.443.717.171		389.969.610.232		400.794.131.715		411.925.897.507		423.373.775.109
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Nilai SAKIP OPD BPPKAD	Angka											
	Nilai IKM OPD BPPKAD	Angka											
	Indeks Manajemen												

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Risiko OPD BPPKAD												
KEUANGAN													
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				-	373.071.086.897	-	383.420.201.105	-	394.062.928.372	-	405.007.739.881	-	416.263.354.209
	% Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang telah ditetapkan	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
	% Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	Persen	95,00	100,07		102,70		105,40		108,18		111,02	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				-	1.334.811.880	-	1.371.839.999	-	1.409.918.637	-	1.449.078.103	-	1.489.349.590
	% Perangkat daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% potensi BMD yang dimanfaatkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				-	5.037.818.395	-	5.177.569.128	-	5.321.284.707	-	5.469.079.523	-	5.621.071.309
	% Peningkatan Wajib Pajak Daerah	Persen	2,50	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50	
	% Realisasi Penerimaan PAD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	% harmonisasi perencanaan pendapatan transfer	Persen	95,00	97,99		98,48		98,97		99,46		99,96	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					6.506.254.478		6.686.740.110		6.872.346.270		7.063.220.694		7.259.515.432

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
KEPEGAWAIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-		-		-		-		-	
	Nilai SAKIP OPD BKD	Angka	69,00	69,69	70,39		71,09		71,80		72,52		
	Nilai IKM OPD BKD	Angka	98,00	98,10	98,20		98,29		98,39		98,49		
	Indeks Manajemen Risiko OPD BKD												
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				-	5.171.442.598	-	5.314.900.111	-	5.462.427.633	-	5.614.142.592	-	5.770.165.842
	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya	Persen	64,00	66,02	67,05		68,09		69,16		70,24		
	% Tingkat disiplin kerja ASN	Persen	99,00	99,00	99,00		99,00		99,00		99,00		
	% Tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	% Pemenuhan Kebutuhan ASN	Persen	49,00	51,02	52,06		53,12		54,21		55,31		
	% Tingkat pemenuhan kekosongan jabatan struktural	Persen	80,00	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		
	% Tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				-	1.334.811.880	-	1.371.839.999	-	1.409.918.637	-	1.449.078.103	-	1.489.349.590
	% Pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	Persen	98,00	99,10	99,20		99,30		99,40		99,50		
INSPEKTORAT					15.642.144.375		16.076.062.586		16.522.291.421		16.981.186.060		17.453.112.056
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
INSPEKTORAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	10.079.583.209	-	10.359.194.150	-	10.646.737.888	-	10.942.443.297	-	11.246.545.934
	Nilai SAKIP OPD INSPEKTORAT	Angka	82,90	83,60	83,95		84,31		84,66		85,02		
	Nilai IKM OPD INSPEKTORAT		84,50	85,00	85,25		85,50		85,76		86,01		
	Indeks Manajemen Risiko OPD INSPEKTORAT												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				-	3.940.869.229	-	4.050.190.233	-	4.162.612.765	-	4.278.226.310	-	4.397.122.965
	% Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang telah sesuai rekomendasi	Persen	84,00	86,01	87,04		88,07		89,12		90,18		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				-	1.621.691.938	-	1.666.678.203	-	1.712.940.767	-	1.760.516.453	-	1.809.443.158
	% Penurunan temuan berulang hasil pemeriksaan	Persen	50,00	60,50	66,55		73,21		80,53		88,58		
KELURAHAN KUTOHARJO					494.833.833		508.560.685		522.676.980		537.193.954		552.123.170
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	494.833.833	-	508.560.685	-	522.676.980	-	537.193.954	-	552.123.170
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	23,00	23,00	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
KELURAHAN SIDOWAYAH					572.538.953		588.421.371		604.754.387		621.551.000		638.824.592
UNSUR KEWILAYAHAN													

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	572.538.953	-	588.421.371	-	604.754.387	-	621.551.000	-	638.824.592
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN TANJUNGSARI					493.403.677		507.090.857		521.166.353		535.641.370		550.527.438
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	493.403.677	-	507.090.857	-	521.166.353	-	535.641.370	-	550.527.438
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN GEGUNUNGKULON					459.175.287		471.912.960		485.012.011		498.482.867		512.336.259
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	459.175.287	-	471.912.960	-	485.012.011	-	498.482.867	-	512.336.259
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	23,00	23,46	23,93	24,41	24,90	25,39	25,87	26,35	26,83	27,31	27,79
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KELURAHAN MAGERSARI					520.099.915		534.527.657		549.364.726		564.622.932		580.314.430
UNSUR KEWILAYAHAN													

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	520.099.915	-	534.527.657	-	549.364.726	-	564.622.932	-	580.314.430
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	23,00	23,46		23,93		24,41		24,90		25,39	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KELURAHAN LETEH					744.634.342		765.290.742		786.533.182		808.378.570		830.844.307
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	744.634.342	-	765.290.742	-	786.533.182	-	808.378.570	-	830.844.307
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	23,00	23,46		23,93		24,41		24,90		25,39	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN REMBANG					6.936.731.310		7.129.158.510		7.327.045.031		7.530.548.382		7.739.830.675
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				-	6.403.759.995	-	6.581.402.396	-	6.764.084.660	-	6.951.952.197	-	7.145.154.660
	Nilai SAKIP OPD Rembang	Angka	62,00	64,02		65,05		66,10		67,16		68,25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				-	97.250.580	-	99.948.343	-	102.722.644	-	105.575.690	-	108.509.756
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	162.084.300	-	166.580.571	-	171.204.406	-	175.959.484	-	180.849.593

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	95.343.706	-	97.988.571	-	100.708.474	-	103.505.579	-	106.382.114
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	178.292.730	-	183.238.628	-	188.324.846	-	193.555.432	-	198.934.552
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
KELURAHAN PACAR					509.299.380		523.427.511		537.956.470		552.897.820		568.263.464
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	509.299.380	-	523.427.511	-	537.956.470	-	552.897.820	-	568.263.464
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	23,00	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN KALIORI					4.166.996.659		4.282.590.511		4.401.463.859		4.523.711.320		4.649.430.275
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	3.648.326.899	-	3.749.532.683	-	3.853.609.760	-	3.960.640.971	-	4.070.711.577
	Nilai SAKIP OPD Kec. Kaliori	Angka	64,00	66,02		67,05		68,09		69,16		70,24	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Nilai IKM OPD Kec. Kaliori												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Kaliori												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	61.019.972	-	62.712.686	-	64.453.423	-	66.243.570	-	68.084.553
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	214.523.338	-	220.474.286	-	226.594.067	-	232.887.552	-	239.359.756
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	17,00	19,06		20,18		21,37		22,62		23,95	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	57.206.223	-	58.793.143	-	60.425.084	-	62.103.347	-	63.829.268
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	47.671.853	-	48.994.286	-	50.354.237	-	51.752.789	-	53.191.057
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	138.248.373	-	142.083.428	-	146.027.287	-	150.083.089	-	154.254.065
	Persentase Desa dengan tata	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	kelola Pemerintahan baik												
KECAMATAN SULANG					3.278.870.040		3.369.826.969		3.463.364.423		3.559.556.853		3.658.480.887
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.992.838.923	-	3.075.861.255	-	3.161.239.001	-	3.249.040.117	-	3.339.334.546
	Nilai SAKIP OPD Kec. Sulang	Angka	67,00	71,06		73,18		75,37		77,62		79,93	
	Nilai IKM OPD Kec. Sulang												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Sulang												
PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK				-	47.671.853	-	48.994.286	-	50.354.237	-	51.752.789	-	53.191.057
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa DAN KELURAHAN				-	104.878.076	-	107.787.429	-	110.779.321	-	113.856.137	-	117.020.325
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	6,00	8,17		9,53		11,12		12,97		15,13	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	52.439.038	-	53.893.714	-	55.389.661	-	56.928.068	-	58.510.162
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				-	47.671.853	-	48.994.286	-	50.354.237	-	51.752.789	-	53.191.057

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PEMERINTAHAN UMUM													
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	33.370.297	-	34.296.000	-	35.247.966	-	36.226.953	-	37.233.740
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN SUMBER					3.673.345.088		3.775.244.884		3.880.035.664		3.987.800.835		4.098.626.243
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.786.648.625	-	2.863.951.171	-	2.943.446.855	-	3.025.198.953	-	3.109.272.587
	Nilai SAKIP OPD Kec. Sumber	Angka	65,00	65,00		65,00		65,00		65,00		65,00	
	Nilai IKM OPD Kec. Sumber												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Sumber												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	181.153.041	-	186.178.286	-	191.346.101	-	196.660.600	-	202.126.016
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	286.031.117	-	293.965.714	-	302.125.422	-	310.516.736	-	319.146.341
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	12,00	16,33		19,06		22,23		25,94		30,26	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	pemberdayaan masyarakat												
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	114.412.447	-	117.586.286	-	120.850.169	-	124.206.695	-	127.658.536
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	76.274.965	-	78.390.857	-	80.566.779	-	82.804.463	-	85.105.691
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	228.824.894	-	235.172.571	-	241.700.338	-	248.413.389	-	255.317.073
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN BULU					2.330.533.871		2.395.183.644		2.461.667.586		2.530.038.614		2.600.351.194
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.001.502.742	-	2.057.025.084	-	2.114.122.642	-	2.172.840.862	-	2.233.226.520
	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	Angka	62,50	63,50		64,01		64,52		65,04		65,56	
	Nilai IKM OPD Kec. Bulu												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Bulu												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	39.090.919	-	40.175.314	-	41.290.474	-	42.437.287	-	43.616.667
	Capaian urusan pemerintahan	Persen	95,00	105,26		110,80		116,64		122,77		129,24	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	yang dilimpahkan ke Camat												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	118.321.539	-	121.603.817	-	124.979.216	-	128.450.423	-	132.020.203
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	8,00	12,50		15,63		19,53		24,41		30,52	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	59.113.098	-	60.752.914	-	62.439.254	-	64.173.459	-	65.956.910
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	47.671.853	-	48.994.286	-	50.354.237	-	51.752.789	-	53.191.057
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	64.833.720	-	66.632.229	-	68.481.762	-	70.383.794	-	72.339.837
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
KECAMATAN LASEM					3.929.590.831		4.038.598.969		4.150.699.759		4.265.982.428		4.384.538.812
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	3.409.967.635	-	3.504.561.255	-	3.601.838.575	-	3.701.877.024	-	3.804.756.293
	Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem	Angka	65,50	70,60		73,29		76,09		78,99		82,01	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Nilai IKM OPD Kec. Lasem												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Lasem												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	81.042.150	-	83.290.286	-	85.602.203	-	87.979.742	-	90.424.797
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	128.714.003	-	132.284.571	-	135.956.440	-	139.732.531	-	143.615.853
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	14,00	18,29		20,90		23,88		27,30		31,19	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM				-	114.412.447	-	117.586.286	-	120.850.169	-	124.206.695	-	127.658.536
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	52.439.038	-	53.893.714	-	55.389.661	-	56.928.068	-	58.510.162
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	143.015.559	-	146.982.857	-	151.062.711	-	155.258.368	-	159.573.170
	Persentase Desa dengan tata	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	kelola Pemerintahan baik												
KECAMATAN PANCUR					3.022.548.021		3.106.394.494		3.192.619.761		3.281.292.455		3.372.483.212
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.587.304.005		2.659.076.666		2.732.885.577		2.808.789.488		2.886.848.864
	Nilai SAKIP OPD Kec. Pancur	Angka	72,00	74,01		75,04		76,08		77,14		78,21	
	Nilai IKM OPD Kec. Pancur												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Pancur												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	81.042.150		83.290.286		85.602.203		87.979.742		90.424.797
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	224.057.708		230.273.143		236.664.914		243.238.110		249.997.967
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	6,00	8,17		9,53		11,12		12,97		15,13	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	71.507.779		73.491.429		75.531.356		77.629.184		79.786.585
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				-	38.137.482		39.195.429		40.283.390		41.402.232		42.552.845

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PEMERINTAHAN UMUM													
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	20.498.897	-	21.067.543	-	21.652.322	-	22.253.699	-	22.872.154
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN SLUKE					2.775.760.373		2.852.760.876		2.931.945.947		3.013.378.615		3.097.123.750
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.360.443.191	-	2.425.922.659	-	2.493.259.834	-	2.562.508.314	-	2.633.723.263
	Nilai SAKIP OPD Kec. Sluke	Angka	62,00	64,02		65,05		66,10		67,16		68,25	
	Nilai IKM OPD Kec. Sluke												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Sluke												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	42.904.668	-	44.094.857	-	45.318.813	-	46.577.510	-	47.871.951
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	90.576.520	-	93.089.143	-	95.673.050	-	98.330.300	-	101.063.008
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-		11,00	13,09		14,28		15,58		17,00		18,54	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	94.008.894	-	96.616.731	-	99.298.555	-	102.056.501	-	104.892.764
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	38.137.482	-	39.195.429	-	40.283.390	-	41.402.232	-	42.552.845
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	149.689.618	-	153.842.057	-	158.112.304	-	162.503.759	-	167.019.918
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN PAMOTAN					4.053.508.092		4.165.953.735		4.281.589.555		4.400.507.594		4.522.802.581
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	3.233.504.551	-	3.323.203.027	-	3.415.446.324	-	3.510.307.864	-	3.607.863.213
	Nilai SAKIP OPD Kec. Pamotan	Angka	69,00	73,06		75,18		77,35		79,60		81,90	
	Nilai IKM OPD Kec. Pamotan												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Pamotan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	316.779.462	-	325.567.028	-	334.603.905	-	343.897.285	-	353.454.572
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	207.658.591	-	213.419.108	-	219.343.057	-	225.435.151	-	231.700.243
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	15,00	19,27		21,84		24,75		28,05		31,79	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	114.412.447	-	117.586.286	-	120.850.169	-	124.206.695	-	127.658.536
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	95.343.706	-	97.988.571	-	100.708.474	-	103.505.579	-	106.382.114
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	85.809.335	-	88.189.714	-	90.637.627	-	93.155.021	-	95.743.902
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN GUNEM					2.499.268.394		2.568.598.918		2.639.896.408		2.713.217.612		2.788.620.939
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.193.930.176	-	2.254.790.519	-	2.317.377.520	-	2.381.740.996	-	2.447.932.220
	Nilai SAKIP OPD Gunem	Angka	68,50	69,50		70,01		70,52		71,04		71,56	
	Nilai IKM OPD Kec. Gunem												

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Gunem												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	35.038.812	-	36.010.800	-	37.010.364	-	38.038.300	-	39.095.427
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	115.127.525	-	118.321.200	-	121.605.482	-	124.982.986	-	128.456.402
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	14,00	18,29		20,90		23,88		27,30		31,19	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	35.038.812	-	36.010.800	-	37.010.364	-	38.038.300	-	39.095.427
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	35.038.812	-	36.010.800	-	37.010.364	-	38.038.300	-	39.095.427
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	85.094.257	-	87.454.800	-	89.882.313	-	92.378.729	-	94.946.036
	Persentase Desa dengan tata kelola	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pemerintahan baik												
KECAMATAN SALE					4.580.787.388		4.707.859.931		4.838.537.629		4.972.924.496		5.111.127.584
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	3.705.321.460	-	3.808.108.291	-	3.913.811.272	-	4.022.514.536	-	4.134.304.677
	Nilai SAKIP OPD Kec. Sale	Angka	60,50	61,10		61,40		61,71		62,01		62,32	
	Nilai IKM OPD Kec. Sale												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Sale												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	217.872.762	-	223.916.624	-	230.131.955	-	236.523.703	-	243.096.959
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	140.786.423	-	144.691.884	-	148.708.147	-	152.838.408	-	157.085.957
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	13,00	15,08		16,24		17,49		18,83		20,28	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	107.203.509	-	110.177.370	-	113.235.601	-	116.380.638	-	119.614.985
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	74.987.825	-	77.068.011	-	79.207.215	-	81.407.138	-	83.669.532

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	334.615.409	-	343.897.750	-	353.443.439	-	363.260.074	-	373.355.474
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
KECAMATAN KRAGAN					3.289.357.847		3.380.605.712		3.474.442.355		3.570.942.467		3.670.182.919
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.817.406.504	-	2.895.562.284	-	2.975.935.409	-	3.058.589.852	-	3.143.591.457
	Nilai SAKIP OPD Kragan	Angka	69,00	73,06		75,18		77,35		79,60		81,90	
	Nilai IKM OPD Kec. Kragan												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Kragan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	147.782.744	-	151.882.286	-	156.098.135	-	160.433.647	-	164.892.276
	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	57.206.223	-	58.793.143	-	60.425.084	-	62.103.347	-	63.829.268
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	15,00	19,27		21,84		24,75		28,05		31,79	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	61.973.409	-	63.692.571	-	65.460.508	-	67.278.626	-	69.148.374
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan UMUM				-	47.671.853	-	48.994.286	-	50.354.237	-	51.752.789	-	53.191.057
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan DESA				-	157.317.114	-	161.681.143	-	166.168.982	-	170.784.205	-	175.530.487
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN SEDAN					2.867.323.701		2.946.864.200		3.028.661.330		3.112.780.198		3.199.287.812
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.413.602.074	-	2.480.556.187	-	2.549.409.844	-	2.620.217.850	-	2.693.036.610
	Nilai SAKIP OPD Kec. Sedan	Angka	62,50	63,50		64,01		64,52		65,04		65,56	
	Nilai IKM OPD Kec. Sedan												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Sedan												
PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK				-	97.536.611	-	100.242.309	-	103.024.769	-	105.886.207	-	108.828.902
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	109.645.262	-	112.686.857	-	115.814.745	-	119.031.416	-	122.339.431
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	17,00	19,06		20,18		21,37		22,62		23,95	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	87.256.653	-	89.677.181	-	92.166.381	-	94.726.236	-	97.358.783
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	62.985.959	-	64.733.210	-	66.530.032	-	68.377.855	-	70.278.152
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	96.297.143	-	98.968.457	-	101.715.559	-	104.540.635	-	107.445.935
	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Persen	97,00	98,10		98,20		98,29		98,39		98,49	
KECAMATAN SARANG					2.889.937.321		2.970.105.130		3.052.547.366		3.137.329.651		3.224.519.522
UNSUR KEWILAYAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	2.474.238.764	-	2.542.874.959	-	2.613.458.419	-	2.686.045.328	-	2.760.693.507
	Nilai SAKIP OPD Sarang	Angka	69,00	73,06		75,18		77,35		79,60		81,90	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Nilai IKM OPD Kec. Sarang												
	Indeks Manajemen Risiko OPD Kec. Sarang												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	26.219.519	-	26.946.857	-	27.694.830	-	28.464.034	-	29.255.081
	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	188.303.819	-	193.527.428	-	198.899.236	-	204.423.518	-	210.104.674
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	12,00	16,33		19,06		22,23		25,94		30,26	
	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	38.137.482	-	39.195.429	-	40.283.390	-	41.402.232	-	42.552.845
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-	43.858.105	-	45.074.743	-	46.325.898	-	47.612.566	-	48.935.772
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	119.179.632	-	122.485.714	-	125.885.593	-	129.381.973	-	132.977.642
	Persentase Desa dengan tata	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	kelola Pemerintahan baik												
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					65.370.971.233		67.184.383.397		69.049.243.587		70.967.036.157		72.939.288.808
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	3.786.239.043		3.891.270.555		3.999.281.899		4.110.359.048		4.224.590.485
	Nilai SAKIP OPD BAKESBANGPOL	Angka	68,07	69,07		69,58		70,09		70,61		71,13	
	Nilai IKM OPD BAKESBANGPOL	Angka	88,25	88,55		88,70		88,85		89,00		89,15	
	Indeks Manajemen Risiko OPD BAKESBANGPOL												
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	2.088.027.155		2.145.949.713		2.205.515.582		2.266.772.175		2.329.768.288
	Indeks Ketahanan Ideologi	Angka	2,75	2,85		2,90		2,96		3,01		3,06	
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				-	57.198.921.726		58.785.638.559		60.417.371.881		62.095.420.486		63.821.121.098
	Indeks Ketahanan Politik	Angka	2,80	2,90		2,95		3,01		3,06		3,11	
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				-	510.088.826		524.238.857		538.790.336		553.754.846		569.144.308
	Indeks Ketahanan Ormas	Angka	2,60	2,70		2,75		2,81		2,86		2,91	
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan				-	834.257.425		857.399.999		881.199.148		905.673.814		930.843.494

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024 (angka sementara)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
	Indeks Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Angka	2,80	2,90		2,95		3,01		3,06		3,11	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				-	953.437.057	-	979.885.714	-	1.007.084.741	-	1.035.055.788	-	1.063.821.136
	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan	Angka	2,80	2,90		2,95		3,01		3,06		3,11	
JUMLAH					2.064.965.778.576		2.122.248.605.977		2.181.156.595.281		2.241.736.634.886		2.304.036.982.515

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rembang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target Kinerja					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,53	72,92	73,31	73,7	74,09	74,46	74,85
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	62,78	63,63	64,47	65,32	66,16	67	67,85
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,82	0,8	0,78	0,76	0,74	0,72	0,7
4	Indeks Ketimpangan Gender (IPG)	Angka	0,265	0,256	0,247	0,238	0,229	0,22	0,211
5	Indeks Perlindungan Anak	Angka	64,67 (2022)	65,17	65,67	66,17	66,67	67,17	67,67
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,08	5,14	5,20-6,00	5,40-6,20	5,60-6,40	5,80-6,60	6,00-6,80
7	PDRB per Kapita	Juta Rp	38,77	46,45	54,13	61,81	69,49	69,5	77,18
8	Tingkat Kemiskinan	%	14,02	12,81	12,14	11,48	10,81	10,14	9,47
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,72	70,34	70,82	71,3	71,78	72,27	72,75
10	Opini Laporan Keuangan BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Indeks Infrastruktur	Angka	67,4	69,9	72,4	74,9	77,4	79,9	82,4
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,52	76,15	76,32	76,49	76,66	76,83	77,00
13	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO ₂ eq)	Indeks	NA	1.829.049,37	3.026.942,44	4.224.835,52	5.422.728,59	6.620.621,67	7.818.514,74

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rembang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
I.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86,85	87,69	88,53	89,37	90,21	91,05	91,89	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	10,02	8,82	7,62	6,42	5,22	4,02	2,82	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita								
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	92,71	93,11	93,51	93,91	94,31	94,71	95,11	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,52	67,15	67,64	68,14	68,63	69,124	69,62	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0,8	5,06	9,33	13,59	17,86	22,12	26,38	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg								
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen								
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK		NA	1.829.049,37	3.026.942,44	4.224.835,52	5.422.728,59	6.620.621,67	7.818.514,74	
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	126,95	111,78	109,74	109,74	109,74	103,63	101,59	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,65	0,69	0,73	0,77	0,81	0,85	0,89	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk,	Persen	0,82	0,8	0,78	0,76	0,74	0,72		
I.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,08	5,1	5,12	5,14	5,16	5,18		
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,08	5,1	5,12	5,14	5,16	5,18		
3	PDRB per Kapita	Juta Rp	14,02	12,81	12,14	11,48	10,81	10,14		
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,58	2,53	2,48	2,43	2,38	2,34		
5	Indeks Gini	Angka	0,328	0,324	0,32	0,316	0,312	0,308		
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,53	72,92	73,31	73,70	74,09	74,46	74,85	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,77	75,07	75,37	75,67	75,97	76,26	76,56	
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,35	0,43	0,51	0,59	0,67	0,75	0,83	

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Prevalensi Stunting	Persen								
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,3	12,35	12,4	12,45	12,5	12,54	12,58	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	7,73	8,14	8,55	8,96	9,37	9,78	10,19	
12	Angka Literasi/ Numerasi	Angka								
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Skor	58,74 (th 2023)	64,24	69,74	75,24	80,74	86,24	91,74	
14	Indeks Literasi Digital	Angka								
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen								
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka								
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka								
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka	64,67 (th 2022)	65,17	65,67	66,17	66,67	67,17	67,67	
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka								
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,265	0,256	0,247	0,238	0,229	0,22	0,211	
21	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	53,6	54,2	56,5	58,8	61,1	63,4	65,7	
I.3	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	Persen	42,77	42,55	42,33	42,11	41,89	41,67	41,45	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	24,39	24,84	25,01	25,18	25,34	25,51	25,68	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,64	3,76	3,88	4,00	4,12	4,24	4,36	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen								
5	Rasio Kewirausahaan,	Persen	4,35	5,17	5,20	5,24	5,27	5,3	5,33	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	58,22	62,32	66,42	70,52	74,62	78,72	82,82	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	58,32	61,82	65,32	68,82	72,32	75,82	79,32	
8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10								
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	22,54	22,95	23,36	23,77	24,18	24,6	25,01	
10	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB								
11	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	67,4	69,9	72,4	74,9	77,4	79,9	82,4	
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	76,46	77,66	78,86	80,06	81,26	82,46	83,66	
13	Persentase desa mandiri	Persen								
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen								
15	Tingkat Inflasi	Persen	1,54	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,5	
I.4	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	66,97	67,97	69,07	70,17	71,27	72,38	73,48	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,99	4,01	4,03	4,05	4,07	4,09	4,11	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,39	4,45	4,48	4,51	4,53	4,56	4,59	
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,32	76,95	77,77	78,59	79,41	80,21	81,03	
5	Persentase Penegakan Perda	Persen								
6	Indeks Rasa Aman	Angka								
7	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka								
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,69	3,73	3,77	3,81	3,85	3,89	3,93	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
	PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	96,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	110,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	72,96	76,36	79,76	83,16	86,56	89,96	93,36	
	KESEHATAN									
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Persen	1,38	1,38	1,38	1,39	1,39	1,4	1,4	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persen	98,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kesehatan sesuai standar									
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	99,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	45,92	50,62	55,32	60,02	64,72	69,42	74,12	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Persen	5,35	8,85	12,35	15,85	19,35	22,85	26,35	
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	34,75	37,25	39,75	42,25	44,75	47,25	49,75	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	Persen	92,84	93,76	94,68	95,6	96,52	97,44	98,36	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	rumah tangga di seluruh Kota									
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	92,71	92,87	93,03	93,19	93,35	93,51	93,67	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Rasio kemantapan jalan	Persen	71,17	73,47	75,77	78,07	80,37	82,67	84,97	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	3,95	8,95	13,95	18,95	23,95	28,95	33,95	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruks	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100	100	100	100	100	100	100	
1	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen								
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	Persen	NIHIL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	Persen	75,27	78,27	81,27	84,27	87,27	90,27	93,27	
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	24,33	28,74	33,15	37,56	41,97	46,38	50,79	
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	1,06	97,66	98,06	98,46	98,86	99,26	99,66	
	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kesiapsiagaan terhadap bencana									
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	43,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	18,14	21,84	25,54	29,24	32,94	36,64	40,34	
SOSIAL										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TENAGA KERJA										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	55,55	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,57	0,67	0,77	0,87	0,97	1,07	1,17	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		0							
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar)	Persen	71,42	74,48	77,54	80,60	83,66	86,72	89,78	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Persen	83,53	86,03	88,53	91,03	93,53	96,03	98,53	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	47,72	49,72	51,72	53,72	55,72	57,72	59,72	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	1,50	1,4	1,3	1,2	1,1	1	0,9	
PANGAN										
1	Persentase cadangan pangan	Persen	130,16	100	100	100	100	100	100	
PERTANAHAN										
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	95,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	-							
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Persen	38,24							
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Persen	66,52	67,15	67,64	68,14	68,63	69,124	69,62	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kota	Persen	38,58	41,18	43,78	46,38	48,98	51,58	54,18	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	92,31	92,65	92,99	93,33	93,67	94,01	94,35	
ADMINISTRASI PENDUDUK DAN CATATAN SIPII										
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,63	99,65	99,67	99,69	99,71	99,73	99,75	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	57,72	62,82	67,92	73,02	78,12	83,22	88,32	
3	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	Persen	92,54	93,74	94,94	96,14	97,34	98,54	99,74	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	15,00	19,70	24,40	29,10	33,80	38,50	43,20	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,00	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	74,04	75,54	77,04	78,54	80,04	81,54	83,04	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	5,46	4,66	3,86	3,06	2,26	1,46	0,66	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		2,00	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
PERHUBUNGAN										
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	0,285	1,385	2,485	3,585	4,685	5,785	6,885	
KOMUNIKASI DAN INFORMASI										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	86,67	93,34	100,00	100	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	Persen	96,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
KOPERASI DAN UMKM										
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	46,19	46,69	47,19	47,69	48,19	48,69	49,19	
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
PENANAMAN MODAL										
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	Persen	8,72	9,62	10,52	11,42	12,32	13,22	14,12	
PEMUDA DAN OLAHRAGA										

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	46,78	49,08	51,38	53,68	55,98	58,28	60,58	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	10,92	13,22	15,52	17,82	20,12	22,42	24,72	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	5,00	6	7	8	9	11	13	
STATISTIK										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PERSANDIAN										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	45,27	45,39	45,51	45,63	45,75	45,87	45,99	
KEBUDAYAN										
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	80,92	82,22	83,52	84,82	86,12	87,42	88,72	
PERPUSTAKAAN										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		75,35	78,65	81,95	85,25	88,55	91,85	95,15	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		62,37	63,87	65,37	66,87	68,37	69,87	71,37	
KEARSIPAN										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		20,23	26,53	32,83	39,13	45,43	51,73	58,03	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		30,40	35,40	40,40	45,40	50,40	55,40	60,40	
KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)		95,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PARIWISATA										

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-26,92	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	Persen	22,83	25,43	28,03	30,63	33,23	35,83	38,43	
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	26,89	29,89	32,89	35,89	38,89	41,89	44,89	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	3,63	3,81	3,99	4,17	4,35	4,53	4,71	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2,27	2,41	2,55	2,69	2,83	2,97	3,11	
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		22,83	25,43	28,03	30,63	33,23	35,83	38,43	
PERTANIAN										
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	713,9	738,9	763,9	788,9	813,9	838,9	863,9	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	3	3	3	3	3	3	3	
KEHUTANAN										
1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen								
2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah								
3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Jumlah								
4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Jumlah								
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kota	Persen								
PERDAGANGAN										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	2,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	75,97	78,27	80,57	82,87	85,17	87,47	89,77	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	76,96	78,96	80,96	82,96	84,96	86,96	88,96	
PERINDUSTRIAN										
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	Persen	11,45	1,41	1,71	2,01	2,31	2,61	2,91	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Persen	-	25	30	35	40	45	50	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	8,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TRANSMIGRASI										
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan								
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Permukiman								
3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Permukiman								
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN										
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	15,68	15,88	16,08	16,28	16,48	16,68	16,88	
2	Persentase PAD	Persen	19,34	19,94	20,54	21,14	21,74	22,34	22,94	

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,01	3	3	3	3	3	3	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3	3	3	3	3	3	
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	65,05	65,18	65,31	65,44	65,57	65,70	65,83	
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		WDP								
		TW								
		TMP								
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGADAAN										
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen								
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	19,07	65	70	75	80	85	90	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		-6,37	5	9	13	17	23	29	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN										
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	59,78	62,78	65,78	68,78	71,78	74,78	77,78	
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	22,22	25,22	28,22	31,22	34,22	37,22	40,22	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	41,29	44,29	47,29	50,29	53,29	56,29	59,29	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MANAJEMEN KEUANGAN										

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	8,23	7,18	6,13	5,08	4,03	2,98	1,93	
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1,75	1,71	1,67	1,63	1,59	1,55	1,51	
3	Assets management	Jumlah	4,00	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
		ada/tidak								
		ada/tidak								
		ada/tidak								
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	8,08	0	0	0	0	0	0	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK										
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persen	96,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan daerah. RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pengembangan wilayah, manajemen keuangan daerah, serta program kolaboratif antar lembaga. Proses penyusunannya selaras dengan dokumen perencanaan hierarkis, seperti RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029.

Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, RPJMD Kabupaten Rembang juga menjadi landasan untuk menyusun dokumen perencanaan lain guna menjamin keselarasan dan keberlanjutan pelaksanaan di masa depan. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Di bawah ini dijabarkan kaidah operasional dan pedoman transisi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, oleh karena itu dalam implementasinya konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat dari semua pemangku kepentingan diperlukan guna pencapaian target-target dalam RPJMD tahun 2025 - 2029. Dalam rangka implementasi RPJMD tahun 2025 – 2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Rembang 2025 – 2029 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD Kabupaten Rembang 2025 - 2029 dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang 2025 – 2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
- d. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029;
- e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD tahun 2025 - 2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Rembang.
- f. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan: 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan kondisi tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat monitoring dan evaluasi dilaksanakan ; 2) Hasil pengendalian,

- monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan Monitoring dan evaluasi; dan 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan nasional);
- g. Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029;

5.2. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2030 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD.